

KATA PENGANTAR

Laporan ini adalah laporan tahap akhir penelitian mengenai **“Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D) Kota Pangkalpinang 2007 - 2026”** yang dilakukan oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat - Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM-FEUI) bekerja sama dengan Bappeda Kota Pangkalpinang, sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor Pihak Pertama: No. 01a/RPJP-D/BPPD/2006, tertanggal 19 Mei 2006.

Atas nama Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat - Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia beserta seluruh staf, kami mengucapkan terima kasih kepada Bappeda Kota Pangkalpinang, yang telah mempercayakan penelitian ini kepada Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat – Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Akhirnya, ingin kami jelaskan bahwa pemikiran-pemikiran serta pendapat-pendapat yang dikemukakan di dalam studi ini merupakan pemikiran kolektif dari Lembaga dan tidak mencerminkan keinginan-keinginan dari pihak-pihak yang mempercayakan studi ini kepada kami.

Jakarta, September 2006

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Wakil Kepala Penelitian
Regional dan Infrastruktur

Dr. Widyono Soetjipto

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN	7
1.3. LANDASAN HUKUM DAN HUBUNGAN RPJP-D DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA	8
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	12
BAB II. KONDISI, ANALISIS, DAN PREDIKSI KONDISI UMUM KOTA PANGKALPINANG	13
2.1 KONDISI DAN ANALISIS	13
2.1.1 Geomorfologi dan Lingkungan Hidup	13
2.1.2 Demografi (Kependudukan)	19
2.1.3 Ekonomi dan Sumber Daya Alam	21
2.1.4 Sosial, Budaya dan Politik.....	26
2.1.5 Prasarana dan Sarana.....	33
2.1.6 Pemerintahan.....	44
2.1.7 Keunggulan Komparatif Daerah	46
2.2. PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH.....	60
BAB III. VISI, MISI, ARAH PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENJELASAN DASAR AKADEMIK PENYUSUNANNYA.....	70
3.1. VISI:	71
3.2 MISI	73
3.3. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 20 TAHUN	74
3.3.1. Arah Kebijakan Pembangunan 5 Tahun Pertama.....	74
3.3.2. Arah Kebijakan Pembangunan 5 Tahun Kedua	76
3.3.3. Arah Kebijakan Pembangunan 5 Tahun Ketiga	78
3.3.4. Arah Kebijakan Pembangunan 5 Tahun Keempat.....	81
3.4. PENJELASAN DASAR AKADEMIK PENYUSUNAN VISI, MISI DAN ARAH PEMBANGUNAN	82
3.4.1. Konsistensi Visi, Misi Jangka Panjang dan Menengah.	82
3.4.2. Prinsip Penyusunan Visi, Misi & Arah Pembangunan ..	84
3.4.3. Analisis SWOT	87
3.4.4. Pengolahan Kuesioner SWOT	90
3.4.5. Hasil Olahan Kuesioner SWOT Kota Pangkalpinang ...	95
3.4.6. Uji Konsistensi Faktor Unggulan dan Non Unggulan...	100
3.4.7. Uji Kapabiliti Faktor Unggulan dan Non Unggulan	101
3.4.8. Diagram Kombinasi : SWOT.....	103
BAB IV. PENUTUP.....	105

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Curah Hujan (mm) dan Jumlah Hari Hujan dalam Satu Bulan di Kota Pangkalpinang Tahun 2004 dan 2005	14
Tabel 2.2 Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar dan Penempatannya serta Sisa yang Belum Ditempatkan menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, Kota Pangkalpinang Tahun 2004.....	20
Tabel 2.3 Distribusi Kegiatan Perekonomian Pangkalpinang, 2000 – 2004 (%)	24
Tabel 2.4 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kota Pangkalpinang menurut Lapangan Usaha, 2001 – 2004 (%).....	27
Tabel 2.5 Jumlah Sekolah, Guru, Murid dan Rasio Murid terhadap Jumlah Guru Kota Pangkalpinang Tahun 2004	28
Tabel 2.6 IPM Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung dan Indonesia, Tahun 1999 dan 2002.....	30
Tabel 2.7 Jumlah Pelanggan PLN di Kota Pangkalpinang Tahun 2000 – 2004.....	34
Tabel 2.8 VA Tersambung pada Konsumen di Kota Pangkalpinang 2002 – 2004.....	35
Tabel 2.9 Panjang Jalan di Kota Pangkalpinang menurut Jenisnya, 2003 – 2004.....	40
Tabel 2.10 Arus Kapal, Barang, dan Penumpang di Pelabuhan Pangkalpinang, Tahun 2000 – 2003.....	41
Tabel 2.11 Perhitungan Indeks LQ Kota Pangkalpinang dengan Perbandingan Nasional, Tahun 2000 – 2004	48
Tabel 2.12 Perhitungan Indeks LQ Kota Pangkalpinang dengan Perbandingan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2000 – 2004	49
Tabel 2.13 <i>Output Multiplier</i> Kota Pangkalpinang	54
Tabel 2.14 <i>Income Multiplier</i> Kota Pangkalpinang.....	56
Tabel 2.15 Keterkaitan Ke Belakang dan Ke Depan antar Sektor Perekonomian Kota Pangkalpinang.....	57
Tabel 2.16 Urutan Prioritas Sektor Unggulan Kota Pangkalpinang berdasarkan Pengolahan Tabel Input Output Kota Pangkalpinang	59
Tabel 2.17 Proyeksi Jumlah Penduduk dan Tingkat Pertumbuhan Penduduk Kota Pangkalpinang, 2007 – 2026.....	61
Tabel 2.18 Proyeksi Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kota Pangkalpinang dengan Asumsi Tidak Ada Perubahan Sebaran Penduduk per Kecamatan, Tahun 2004 - 2026	63
Tabel 2.19 Proyeksi Pertumbuhan Sektorial Tahunan Kota Pangkalpinang, Tahun 2004 – 2026 (%).....	67

Tabel 2.20	Proyeksi Distribusi Kegiatan Sektoral Tahunan Kota Pangkalpinang, Tahun 2004 – 2026 (%)	69
Tabel 3.1	Arah Kebijakan 5 tahun Pertama Berdasarkan Olahan Kuesioner SWOT Kota Pangkalpinang	74
Tabel 3.2	Arah Kebijakan 5 tahun Kedua Berdasarkan Olahan Kuesioner SWOT Kota Pangkalpinang.....	76
Tabel 3.3	Arah Kebijakan 5 tahun Ketiga Berdasarkan Olahan Kuesioner SWOT Kota Pangkalpinang.....	78
Tabel 3.4	Arah Kebijakan 5 tahun Keempat Berdasarkan Olahan Kuesioner SWOT Kota Pangkalpinang.....	81
Tabel 3.5	Kombinasi SWOT dan Strategi Yang Disesuaikan	92
Tabel 3.6	Proporsi Responden Kuesioner SWOT Kota Pangkalpinang.....	93
Tabel 3.7	Faktor Kekuatan Kota Pangkalpinang.....	96
Tabel 3.8	Faktor Kelemahan Kota Pangkalpinang.....	97
Tabel 3.9	Faktor Kesempatan Kota Pangkalpinang	98
Tabel 3.10	Faktor Ancaman Kota Pangkalpinang	99
Tabel 3.11	Uji Konsistensi Kuesioner SWOT Kota Pangkalpinang.....	101
Tabel 3.12	Uji Kapabilitas Faktor S dan W Kuesioner SWOT Kota Pangkalpinang.....	101
Tabel 3.13	Uji Kapabilitas Faktor O dan T Kuesioner SWOT Kota Pangkalpinang.....	102
Tabel 3.14	Jumlah Hasil Kali Rata-Rata Preferensi dan Urgensi Kuesioner SWOT Kota Pangkalpinang.....	103
Tabel 3.15	Diagram Kombinasi Kuesioner SWOT Kota Pangkalpinang	104

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Alur Perencanaan Pembangunan Daerah menurut UU No. 25 / 2004.....	4
Gambar 1.2 Tata Cara Penyusunan RPJP Daerah	6
Gambar 1.3 Skema Penyusunan RPJP-D Kota Pangkalpinang, 2007 - 2026 ..	11
Grafik 2.1 Perkembangan Volume Sampah Kota Pangkalpinang, 1999 – 2004 (m ³).....	16
Grafik 2.2 Perkembangan Kepadatan Penduduk Kota Pangkalpinang, 1993 – 2004 (Penduduk per Km ²).....	17
Grafik 2.3 Distribusi Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan di Kota Pangkalpinang, Tahun 2004 (Penduduk per Km ²).....	18
Grafik 2.4 Distribusi Penggunaan Lahan Kota Pangkalpinang.....	18
Grafik 2.5 Perkembangan dan Pertumbuhan (%) Penduduk Kota Pangkalpinang, 1993 – 2004	19
Grafik 2.6 Distribusi PDRB Pangkalpinang menurut Lapangan Usaha, 2004 (%)	22
Grafik 2.7 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung dan Indonesia, 2001 – 2004 (%)	25
Grafik 2.8 Usia Harapan Hidup di Kabupaten Bangka, Belitung dan Kota Pangkalpinang serta Indonesia (Tahun), Periode 1999 dan 2002.....	29
Gambar 2.9 Distribusi Keluarga di Kota Pangkalpinang berdasarkan Kategori Tingkat Kesejahteraan Tahun 2004	31
Gambar 2.10 Distribusi Pemilih berdasarkan Partisipasinya dalam Pemilu DPRD Kota Pangkalpinang Tahun 2004	32
Gambar 2.11 Komposisi Anggota DPRD Kota Pangkalpinang berdasarkan Partai Asal Anggota DPRD, 2004.....	33
Gambar 2.12 Perkembangan Energi Listrik (KWh) Terjual dan Terbangkit Netto di Kota Pangkalpinang Tahun 2004	36
Gambar 2.13 Distribusi KWh Listrik yang Terjual Berdasarkan jenis Pelanggan PLN di Kota Pangkalpinang Tahun 2004	37
Gambar 2.14 Perkembangan Volume Air Bersih yang Disalurkan serta Jumlah Pelanggan PDAM, 1997-2003.....	38
Gambar 2.15 Distribusi Volume Air yang Disalurkan berdasarkan Komponennya Tahun 2003	39
Gambar 2.16 Perkembangan Jumlah Pesawat yang Datang dan Berangkat dari Bandara Depati Amir, 1995 – 2004	43
Gambar 2.17 Nama Kecamatan dan Jumlah Kelurahan per Kecamatan di Kota Pangkalpinang, 2004	44
Gambar 2.18 Distribusi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Pangkalpinang (Bukan Guru) menurut Golongan, 2004	45

Gambar 2.19	Distribusi Output Perekonomian berdasarkan Sektor Produksi Kota Pangkalpinang Tahun 2002.....	51
Gambar 2.20	Distribusi Pendapatan Sektoral Perekonomian Kota Pangkalpinang Tahun 2002.....	53
Gambar 2.21	Proyeksi Kepadatan Penduduk Kota Pangkalpinang (Orang/Km ²)	61
Gambar 2.22	Proyeksi Volume Sampah Kota Pangkalpinang, 2004 -2026 (m ³)	64
Gambar 2.23	Proyeksi Energi Listrik Terbangkit dan Terjual, 2004 – 2026 (KWh)	65
Gambar 2.24	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Tahunan Kota Pangkalpinang, Tahun 2004 – 2026 (%)	66

1.1. LATAR BELAKANG

Implementasi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia telah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam melakukan proses perencanaan dan pembangunan perekonomian daerah, khususnya di tingkat Pemerintahan Kabupaten/Kota. Pelimpahan kewenangan yang disertai dengan dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ini jelas membutuhkan suatu sistem perencanaan yang matang sehingga tujuan dari proses pembangunan itu sendiri dapat tercapai secara sistematis.

Sebagai respons pemerintah pusat terhadap kekhawatiran adanya proses yang tidak terintegrasi, seluruh pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota diwajibkan menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. Tentunya, seluruh dokumen perencanaan daerah tersebut harus memperhatikan perencanaan di tingkat pemerintah pusat atau pemerintahan yang lebih tinggi untuk menjamin adanya koordinasi dalam kerangka pembangunan nasional secara keseluruhan.

Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud di atas merupakan pelaksanaan

Adanya kewajiban dari pemerintahan daerah untuk membuat dokumen perencanaan, salah satunya RPJP Daerah dengan memperhatikan integrasi dalam proses perencanaan

amanat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, yang selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahunan. Dokumen perencanaan RPJP tersebut adalah bersifat makro yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Kepala Daerah dengan DPRD bersama seluruh unsur masyarakat selaku pelaku pembangunan memberikan masukan dalam penyusunan RPJP-D melalui proses partisipatif.

Dalam penyusunan RPJP Daerah perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. RPJP Daerah Provinsi mengacu pada RPJP Nasional;
2. RPJP Daerah Kabupaten/Kota mengacu pada RPJP Daerah Provinsi;
3. Memperhatikan seluruh aspirasi pemangku-kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang RPJP Daerah;
4. Apabila RPJP di atasnya belum tersedia, maka penyusunan RPJP Daerah Provinsi dan atau RPJP Daerah Kabupaten/Kota dilakukan secara simultan dan terkoordinasi;

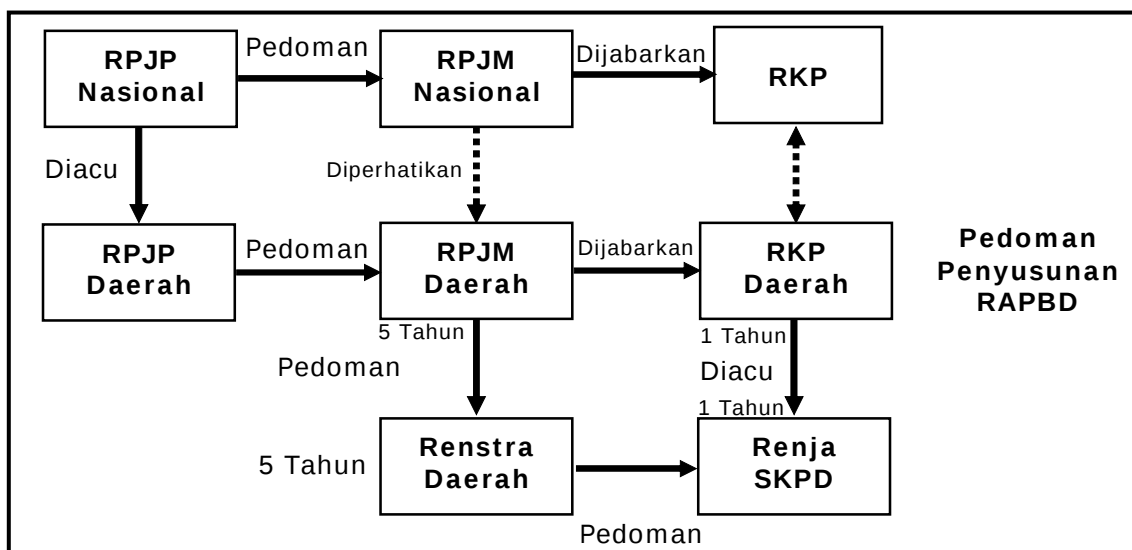
RPJP-D memuat
Visi, Misi dan Arah
Kebijakan
Pembangunan
mengacu pada UU
No. 32/2004 dan UU
No. 25/2004.

5. Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Provinsi dilakukan, selambatnya 3 (tiga) bulan setelah penetapan RPJP Nasional. Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Kabupaten/Kota dilakukan, selambatnya 3 (tiga) bulan setelah penetapan RPJP Daerah Provinsi;
6. Bagi Daerah yang belum dapat menyelesaikan penyusunan dan atau penetapan RPJP Daerah, maka Kepala Daerah terpilih berkewajiban melanjutkan penyelesaiannya. Khusus bagi daerah-daerah yang sedang mempersiapkan pelaksanaan Pilkada Langsung, kegiatan penyusunan Rancangan RPJP Daerah dapat *dilaksanakan oleh pejabat (caretaker) Kepala Daerah*;
7. Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Provinsi dikonsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri, cq Ditjen Bina Pembangunan Daerah, sebelum ditetapkan. Sedangkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Kabupaten/Kota dikonsultasikan kepada Gubernur cq Bappeda, sebelum ditetapkan.

Bagi provinsi yang belum memiliki RPJP-D, pembuatan dokumen perencanaan di tingkat pemerintahan kota dapat dilakukan secara simultan.

Selain RPJP dan RPJM, Pemerintahan Daerah juga memiliki perencanaan lima tahunan di tataran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD untuk kegiatan setiap tahunnya. Perencanaan tahunan di tataran pemerintah daerah juga dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai acuan dari proses pembuatan Renja SKPD. Interaksi seluruh dokumen perencanaan daerah dengan perencanaan di tingkat pemerintah pusat dapat ditunjukkan pada **Gambar 1.1** berikut ini:

Gambar 1.1
Alur Perencanaan Pembangunan Daerah
menurut UU No.25 / 2004



Dalam proses penyusunan dokumen RPJP, terdapat sejumlah prosedur penyusunan yang intinya ingin menggali sebanyak-banyaknya aspirasi masyarakat. Detail prosedur tersebut dapat dijelaskan pada bagian berikut ini.

Proses Penyusunan RPJP

RPJP Daerah disusun melalui proses sebagai berikut

1. Menyiapkan Rancangan RPJP Daerah

Perlu disiapkan rancangan awal untuk mendapatkan gambaran visi, misi, dan arah pembangunan daerah. Penanggungjawabnya adalah Kepala Bappeda. Selanjutnya rancangan awal ini menjadi bahan bahasan dalam Musrenbang RPJP daerah. Isi dari Rancangan RPJP Daerah ini harus dilampiri dengan analisis yang menggambarkan kondisi umum menyangkut masalah ekonomi dan sosial daerah dalam periode 20 tahun kedepan.

Proses awal penyusunan RPJP-D diawali dengan penyiapan Rancangan RPJP-D dibawah koordinasi Bappeda.

2. Menyelenggarakan Musrenbang RPJP Daerah.

Musrenbang RPJP Daerah merupakan forum konsultasi dengan para pemangku-kepentingan pembangunan untuk membahas rancangan visi, misi dan arah pembangunan yang telah disusun, dibawah koordinasi Kepala Bappeda. Tujuannya adalah untuk mendapatkan komitmen para pemangku-kepentingan pembangunan yang menjadi bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan RPJP Daerah.

3. Penyusunan rancangan akhir RPJP Daerah

Penyusunan rancangan akhir RPJP Daerah merupakan tanggung jawab Kepala Bappeda, dengan bahan masukan utama hasil kesepakatan Musrenbang Jangka Panjang Daerah. Rancangan akhir ini disampaikan kepada Kepala Daerah, dan selanjutnya diproses untuk ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

4. Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah

Untuk memenuhi perundang-undangan yang berlaku, maka RPJP Daerah provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah selambatnya 3 (tiga) bulan setelah penetapan RPJP Nasional. Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah kabupaten/kota dilakukan, selambatnya 3 (tiga) bulan setelah penetapan RPJP Daerah provinsi. Dengan demikian RPJP Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah.

Sebelum RPJP Daerah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut

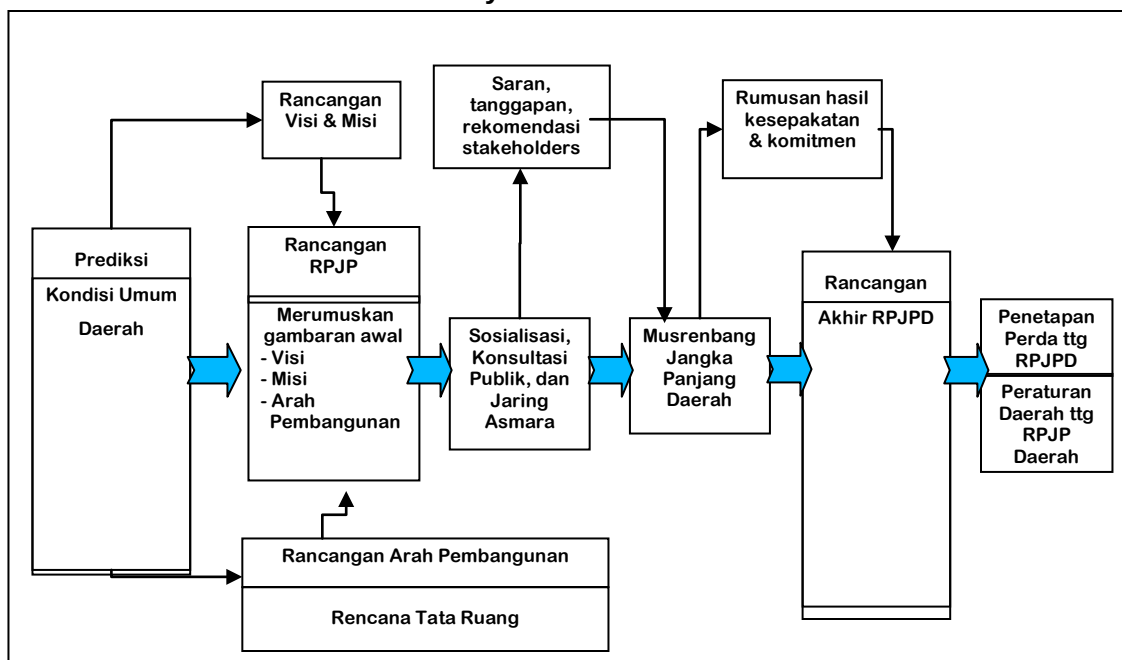
Tahapan akhir penyusunan RPJP-D ditandai dengan penetapan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah

1. Melakukan konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri cq Ditjen Bina Pembangunan Daerah untuk RPJP Daerah Provinsi
2. Melakukan konsultasi dengan Gubernur cq Bappeda Provinsi untuk RPJP Daerah kabupaten/kota

Dalam bentuk diagram, proses penyusunan dokumen RPJP Daerah tersebut dapat ditunjukkan pada **Gambar 1.2** berikut ini:

Sebelum ditetapkan melalui Perda, pihak Pemerintahan Kota wajib berkonsultasi dengan Mendagri dan Gubernur

Gambar 1.2
Tata Cara Penyusunan RPJP Daerah



Dalam studi ini, tim bekerja sama dengan pihak Bappeda Kota Pangkalpinang akan berusaha membuat suatu dokumen rancangan RPJP-D Kota Pangkalpinang dalam bentuk Naskah Akademis. Rancangan ini lah yang akan dimajukan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat. Setelah disesuaikan dengan aspirasi yang berkembang serta dibahas dalam Musrenbang Jangka Panjang Daerah, akan diformulasikan dalam bentuk penetapan Perda mengenai RPJP-D Kota Pangkalpinang.

Tahapan awal dari penyusunan rancangan awal RPJP-D diawali dengan studi naskah akademis dengan meminta masukan dari masyarakat

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan RPJP Daerah Kota Pangkalpinang ini tidak terlepas dari tujuan sistem perencanaan secara keseluruhan. Menurut UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 2 Ayat 4 diketahui bahwa tujuan penyusunan sistem perencanaan adalah:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan

Dengan demikian secara otomatis tujuan pembuatan RPJP-D ini akan sejalan dengan tujuan penyusunan dokumen itu sendiri. Secara spesifik tujuan penelitian adalah:

1. Menggali potensi strategis Kota Pangkalpinang baik dari sisi internal (Kekuatan/strength/S, Kelemahan/weakness/W) dan eksternal (Kesempatan/opportunity/O dan Ancaman/Threat/T)
2. Menerjemahkan seluruh faktor strategi tersebut ke dalam rumusan strategi, prioritas pembangunan dan arah kebijakan pembangunan dengan melibatkan *stakeholder* (Pemerintah Kota

Penyusunan RPJP-D ini memiliki tujuan umum dan tujuan spesifik

Pangkalpinang, DPRD dan beberapa ahli yang mengenal betul pembangunan Kota Pangkalpinang)

3. Mendefinisikan Visi dan menemukan Misi berdasarkan hasil kajian terhadap faktor internal dan eksternal pembangunan Kota Pangkalpinang
4. Membuat ilustrasi visioner Kota Pangkalpinang dalam 20 tahun mendatang dengan pendekatan historis dan proyeksi. Analisis makroekonomi merupakan salah satu gambaran yang akan digunakan
5. Mengajak seluruh elemen yang mengenal betul karakter pembangunan Kota Pangkalpinang untuk memikirkan masa depan Kota Pangkalpinang dan mewujudkan impian jangka panjang di 20 tahun mendatang (perencanaan partisipatif dan komprehensif)

Studi ini sendiri difokuskan untuk menyiapkan naskah akademis sebagai rancangan awal dari dokumen RPJP-D Kota Pangkalpinang. Diharapkan, seluruh hasil perencanaan yang tertuang dalam dokumen RPJP-D Kota Pangkalpinang didasari pada pertimbangan ilmiah dan bukan hasil perencanaan yang berisi daftar harapan (*wish list*) yang tidak rasional.

Diharapkan penyusunan RPJP ini memiliki dasar pertimbangan ilmiah dan bukan berisi daftar harapan belaka.

1.3. LANDASAN HUKUM DAN HUBUNGAN RPJP-D DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Di dalam UU No. 25 tahun 2004 yang merupakan revisi UU No. 25 tahun 2000 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dijelaskan bahwa Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang merupakan dokumen perencanaan dengan rentang waktu 20 tahun (Pasal 1 ayat 4). Dokumen RPJP

dirancang mulai dari tingkat nasional hingga daerah. Penyusunan dokumen RPJP Nasional mengacu pada UUD 1945 dan Pancasila sementara RPJP Daerah mengacu pada RPJP Nasional (Pasal 5 ayat 1). Namun di dalam Pasal 34 ayat 2 Bab IX Ketentuan Peralihan UU No. 25 tahun 2004 ditegaskan bahwa RPJP Daerah dapat disusun kendati RPJP Nasional belum tersusun. Namun di dalam penyusunan dokumen RPJP-D Kota Pangkalpinang kita dapat mengacu pada dokumen RPJP Nasional karena dokumen tersebut telah selesai disusun. Sesuai dengan amanat UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 5 ayat 1 maka isi dari RPJP Daerah adalah Visi, Misi dan Arah Pembangunan. Rentang waktu ketiga esensi dokumen jangka panjang ini adalah 20 tahun dan berkesinambungan dengan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJM Daerah). Hubungan antara RPJP Daerah dan RPJM Daerah ditegaskan di dalam Pasal 5 ayat 2 yang berbunyi:

RPJP Daerah merupakan dokumen perencanaan 20 tahunan

“RPJM Daerah merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya **berpedoman pada RPJP Daerah** dan **memperhatikan RPJM Nasional** memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif”

Kendati di dalam pasal 34 ayat 3 kembali ditegaskan bahwa RPJM Daerah dapat disusun walaupun RPJP Daerah belum terbentuk namun untuk menjaga kesinambungan antara visi, misi dan arah kebijakan

jangka panjang dengan visi, misi dan program kepala daerah maka sebaiknya RPJM mengacu pada RPJP Daerah. Hal ini penting agar setiap kepala daerah yang pada dasarnya memiliki kebebasan untuk mengembangkan visi dan misi pribadi tetap berfikir dalam satu tujuan jangka panjang yaitu mencapai visi dan misi daerah. Kesesuaian dan kesinambungan antara visi dan misi daerah yang memiliki periode 20 tahun dan termuat di dalam RPJP Daerah dengan visi dan misi RPJM Daerah yang ditetapkan setiap 5 tahun harus bersifat harmonis. Artinya walaupun setiap kepala daerah berhak menyusun visi, misi, arah kebijakan namun visi dan misi besar yaitu visi dan misi daerah tetap menjadi tujuan utama. Sikap egosentris para kepala daerah harus disesuaikan dengan tujuan besar pembangunan jangka panjang di daerah tersebut. Kepala daerah bisa berganti setiap periode namun kesinambungan pembangunan dapat tetap terjaga.

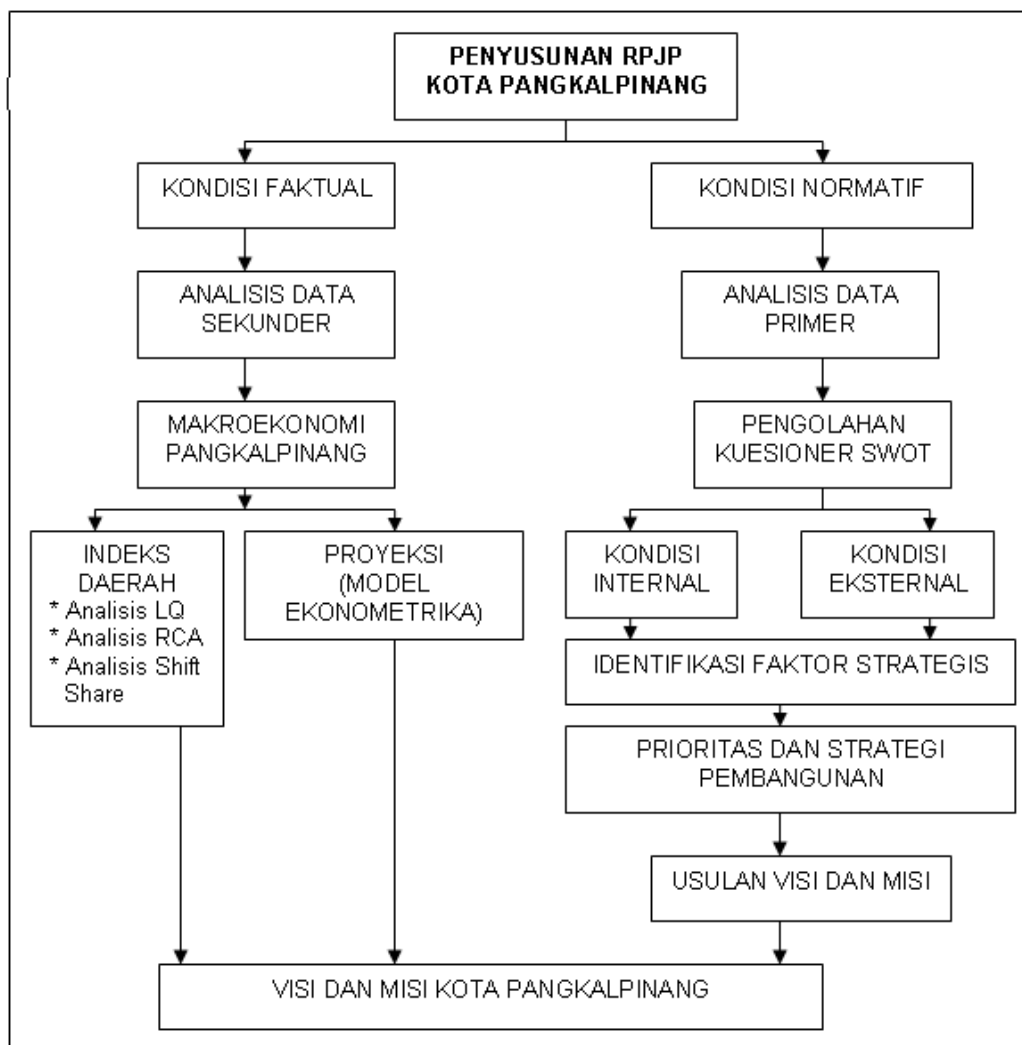
Penyusunan dokumen RPJP-D Kota Pangkalpinang membutuhkan analisis yang komprehensif karena peningkatan kesejahteraan bersifat multidimensional sehingga tidak hanya membicarakan masalah ekonomi namun juga persoalan persepsi politik, hukum, keamanan, kesatuan hingga akhlak dan budaya.

Agar diperoleh analisis komprehensif tentang Kota Pangkalpinang maka diperlukan perangkat alat analisis yang juga komprehensif. Artinya kita tidak hanya menggunakan analisis data sekunder namun juga data primer terutama untuk mendapatkan persepsi. Proses penyusunan dokumen RPJP-D Kota Pangkalpinang tersebut secara sistematis dapat ditunjukkan pada **Gambar 1.3** berikut ini:

RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan lima tahun dan penyusunannya harus merujuk pada RPJP Daerah

Penyusunan RPJP-D Kota Pangkalpinang menggunakan analisis yang komprehensif mengingat peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan sesuatu yang multidimensional.

Gambar 1.3
Skema Penyusunan RPJP-D Kota Pangkalpinang, 2007 - 2026



Visi dan misi merupakan output akhir yang diharapkan mampu menggambarkan kondisi aktual dan faktual dari Kota Pangkalpinang sekaligus mencerminkan keinginan dan harapan masyarakat secara luas. Dengan menggunakan analisis terhadap data sekunder secara bersamaan dengan metode wawancara kita akan memperoleh gambaran komprehensif tersebut.

Visi dan Misi yang dihasilkan diharapkan dapat menggambarkan kondisi aktual, faktual, dan harapan masyarakat

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika dalam kegiatan penelitian ini akan mengikuti sistematika dokumen RPJP sesuai dengan petunjuk yang telah digariskan oleh Departemen Dalam Negeri RI, yaitu sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. LATAR BELAKANG
- 1.2. MAKSUD DAN TUJUAN
- 1.3. LANDASAN HUKUM DAN HUBUNGAN RPJP DAERAH DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA
- 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II. KONDISI, ANALISIS DAN PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH

- 2.1. KONDISI DAN ANALISIS
 - 2.1.1. Geomorfologi dan Lingkungan Hidup
 - 2.1.2. Demografi
 - 2.1.3. Ekonomi dan Sumber Daya Alam
 - 2.1.4. Sosial Budaya dan Politik
 - 2.1.5. Prasarana dan Sarana
 - 2.1.6. Pemerintahan
 - 2.1.7. Keunggulan Komparatif Daerah
- 2.2. PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH

BAB III. VISI, MISI, ARAH PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENJELASANNYA

- 3.1. Visi
- 3.2. Misi
- 3.3. Arah Pembangunan Daerah
- 3.4. Penjelasan Dasar Akademik Penyusunan Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah

BAB IV. PENUTUP

BAB II

KONDISI, ANALISIS, DAN PREDIKSI KONDISI UMUM KOTA PANGKALPINANG

2.1 KONDISI DAN ANALISIS

Salah satu faktor yang sangat penting dalam proses perencanaan adalah kondisi yang ada saat ini (*current condition*) sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan pada masa depan. Pada bagian ini, akan dijelaskan kondisi dan analisis beberapa aspek dalam pembangunan Kota Pangkalpinang seperti lingkungan hidup, kependudukan (demografi), kondisi ekonomi dan aspek-aspek lainnya. Detail penjelasan kondisi setiap aspek pembangunan dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.1.1 Geomorfologi dan Lingkungan Hidup

Faktor penting pertama dari aspek ini adalah berkaitan dengan iklim Kota Pangkalpinang yang tergolong tropis basah Tipe A dengan curah hujan rata-rata sebanyak 36,6 mm (Sumber: Renstra Kota Pangkalpinang 2004 - 2008). Namun, menurut catatan BPS pada tahun 2004, curah hujan ini bahkan mencapai 186,1 mm serta meningkat pada tahun 2005 yang mencapai 194,4 mm. Faktor iklim ini menjadi meningkat signifikansi karena adanya musim hujan yang akan memperbesar volume curah hujan yang dapat mencapai 410,2 mm (pada bulan Desember 2005) serta morfologi Kota Pangkalpinang yang berbentuk cekung pada pusat kota. Kondisi ini tak jarang mengakibatkan timbulnya genangan air pada bulan-bulan tertentu saat curah hujan relatif sangat tinggi.

Kondisi umum yang ada saat ini menjadi pertimbangan dalam perencanaan pada masa yang akan datang

Selain curah hujan, jumlah hari hujan dalam satu bulan juga mempengaruhi intensitas efek dari curah hujan yang ada. Seperti penjelasan di atas, curah hujan dan jumlah hari hujan dalam satu bulan bervariasi dan bulan Agustus merupakan bulan terkering pada tahun 2004 dengan curah hujan dan jumlah hari hujan dalam satu bulan terendah di Kota Pangkalpinang.

Meskipun demikian, curah hujan pada tahun 2005 mengalami pergeseran pada bulan terkering dan jumlah curah hujannya. Namun, secara rata-rata curah hujan meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Detail data curah hujan dari bulan Januari – Desember tahun 2004 dan 2005 di Kota Pangkalpinang dapat ditunjukkan pada **Tabel 2.1**.

Tabel 2.1
Curah Hujan (mm) dan Jumlah Hari Hujan dalam Satu Bulan di Kota Pangkalpinang Tahun 2004 dan 2005

BULAN	2004		2005	
	CURAH HUJAN	JUMLAH HARI HUJAN	CURAH HUJAN	JUMLAH HARI HUJAN
Januari	185.4	24	228.1	16
Februari	196.9	16	72.2	13
Maret	236.4	25	211.3	18
April	156.8	16	223.0	20
Mei	175.1	24	219.6	15
Juni	66.7	13	155.8	14
Juli	154.1	17	118.6	13
Agustus	2.4	1	155.9	15
September	4.1	6	177.8	11
Oktober	129.2	11	190.5	19
November	151.0	16	398.3	22
Desember	460.2	28	410.2	27
Rata-Rata	186.1	16	194.4	17

Sumber: Pangkalpinang Dalam Angka 2004 dan 2005

Timbulnya genangan air tentunya merupakan suatu permasalahan karena dampak ikutan yang dirasakan akan merugikan masyarakat. Selain akan mengganggu kenyamanan kota, genangan air ini pula akan berpotensi menimbulkan ancaman gangguan

kesehatan, juga akan mempercepat rusaknya infrastruktur seperti jalan raya. Pada masa depan, tantangan perbaikan sistem sanitasi dan pengairan dalam kota menjadi sangat penting seiring dengan perkembangan kegiatan masyarakat khususnya di pusat kota.

Genangan air yang terjadi juga akan semakin memperburuk sistem sanitasi dan pembuangan air kota jika manajemen pembuangan sampah masih kurang sempurna dilakukan. Mengingat, tingginya pertumbuhan jumlah sampah di Kota Pangkalpinang yang mencapai lebih dari 11% pada tahun 2004 dibandingkan tahun 2003. Lebih jauh lagi, tingkat pertumbuhan sampah anorganik menunjukkan angka yang sangat tinggi pada tahun 2004, dimana sampah anorganik ini tidak dapat terurai oleh alam. Secara lengkap, gambaran perkembangan volume sampah sejak tahun 1999 hingga 2004 dapat ditunjukkan pada **Grafik 2.1**.

Penanganan sampah kota perlu mendapatkan perhatian pemerintah mengingat pada jangka panjang pertumbuhan volume sampah ini akan semakin besar seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Banyak kota di Indonesia mengalami permasalahan pelik menyangkut pembuangan sampah, atau secara umum mengenai manajemen pengelolaan sampah. Peningkatan jumlah penduduk dengan keterbatasan lahan permukiman yang ada tentunya akan meningkatkan kepadatan penduduk perkotaan. Merupakan ciri khas perkotaan, tingginya angka kepadatan penduduk mengingat kota merupakan pusat kegiatan perekonomian dan sumber lapangan pekerjaan bagi penduduk di suatu daerah. Ditambah lagi, Pangkalpinang merupakan ibukota dari suatu provinsi

Morfologi kota yang cekung ditambah dengan curah hujan yang tinggi pada bulan tertentu berpotensi menimbulkan genangan air sehingga menimbulkan sejumlah permasalahan

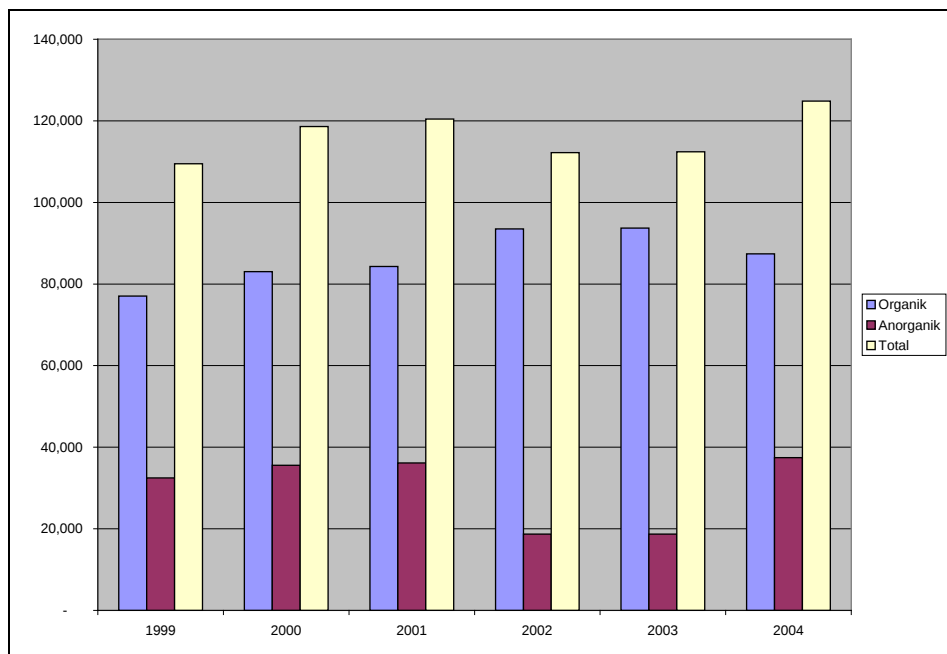
Terjadinya pertumbuhan volume sampah khususnya sampah anorganik

baru yang akan berkembang pada masa depan, yaitu Provinsi Bangka Belitung.

Data menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun terjadi peningkatan kepadatan penduduk di Kota Pangkalpinang. Data terakhir pada tahun 2004 menunjukkan terjadi tingkat pertumbuhan kepadatan penduduk sekitar 3% dibandingkan dengan tahun 2003. Perkembangan kepadatan penduduk tersebut dapat ditunjukkan pada **Grafik 2.2**.

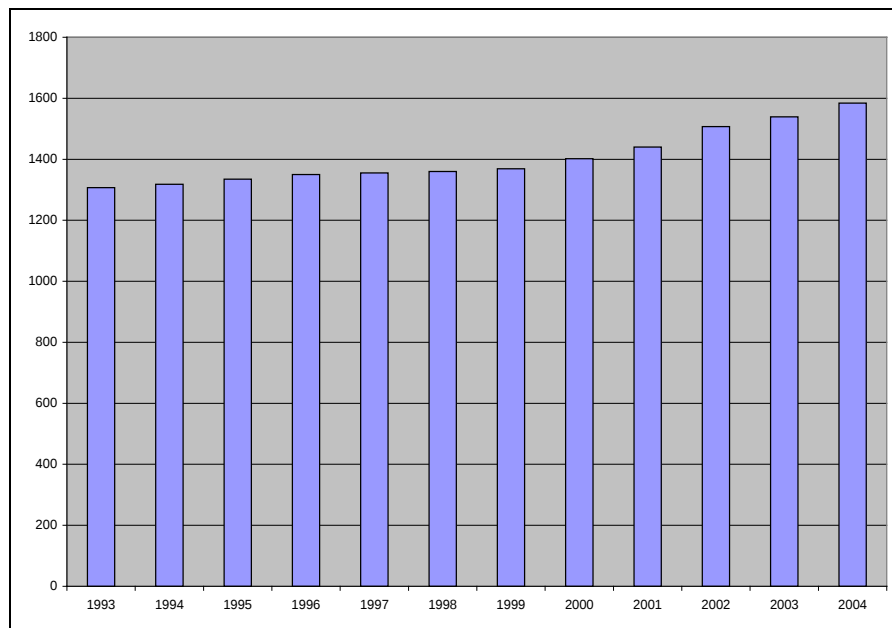
Penanganan sampah menjadi memerlukan perhatian mengingat pertumbuhan volume sampah dan kepadatan penduduk

Grafik 2.1
Perkembangan Volume Sampah Kota Pangkalpinang, 1999 – 2004 (m³)



Sumber: Diolah dari Pangkalpinang Dalam Angka 2004

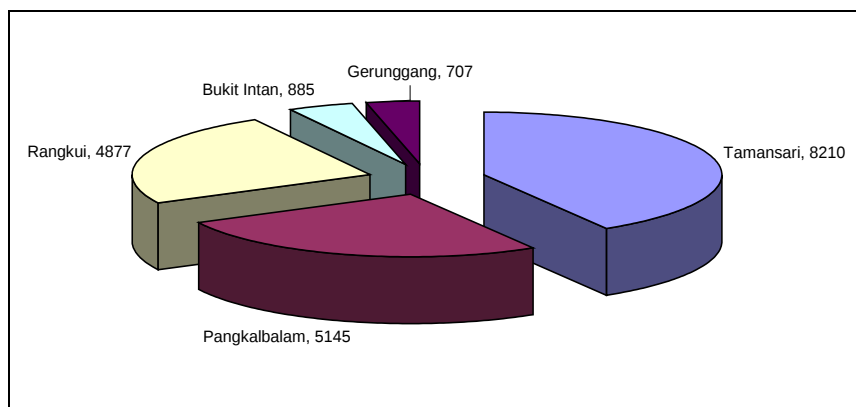
Grafik 2.2
Perkembangan Kepadatan Penduduk Kota Pangkalpinang,
1993 – 2004 (Penduduk per Km²)



Sumber: Diolah dari Pangkalpinang Dalam Angka 2004

Selain terjadinya peningkatan kepadatan penduduk, distribusi jumlah penduduk menurut kecamatan di Kota Pangkalpinang juga relatif tidak merata. Kecamatan seperti kecamatan Tamansari dan Pangkalbalam memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi sedangkan kecamatan Gerunggung merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah di Kota Pangkalpinang. Distribusi kepadatan penduduk menurut kecamatan di Kota Pangkalpinang pada tahun 2004 dapat ditunjukkan pada **Grafik 2.3** berikut ini:

Grafik 2.3
Distribusi Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan di Kota Pangkalpinang, Tahun 2004 (Penduduk per Km²)

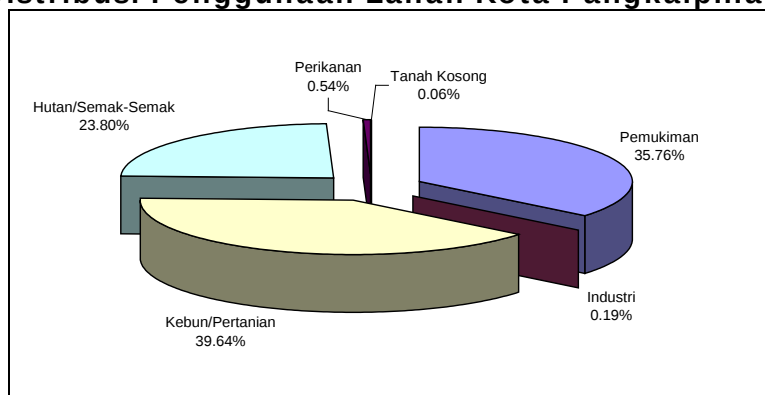


Sumber: Diolah dari Pangkalpinang Dalam Angka 2004

Perkembangan penduduk yang berimplikasi meningkatnya kepadatan penduduk tentunya akan mengubah pola penggunaan lahan. Dari total luas wilayah Kota Pangkalpinang yang mencapai 8.940 Ha, peruntukan terbesar adalah kebun/pertanian dan permukiman dengan porsi tanah kosong yang relatif sangat kecil. Distribusi penggunaan lahan di Kota Pangkalpinang menurut Renstra Kota Pangkalpinang dapat ditunjukkan pada **Grafik 2.4** berikut ini:

Sebaran penduduk Kota Pangkalpinang tidak merata antar kecamatan

Grafik 2.4
Distribusi Penggunaan Lahan Kota Pangkalpinang



Sumber: Diolah dari Renstra Kota Pangkalpinang 2004 -2008

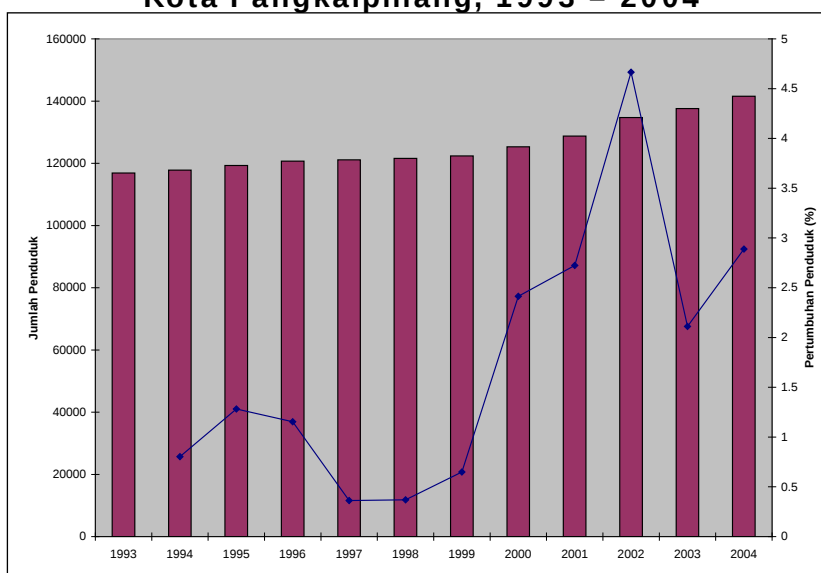
Pada masa depan, seiring dengan pertumbuhan penduduk, diperkirakan proporsi peruntukan lahan untuk permukiman akan mengalami peningkatan secara signifikan.

2.1.2 Demografi (Kependudukan)

Salah satu aspek pembangunan yang juga penting berkaitan dengan aspek kependudukan, yaitu berhubungan dengan perkembangan penduduk dan ketenagakerjaan. Data pada tahun 2004 menunjukkan bahwa Kota Pangkalpinang relatif memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi yaitu sekitar 2,9% dengan jumlah penduduk sebesar 141.556 jiwa. Seiring dengan perkembangan kota, jumlah penduduk diperkirakan akan semakin meningkat serta memberikan kebutuhan pelayanan yang lebih besar lagi dari Pemerintah Kota. Detail perkembangan dan pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Pangkalpinang dapat ditunjukkan pada **Grafik 2.5** berikut ini:

Tingkat pertumbuhan penduduk Kota Pangkalpinang relatif sangat tinggi

Grafik 2.5
Perkembangan dan Pertumbuhan (%) Penduduk Kota Pangkalpinang, 1993 – 2004



Sumber: Hasil Pengolahan Tim LPEM FEUI, 2006

Komposisi penduduk jika didasarkan jenis kelamin relatif berimbang dimana sekitar 50% jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki dan sisanya wanita. Satu hal yang sangat dominan dari profil kependudukan Kota Pangkalpinang adalah tingginya proporsi penduduk usia kerja. Menurut catatan BPS Kota Pangkalpinang, proporsi penduduk yang berusia lebih dari 10 tahun hampir mencapai 81% dari total jumlah penduduk tahun 2004. Tingginya jumlah penduduk usia kerja ini memberikan implikasi pentingnya penyediaan lapangan pekerjaan untuk mengurangi tekanan pengangguran di Kota Pangkalpinang.

Tingginya proporsi penduduk usia kerja di Kota Pangkalpinang

Indikasi tantangan dari adanya pengangguran ini dapat ditunjukkan sedikitnya porsi pencari kerja yang mendapatkan penempatan. Gambaran pendaftaran serta penempatan tenaga kerja dapat ditunjukkan pada **Tabel 2.2** berikut ini:

Tabel 2.2
Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar dan Penempatannya serta Sisa yang Belum Ditempatkan menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, Kota Pangkalpinang Tahun 2004

Tingkat Pendidikan	Sisa Tahun Lalu		Pendaftaran		Penempatan	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
Sekolah Dasar	15	0	2	3	0	1
SLTP	78	57	38	14	5	0
SLTA	3938	3584	2867	3098	52	36
Sarjana Muda	936	1020	582	802	11	8
Sarjana	1634	1528	838	848	20	9
Pascasarjana	9	1	10	10	0	1
TOTAL	6610	6190	4337	4775	88	55

Sumber: Pangkalpinang dalam Angka 2004

Tabel di atas memang masih mengandung sejumlah kelemahan dikarenakan data yang terdaftar sebagian besar diperuntukkan oleh warga untuk memenuhi persyaratan pendaftaran pegawai negeri sipil daerah. Meskipun demikian, sebagai indikasi awal, tabel

Tingginya tekanan pengangguran akibat semakin besarnya lapangan pekerjaan yang harus disediakan

di atas memperlihatkan besarnya tekanan penyediaan lapangan pekerjaan dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ingin bekerja. Pada bagian berikut akan dijelaskan aspek ekonomi dan sumber daya alam di Kota Pangkalpinang.

2.1.3 Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Tak dapat dipungkiri bahwa proses pembangunan bertujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator yang sering digunakan dalam ukuran kesejahteraan ini adalah pendapatan perkapita. Dalam kenyataan, pendapatan perkapita masyarakat diukur dengan banyak proksi salah satunya adalah nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per jumlah penduduk. PDRB sendiri merupakan suatu ukuran aktivitas perekonomian di suatu daerah, yaitu penjumlahan dari produk dan jasa final di suatu daerah.

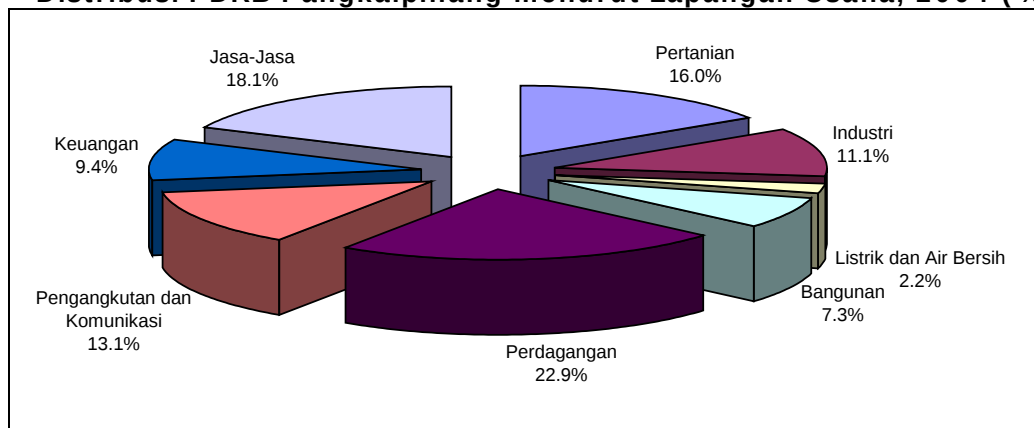
Pengukuran PDRB dilakukan dengan tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi (nilai tambah), pendekatan pengeluaran serta pendekatan pendapatan. Namun untuk kasus Indonesia, tidak dicatat PDRB berdasarkan pendapatan. Untuk kasus Pangkalpinang, seperti halnya kabupaten/kota lain di Indonesia, PDRB hanya dicatat dengan pendekatan produksi. Dengan menggunakan pendekatan ini, maka PDRB dapat didefinisikan sebagai penjumlahan dari nilai tambah bruto seluruh sektor perekonomian di suatu daerah.

Berbeda dengan kabupaten lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di Kota Pangkalpinang tidak terdapat proses penciptaan nilai tambah dari kegiatan pertambangan dan penggalan. Implikasinya hanya terdapat 8 sektor produksi (lapangan usaha) yang memiliki aktivitas berbeda-beda dalam porsi kegiatan

Salah satu indikator kesejahteraan adalah pendapatan perkapita yang ditunjukkan dengan PDRB dibagi jumlah penduduk

perekonomian di Kota Pangkalpinang. Distribusi kegiatan sektoral tersebut dapat ditunjukkan pada **Grafik 2.6** berikut ini:

Grafik 2.6
Distribusi PDRB Pangkalpinang menurut Lapangan Usaha, 2004 (%)



Sumber: Hasil Pengolahan Tim LPEM FEUI, 2006

Grafik di atas memperlihatkan bahwa lapangan usaha Perdagangan, Hotel dan Restoran merupakan sektor yang memiliki proporsi terbesar dalam kegiatan perekonomian Kota Pangkalpinang, yaitu sekitar 22,9% pada tahun 2004. Kegiatan sektor ini kemudian diikuti oleh sektor jasa-jasa dan sektor pertanian yang memiliki peranan dominan kedua dan ketiga terbesar dalam perekonomian Kota Pangkalpinang. Meskipun demikian, setiap sektor memiliki nilai sub lapangan usaha sehingga proses penentuan sektor prioritas dalam ukuran yang detail perlu memperhatikan nilai tambah bruto setiap sub lapangan usaha. Detail perkembangan distribusi kegiatan ekonomi Kota Pangkalpinang ini dapat ditunjukkan pada **Tabel 2.3** di bawah ini:

Sektor perdagangan merupakan sektor terbesar dalam aktivitas perekonomian Kota Pangkalpinang

Tabel 2.3 tersebut menunjukkan bahwa peranan sektor pertanian dalam periode 5 tahun terakhir menunjukkan gejala penurunan sumbangan terhadap perekonomian Kota Pangkalpinang. Kondisi ini mendukung teori tentang transformasi struktural dimana

dengan terjadinya perkembangan perekonomian diikuti dengan ciri penurunan kontribusi sektor pertanian. Karena sifat dari sektor pertanian yang merupakan sektor primer, gejala penurunan ini pun diikuti dengan konversi lahan pertanian yang berubah peruntukannya misalnya untuk perumahan dan perkantoran.

Selain itu, sumbangan sektor industri terhadap perkembangan perekonomian Kota Pangkalpinang relatif meningkat sejak periode 2002 – 2004. Peningkatan kontribusi sektor industri menjadi penting mengingat sektor industri akan memberikan *multiplier* dalam perekonomian yang cukup besar termasuk pada sektor tersier yang merupakan perekonomian perkotaan. Kota Pangkalpinang juga memperlihatkan peningkatan porsi kegiatan sektor tersier seperti sektor perdagangan dan subsektor komunikasi. Detail perkembangan dalam lima tahun terakhir berkaitan dengan distribusi PDRB Kota Pangkalpinang menurut lapangan usaha.

Kontribusi sektor pertanian mengalami penurunan sedangkan sektor industri menunjukkan peningkatan

Perkembangan distribusi kegiatan sektoral ini tentunya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kota Pangkalpinang, yang selanjutnya akan mempengaruhi pertumbuhan pendapatan perkapita masyarakat yang merupakan salah satu indikasi dari tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Kota Pangkalpinang secara rata-rata pada tahun 2001 – 2004 memperlihatkan pertumbuhan yang sangat tinggi, yaitu sekitar 6,18% jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan Provinsi Bangka Belitung dan Indonesia. Namun, pada tahun 2004, tingkat pertumbuhan Kota Pangkalpinang memperlihatkan tingkat pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional.

Tabel 2.3
Distribusi Kegiatan Perekonomian Pangkalpinang,
2000 – 2004 (%)

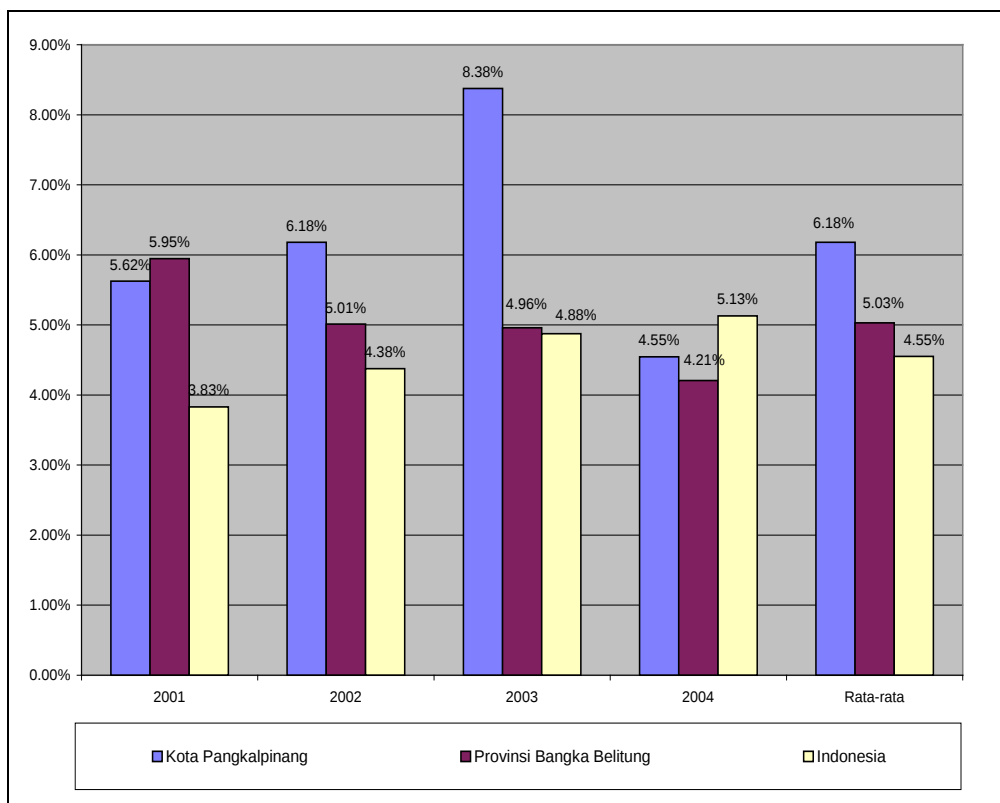
LAPANGAN USAHA	2000	2001	2002	2003	2004
1. PERTANIAN	21.63%	20.27%	18.33%	16.82%	15.96%
a. Tanaman Bahan Makanan	1.02%	0.92%	0.85%	0.71%	0.69%
b. Tanaman Perkebunan	0.10%	0.06%	0.06%	0.05%	0.04%
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	1.07%	1.02%	0.93%	0.86%	0.81%
d. Perikanan	19.45%	18.27%	16.49%	15.20%	14.41%
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	10.74%	10.07%	8.99%	10.81%	11.10%
a. Industri Migas	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
b. Industri tanpa Migas	10.74%	10.07%	8.99%	10.81%	11.10%
1. Makanan, Minuman dan Tembakau	5.84%	5.57%	5.09%	4.76%	4.61%
2. Tekstil, Brg. Kulit & Alas Kaki	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%
3. Brg. Kayu & Hasil Hutan lainnya	3.54%	3.21%	2.75%	2.57%	2.54%
4. Kertas dan Barang Cetak	0.04%	0.04%	0.04%	0.05%	0.05%
5. Pupuk, Kimia & Brg. dari Karet	0.04%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%
6. Semen & Brg. Galian bukan logam	0.25%	0.25%	0.23%	0.21%	0.20%
7. Logam Dasar Besi & Baja	0.00%	0.00%	0.00%	2.45%	2.96%
8. Alat Angk., Mesin & Peralatannya	1.02%	0.93%	0.82%	0.72%	0.67%
9. Barang Lainnya	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	1.30%	1.49%	1.77%	2.03%	2.15%
a. Listrik	1.16%	1.36%	1.66%	1.94%	2.06%
b. Air Bersih	0.14%	0.13%	0.11%	0.10%	0.09%
5. BANGUNAN	7.71%	7.40%	7.09%	7.07%	7.28%
6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN	21.19%	21.61%	21.58%	21.98%	22.93%
a. Perdagangan Besar & Eceran	18.70%	18.83%	18.96%	19.61%	20.63%
b. Hotel	0.37%	0.37%	0.35%	0.33%	0.32%
c. Restoran	2.12%	2.41%	2.27%	2.04%	1.98%
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	12.42%	14.01%	14.60%	13.31%	13.14%
a. Pengangkutan	11.06%	12.43%	12.76%	11.26%	10.81%
1. Angkutan Jalan Raya	9.63%	10.92%	11.35%	10.22%	9.80%
2. Angkutan Laut	0.64%	0.65%	0.64%	0.48%	0.47%
3. Angk. Sungai, Danau & Penyebr.	0.46%	0.53%	0.48%	0.30%	0.28%
4. Jasa Penunjang Angkutan	0.33%	0.32%	0.30%	0.26%	0.26%
b. Komunikasi	1.36%	1.58%	1.84%	2.05%	2.34%
1. Pos dan Telekomunikasi	1.29%	1.48%	1.72%	1.94%	2.22%
2. Jasa Penunjang Komunikasi	0.07%	0.10%	0.12%	0.11%	0.11%
8. KEU. PERSEWAAN, & JASA PERUSAHAAN	10.65%	10.38%	10.07%	9.60%	9.36%
a. Bank	1.37%	1.08%	1.13%	1.07%	1.07%
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	0.57%	0.58%	0.53%	0.49%	0.48%
c. Jasa Penunjang Keuangan	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
d. Sewa Bangunan	8.31%	8.32%	8.07%	7.70%	7.49%
e. Jasa Perusahaan	0.40%	0.39%	0.38%	0.34%	0.33%
9. JASA-JASA	14.35%	14.78%	17.53%	18.38%	18.08%
a. Pemerintahan Umum	6.09%	6.59%	9.41%	10.49%	10.17%
1. Adm. Pemerintah & Pertahanan	6.09%	6.59%	9.41%	10.49%	10.17%
2. Jasa Pemerintah Lainnya	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
b. Swasta	8.26%	8.19%	8.12%	7.89%	7.91%
1. Sosial Kemasyarakatan	2.47%	2.54%	2.34%	2.17%	2.14%
2. Hiburan & Rekreasi	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.03%
3. Perorangan & Rumah tangga	5.76%	5.62%	5.76%	5.69%	5.74%
TOTAL	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Sumber: Hasil Pengolahan Tim LPEM FEUI, 2006

Gambaran tingkat pertumbuhan Kota Pangkalpinang dibandingkan dengan Provinsi Bangka Belitung dan Indonesia dapat ditunjukkan pada **Grafik 2.7** berikut ini:

Secara rata-rata, tingkat pertumbuhan ekonomi Pangkalpinang lebih tinggi dibandingkan dengan perekonomian Provinsi Bangka Belitung dan nasional

Grafik 2.7
Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung dan Indonesia, 2001 – 2004 (%)



Sumber: Hasil Pengolahan Tim LPEM FEUI, 2006

Pertumbuhan ekonomi dan distribusi kegiatan sektoral di atas juga memberikan implikasi bahwa setiap

sektor perekonomian memiliki tingkat pertumbuhan yang berbeda-beda. **Tabel 2.4** di bawah ini akan memperlihatkan tingkat pertumbuhan sektor perekonomian di Kota Pangkalpinang. Tabel tersebut memperlihatkan bahwa sektor industri memiliki tingkat pertumbuhan tertinggi dibandingkan dengan sektor lainnya pada tahun 2004. Selain itu, sektor pertanian merupakan sektor dengan tingkat pertumbuhan terendah, ditambah lagi subsektor tanaman bahan makanan dan perkebunan memiliki pertumbuhan negatif.

Tingkat industri memiliki tingkat pertumbuhan sektoral tertinggi

Selain perkembangan perekonomian, ukuran kesejahteraan masyarakat tidak hanya pendapatan perkapita. Banyak aspek yang merupakan bagian dari ukuran kesejahteraan tersebut salah satunya adalah aspek sosial, budaya dan politik seperti yang dijelaskan berikut ini.

2.1.4 Sosial, Budaya dan Politik

Salah satu tanggung jawab pemerintah yang sangat penting dalam proses pembangunan sosial adalah pendidikan. Dalam kasus otonomi daerah di Indonesia, tanggung jawab pemerintahan daerah bidang pendidikan ini difokuskan pada pendidikan dasar dan menengah. Salah satu faktor yang juga menentukan keberhasilan pembangunan bidang pendidikan di Kota Pangkalpinang adalah ketersediaan fasilitas pendidikan seperti bangunan sekolah, ruang kelas, jumlah guru serta indikator kelayakan proses pendidikan salah satunya ditunjukkan dengan rasio jumlah murid terhadap 1 orang guru. Gambaran tentang perkembangan sarana pendidikan di Kota Pangkalpinang dapat ditunjukkan pada **Tabel 2.5**.

Ketersediaan fasilitas pendidikan serta indikator kelayakan pendidikan adalah faktor kunci yang menentukan keberhasilan pendidikan di Kota Pangkalpinang

Tabel 2.4
Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kota Pangkalpinang menurut Lapangan Usaha, 2001 – 2004 (%)

LAPANGAN USAHA	2001	2002	2003	2004
1. PERTANIAN	5.99%	1.35%	2.54%	1.37%
a. Tanaman Bahan Makanan	-2.95%	1.61%	-4.47%	-1.00%
b. Tanaman Perkebunan	-6.78%	0.81%	0.00%	-1.60%
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	2.38%	3.23%	3.53%	3.18%
d. Perikanan	6.72%	1.24%	2.84%	1.39%
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	-	-	-	-
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	3.17%	3.36%	30.02%	8.84%
a. Industri Migas	-	-	-	-
b. Industri tanpa Migas	3.17%	3.36%	30.02%	8.84%
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	7.18%	5.48%	6.28%	6.59%
a. Listrik	7.57%	6.51%	6.92%	7.04%
b. Air Bersih	3.97%	-3.30%	0.21%	2.02%
5. BANGUNAN	6.90%	7.87%	7.45%	7.71%
6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN	6.01%	4.33%	3.02%	3.42%
a. Perdagangan Besar & Eceran	4.97%	3.82%	3.19%	3.55%
b. Hotel	7.02%	6.22%	5.68%	5.67%
c. Restoran	15.05%	8.15%	1.32%	1.98%
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	2.26%	3.59%	3.14%	3.24%
a. Pengangkutan	1.21%	2.97%	2.41%	2.40%
1. Angkutan Rel	-	-	-	-
2. Angkutan Jalan Raya	0.06%	3.00%	3.31%	2.73%
3. Angkutan Laut	5.59%	6.57%	2.54%	2.05%
4. Angk. Sungai, Danau & Penyebr.	19.76%	-2.27%	-13.81%	-3.96%
5. Angkutan Udara	-	-	-	-
6. Jasa Penunjang Angkutan	0.68%	3.35%	1.54%	1.90%
b. Komunikasi	10.71%	8.17%	8.29%	8.80%
1. Pos dan Telekomunikasi	8.93%	7.41%	8.28%	8.85%
2. Jasa Penunjang Komunikasi	42.27%	18.41%	8.45%	8.24%
8. KEU. PERSEWAAN, & JASA PERUSAHAAN	5.77%	5.77%	5.27%	5.21%
a. Bank	-2.70%	4.97%	3.87%	3.87%
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	9.92%	0.60%	1.75%	0.09%
c. Jasa Penunjang Keuangan	-	-	-	-
d. Sewa Bangunan	7.00%	6.33%	5.67%	5.73%
e. Jasa Perusahaan	3.47%	4.32%	6.29%	5.13%
9. JASA-JASA	8.33%	19.56%	15.39%	5.24%
a. Pemerintahan Umum	13.26%	38.01%	26.16%	5.74%
1. Adm. Pemerintah & Pertahanan	13.26%	38.01%	26.16%	5.74%
2. Jasa Pemerintah Lainnya	-	-	-	-
b. Swasta	4.68%	4.84%	4.08%	4.61%
1. Sosial Kemasyarakatan	9.53%	6.38%	5.34%	6.73%
2. Hiburan & Rekreasi	11.26%	5.95%	6.74%	7.37%
3. Perorangan & Rumah tangga	2.58%	4.13%	3.48%	3.58%
Pertumbuhan Ekonomi	5.62%	6.18%	8.38%	4.55%

Sumber: Hasil Pengolahan Tim LPEM FEUI, 2006

Tabel 2.5
Jumlah Sekolah, Guru, Murid dan Rasio Murid terhadap Jumlah Guru
Kota Pangkalpinang Tahun 2004

Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah		Jumlah Guru		Jumlah Murid		Rasio Murid thd Guru	
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
Sekolah Dasar	68	12	773	113	13568	3305	17.55	29.25
SLTP	10	11	274	152	5730	2285	20.91	15.03
Sekolah Menengah Umum	4	8	158	181	2634	2700	16.67	14.92
Sekolah Menengah Kejuruan	4	7	194	192	2409	2570	12.42	13.39
Total	86	38	1399	638	24341	10860	17.40	17.02

Sumber: Diolah dari Pangkalpinang dalam Angka, 2004

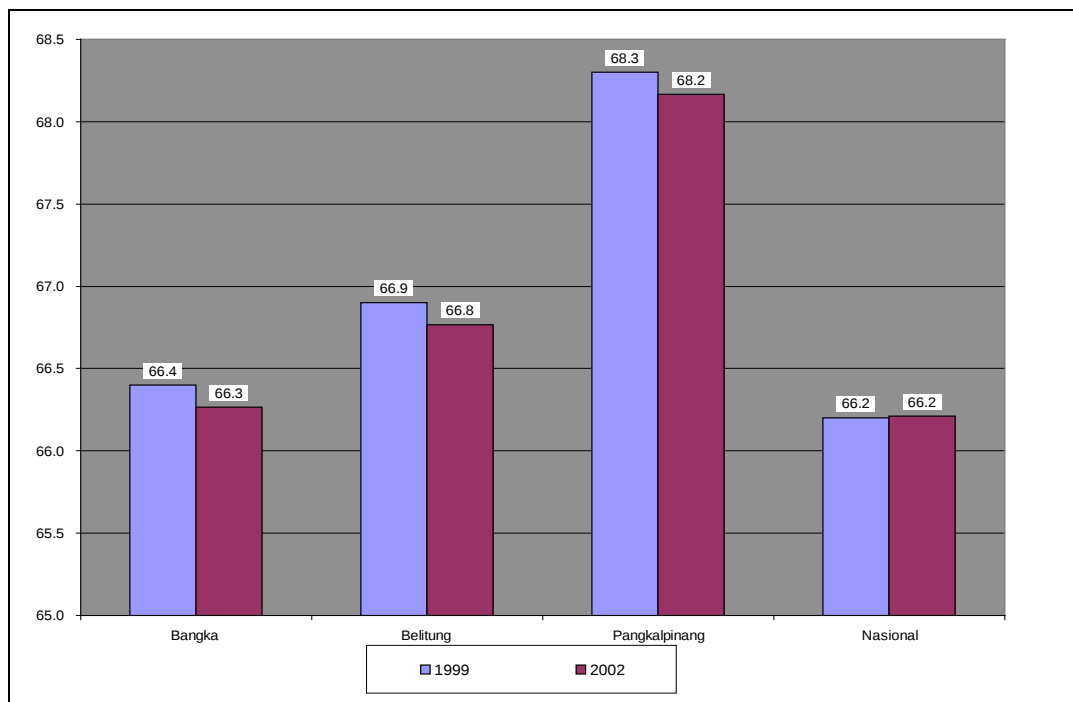
Tabel di atas menginformasikan relatif baiknya pelayanan bidang pendidikan di Kota Pangkalpinang. Hal ini terlihat dari rasio jumlah murid terhadap jumlah guru yang relatif kecil sehingga proses belajar dan mengajar dapat dilakukan secara efektif. Meskipun demikian, selain faktor kuantitas, faktor kualitas pendidikan hendaknya mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah sehingga generasi muda Kota Pangkalpinang dapat bersaing dengan generasi muda yang berasal dari daerah lain di Indonesia. Selain pendidikan, pembangunan sosial masyarakat yang penting menyangkut bidang kesehatan.

Salah satu indikasi yang dapat digunakan untuk menggambarkan keberhasilan pembangunan sektor kesehatan adalah Usia Harapan Hidup sebagai proksi dari ketahanan hidup (*longevity*). Dengan menggunakan indikator ini, Pangkalpinang relatif memiliki tingkat harapan hidup tertinggi jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Bangka Belitung bahkan jika dibandingkan dengan rata-rata nasional pada tahun 1999 dan 2002. Tambahan lagi, Kota Pangkalpinang menunjukkan gejala perbaikan kinerja kesehatan dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2004, diperkirakan

Selain faktor kuantitas, faktor kualitas pendidikan hendaknya menjadi perhatian pemerintah Kota Pangkalpinang

usia harapan hidup ini meningkat menjadi 69,7. Detail data mengenai usia harapan hidup ini dapat ditunjukkan pada **Grafik 2.8** berikut ini:

Grafik 2.8
Usia Harapan Hidup di Kabupaten Bangka, Belitung dan Kota Pangkalpinang serta Indonesia (Tahun), Periode 1999 dan 2002



Sumber: Laporan Pembangunan Manusia, UNDP, 2005

Gambaran grafik di atas secara umum mewakili relatif bagus nya kinerja pembangunan sektor kesehatan di Kota Pangkalpinang relatif terhadap kabupaten lain di Provinsi Bangka Belitung dan rata-rata nasional. Laporan UNDP misalnya mengindikasikan bahwa angka kematian bayi, angka morbiditas, serta persentase jumlah kelahiran yang ditolong oleh tenaga medis di Kota Pangkalpinang jauh di atas rata-rata nasional pada tahun 2002. Meskipun demikian, indikator lain seperti persentase penduduk dengan keluhan kesehatan serta rata-rata lamanya sakit di Kota Pangkalpinang memberikan kinerja yang relatif lebih buruk

Usia harapan hidup Kota Pangkalpinang relatif lebih tinggi dibandingkan Provinsi Kep. Bangka Belitung dan Indonesia

dibandingkan dengan rata-rata nasional. Fakta ini juga memberikan tuntutan yang lebih besar kepada pemerintah kota untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang bukan hanya pada usaha kuratif (pengobatan) belaka tetapi juga menyentuh aspek kesehatan masyarakat yang bersifat preventif (pencegahan).

Ukuran pembangunan manusia secara keseluruhan dapat dijelaskan dalam bentuk indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM atau HDI (*Human Development Index*) sendiri merupakan indikator yang dikembangkan oleh UNDP yang terdiri dari tiga dimensi, yaitu ketahanan hidup, pencapaian pendidikan serta pendapatan perkapita masyarakat. Untuk kasus Indonesia, hasil survey ini merupakan kerjasama dari UNDP, Bappenas dan BPS serta perguruan tinggi. Nilai IPM Kota Pangkalpinang jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Bangka Belitung dan rata-rata nasional relatif lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan sumber daya manusia di Kota Pangkalpinang relatif lebih baik.

Detail mengenai nilai IPM Kota Pangkalpinang dan komponen perhitungan HDI tersebut dapat ditunjukkan pada **Tabel 2.6** berikut ini:

Pembangunan sumber daya manusia Kota Pangkalpinang relatif lebih baik dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Kep. Bangka Belitung dan nasional yang ditunjukkan dengan nilai IPM

Tabel 2.6
IPM Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung dan Indonesia, Tahun 1999 dan 2002

Daerah	Harapan hidup		Angka melek huruf		Rata-rata lama sekolah		Pengeluaran riil perkapita yang disesuaikan		IPM		Peringkat IPM	
	1999	2002	1999	2002	1999	2002	1999	2002	1999	2002	1999	2002
Bangka	66.40	66.26	87.67	89.83	5.98	5.85	575.20	588.37	63.50	64.81	171	211
Belitung	66.90	66.77	93.51	94.45	6.68	6.92	579.20	584.18	65.90	66.59	98	156
Pangkalpinang	68.30	68.16	93.38	95.18	7.85	8.81	585.10	593.06	68.00	69.61	58	71
Prov.Bangka												
Belitung		65.58		91.75		6.55		588.19		65.37		20
Nasional	66.20	66.21	88.40	89.55	6.70	7.06	578.80	591.19	64.30	65.83		

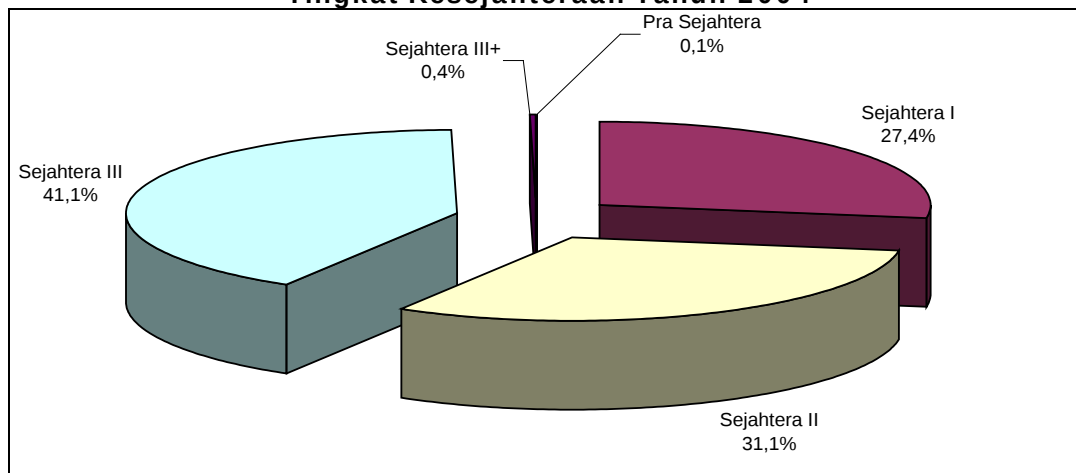
Sumber: Laporan Pembangunan Manusia Indonesia, 2005

Dari tabel di atas terlihat bahwa kinerja pembangunan manusia di Kota Pangkalpinang relatif baik, terlihat dari peringkat yang sangat tinggi nilai IPM Kota Pangkalpinang pada tahun 2002 yaitu peringkat 71 dari 341 Kabupaten/Kota. Jika dibandingkan dengan peringkat tahun 1999 memang mengalami penurunan, namun jumlah kabupaten/kota sebagai sampel pada tahun 1999 juga relatif sedikit yaitu sebanyak 294 Kabupaten/Kota.

Di lihat dari tingkat kesejahteraan keluarga di Kota Pangkalpinang, secara relatif memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Sebagian besar keluarga di Kota Pangkalpinang dikategorikan sebagai keluarga Sejahtera III. Distribusi keluarga di Kota Pangkalpinang menurut klasifikasi tingkat kesejahteraannya berdasarkan data BKKBN Kota Pangkalpinang dapat ditunjukkan pada **Gambar 2.9** berikut ini:

Pangkalpinang menduduki peringkat 71 dari 341 Kabupaten Kota di Indonesia yang memiliki IPM tertinggi

Gambar 2.9
Distribusi Keluarga di Kota Pangkalpinang berdasarkan Kategori Tingkat Kesejahteraan Tahun 2004



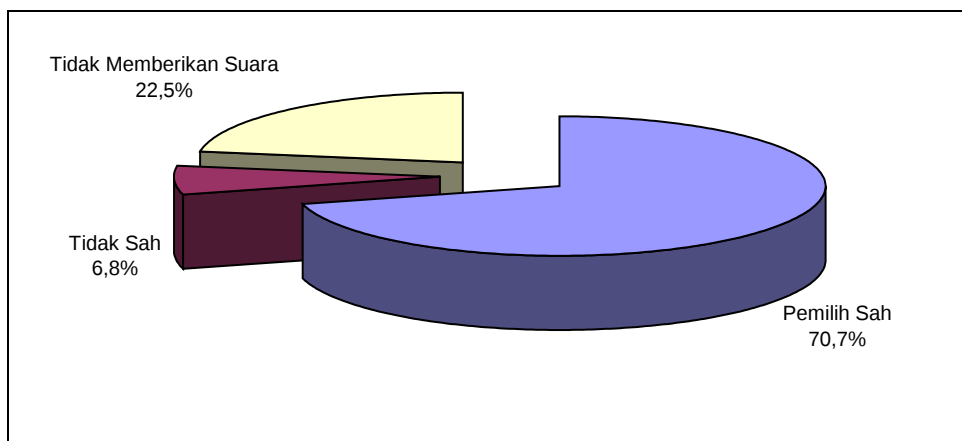
Sumber: Hasil Pengolahan Tim LPEM FEUI, 2006

Berkaitan dengan kehidupan politik di Kota Pangkalpinang, peningkatan kesadaran berpolitik harus

menjadi agenda utama. Kondisi ini dapat diperlihatkan dari indikator masih besarnya pemilih yang tidak memberikan suaranya dalam Pemilu legislatif pada tahun 2004 yang lalu. Sekitar 22,5% dari total pemilih tidak memberikan suaranya pada Pemilu legislatif DPRD Kota Pangkalpinang dan sekitar 6,8% suara tidak sah dalam Pemilu tersebut. Secara lengkap, gambaran indikasi politik yang ditunjukkan oleh distribusi suara dapat ditunjukkan dalam **Gambar 2.10** berikut ini:

Tingkat kesejahteraan masyarakat di Pangkalpinang juga relatif sejahtera dengan porsi sebagian besar rumah tangga pada kategori Sejahtera III

Gambar 2.10
Distribusi Pemilih berdasarkan Partisipasinya dalam Pemilu DPRD Kota Pangkalpinang Tahun 2004

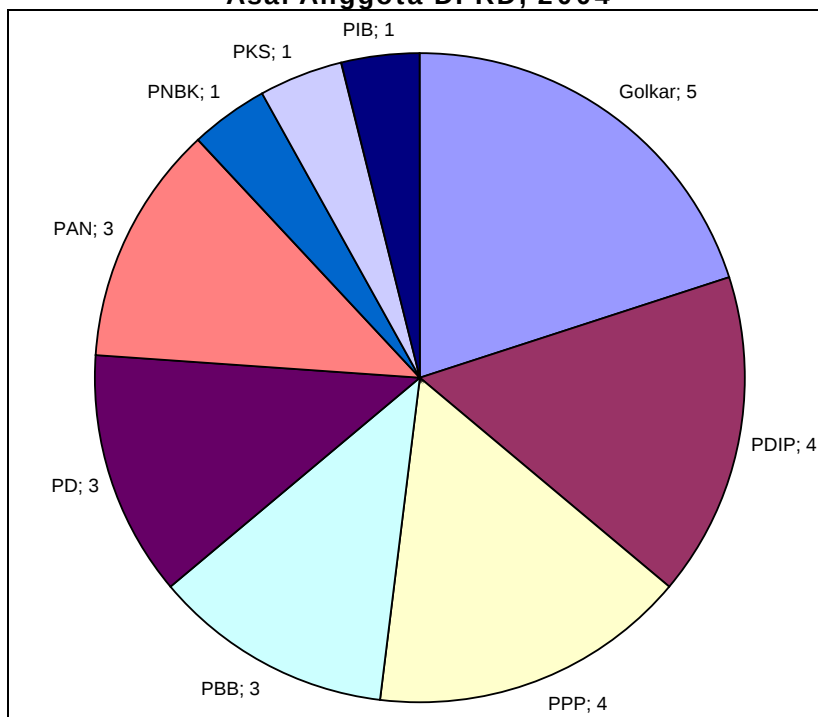


Sumber: Hasil Pengolahan Tim LPEM FEUI, 2006

Meskipun demikian, hasil Pemilu tahun 2004 yang lalu telah memberikan perubahan yang cukup mendasar dalam perkembangan demokratisasi di Indonesia termasuk Kota Pangkalpinang. Hasil Pemilu yang lalu menghasilkan 25 anggota DPRD Kota Pangkalpinang yang berasal dari sejumlah partai. Komposisi anggota DPRD Kota Pangkalpinang berdasarkan asal partai anggota DPRD dapat ditunjukkan pada **Gambar 2.11** berikut ini:

Peningkatan kesadaran berpolitik masyarakat hendaknya menjadi perhatian pemerintah mengingat masih besarnya pemilih yang tidak memberikan suara dalam Pemilu

Gambar 2.11
Komposisi Anggota DPRD Kota Pangkalpinang berdasarkan Partai Asal Anggota DPRD, 2004



Sumber: Pangkalpinang dalam Angka, 2004

Pada bagian berikut ini, akan dijelaskan kondisi umum Kota Pangkalpinang dari aspek Prasarana dan Sarana yang tentunya akan memberikan dukungan bagi perkembangan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Kota Pangkalpinang.

2.1.5 Prasarana dan Sarana

Komponen penting dalam proses pembangunan di suatu daerah sangat ditentukan keberhasilannya oleh ketersediaan prasarana dan sarana daerah. Adanya infrastruktur yang memadai tentunya akan memacu pergerakan aktivitas ekonomi lainnya yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan perekonomian daerah. Salah satu infrastruktur yang sangat penting dalam pembangunan

Komponen penting pembangunan daerah adalah ketersediaan dan kualitas infrastruktur daerah

termasuk Kota Pangkalpinang adalah ketersediaan pasokan listrik.

Data menunjukkan bahwa jumlah pelanggan PLN (Perusahaan Listrik Negara) di Kota Pangkalpinang pada tahun 2004 sejumlah 50.767 pelanggan yang terdiri dari beberapa kategori pelanggan. Jumlah pelanggan ini dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan seiring perkembangan kota yang membutuhkan sumber energi listrik yang lebih besar lagi. Perkembangan jumlah pelanggan PLN di Kota Pangkalpinang secara detail dapat terlihat pada **Tabel 2.7** berikut ini:

Tabel 2.7
Jumlah Pelanggan PLN di Kota Pangkalpinang Tahun 2000 – 2004

Kelompok Tarif	Jumlah Pelanggan				
	2000	2001	2002	2003	2004
1. Sosial	661	692	723	784	818
2. Rumah Tangga	42,699	45,977	47,426	47,382	47,372
3. Usaha/Hotel	1,818	2,111	2,193	2,214	2,235
4. Industri	52	59	56	55	52
5. Gedung	150	155	163	183	208
6. Penerangan Jalan	21	22	42	54	52
JUMLAH	45,401	49,016	50,603	50,672	50,737

Sumber: Pangkalpinang dalam Angka 2004, BPS.

Tabel di atas memperlihatkan bahwa jumlah pelanggan PLN terbesar di Kota Pangkalpinang adalah rumah tangga, yaitu sekitar 93,36% dari total pelanggan. Namun, jumlah pelanggan pada tahun 2004 untuk kategori rumah tangga, industri dan penerangan jalan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2003. Kondisi ini memperlihatkan adanya tuntutan kebutuhan energi yang lebih besar lagi pada masa depan untuk memberikan ketersediaan sumber energi bagi masyarakat serta memacu perkembangan perekonomian Kota.

Indikasi di atas diperkuat dengan semakin meningkatnya VA (Daya) tersambung pada konsumen di Kota Pangkalpinang seperti yang ditunjukkan pada **Tabel 2.8** berikut ini:

Tabel 2.8
VA Tersambung pada Konsumen di Kota Pangkalpinang 2002 – 2004

Kelompok Tarif	VA Tersambung (Daya)		
	2002	2003	2004
1. Sosial	1,074,050	1,257,500	1,366,050
2. Rumah Tangga	36,762,050	37,479,100	38,049,300
3. Usaha/Hotel	8,204,300	8,750,900	9,563,000
4. Industri	3,298,600	3,257,500	3,033,600
5. Gedung	1,040,150	1,247,400	1,619,000
6. Penerangan Jalan	301,575	344,475	490,175
JUMLAH	50,680,725	52,336,875	54,121,125

Sumber: Pangkalpinang dalam Angka 2004, BPS.

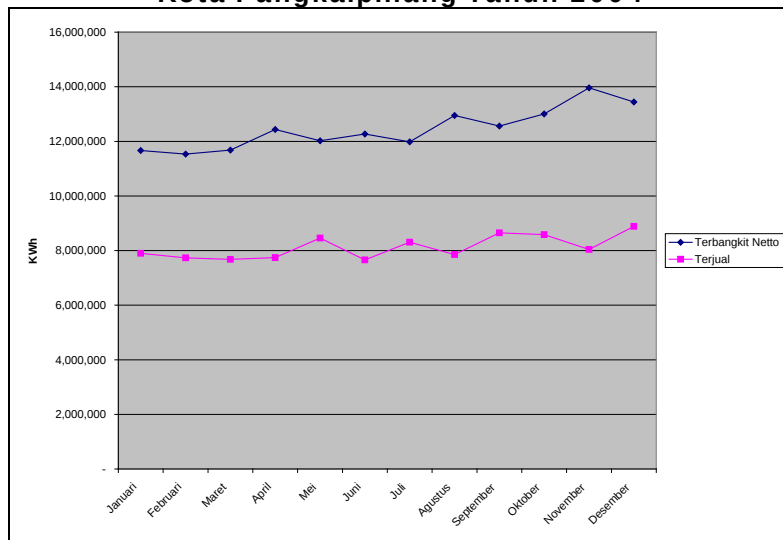
Data di atas memperlihatkan bahwa daya tersambung pada konsumen semakin menunjukkan kecenderungan terjadinya peningkatan dari tahun ke tahun. Jika pemerintah Kota Pangkalpinang ingin lebih meningkatkan kinerja perekonomiannya, tentunya ketersediaan sumber energi listrik yang memadai akan menjadi prasyarat utama.

Kebutuhan akan sumber energi listrik pada masa depan di Kota Pangkalpinang terlihat dari data jumlah KWh yang terbangkit dibandingkan dengan KWh yang terjual pada setiap bulannya. **Gambar 2.12** berikut ini mengindikasikan bahwa perbedaan antara KWh yang terjual dan terbangkit tidak terlalu jauh. Secara rata-rata pada tahun 2004, jumlah KWh yang terjual sekitar 59% dari total KWh yang terbangkit (didistribusikan) ke Kota Pangkalpinang. Jika dibandingkan dengan total KWh terbangkit yang dikurangkan dengan pemakaian sendiri PLN dan nilai KWh yang susut, rasio ini bahkan mencapai 65%. Meskipun demikian, total daya yang tersambung relatif besar sehingga rentan terjadi kekurangan energi jika sumber energi yang ada digunakan secara maksimal.

Adanya peningkatan kebutuhan energi listrik di Kota Pangkalpinang

Rentannya persoalan kekurangan energi listrik di Kota Pangkalpinang

Gambar 2.12
Perkembangan Energi Listrik (KWh) Terjual dan Terbangkit Netto di Kota Pangkalpinang Tahun 2004

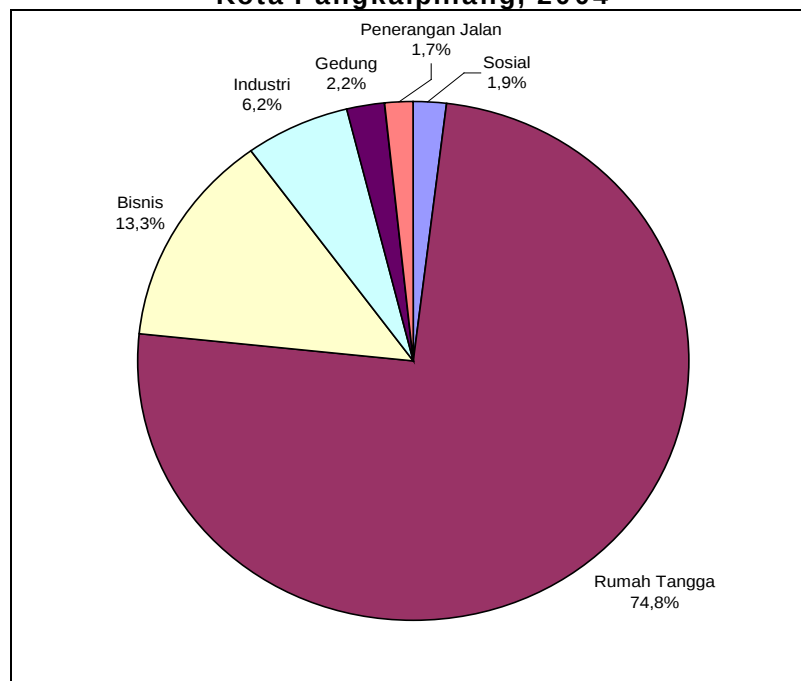


Sumber: Hasil Pengolahan Tim LPEM FEUI, 2006

Terlepas dari hal tersebut, jumlah KWh yang terjual di Kota Pangkalpinang sebagian besar digunakan oleh rumah tangga, yaitu sekitar 75% dari total KWh yang terjual. Implikasinya, jika terjadi pertumbuhan jumlah rumah tangga pada masa depan, kebutuhan akan sumber energi listrik menjadi lebih besar lagi. Selain itu, jika terjadi pertumbuhan kegiatan bisnis, industri, pembangunan fisik gedung dan lain-lain dimungkinkan pula terjadi kebutuhan sumber energi listrik yang lebih besar lagi. **Gambar 2.13** berikut ini akan mengindikasikan sebaran KWh listrik yang terjual berdasarkan jenis pelanggan PLN di Kota Pangkalpinang.

Kebutuhan energi listrik terbesar berasal dari Rumah Tangga

Gambar 2.13
Distribusi KWh Listrik yang Terjual berdasarkan Jenis Pelanggan PLN di Kota Pangkalpinang, 2004

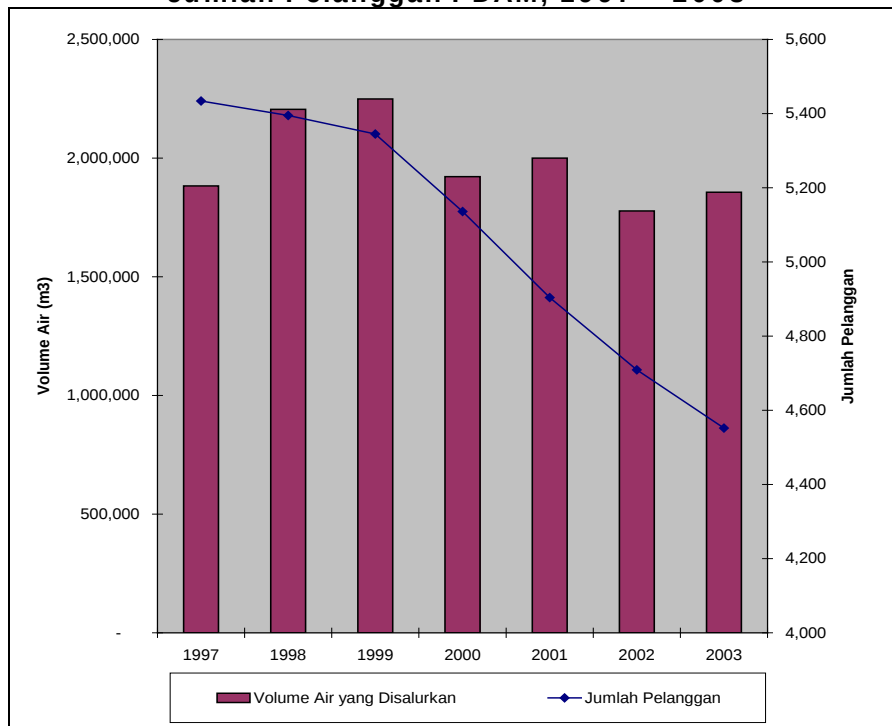


Sumber: Hasil Pengolahan Tim LPEM FEUI, 2006

Selain listrik, penyediaan air bersih juga merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di Kota Pangkalpinang. Satu-satunya BUMD yang memiliki tanggung jawab penyediaan air bersih bagi masyarakat adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Pangkalpinang. Saat ini, terdapat kecenderungan terjadinya penurunan volume jumlah air minum yang didistribusikan serta terjadinya penurunan jumlah pelanggan PDAM. Gambaran perkembangan air minum yang disalurkan serta jumlah pelanggan PDAM dapat ditunjukkan pada **Gambar 2.14** berikut ini:

Adanya penurunan volume air yang didistribusikan oleh PDAM

Gambar 2.14
Perkembangan Volume Air Bersih yang Disalurkan serta
Jumlah Pelanggan PDAM, 1997 – 2003



Sumber: Diolah dari Pangkalpinang dalam Angka, BPS.

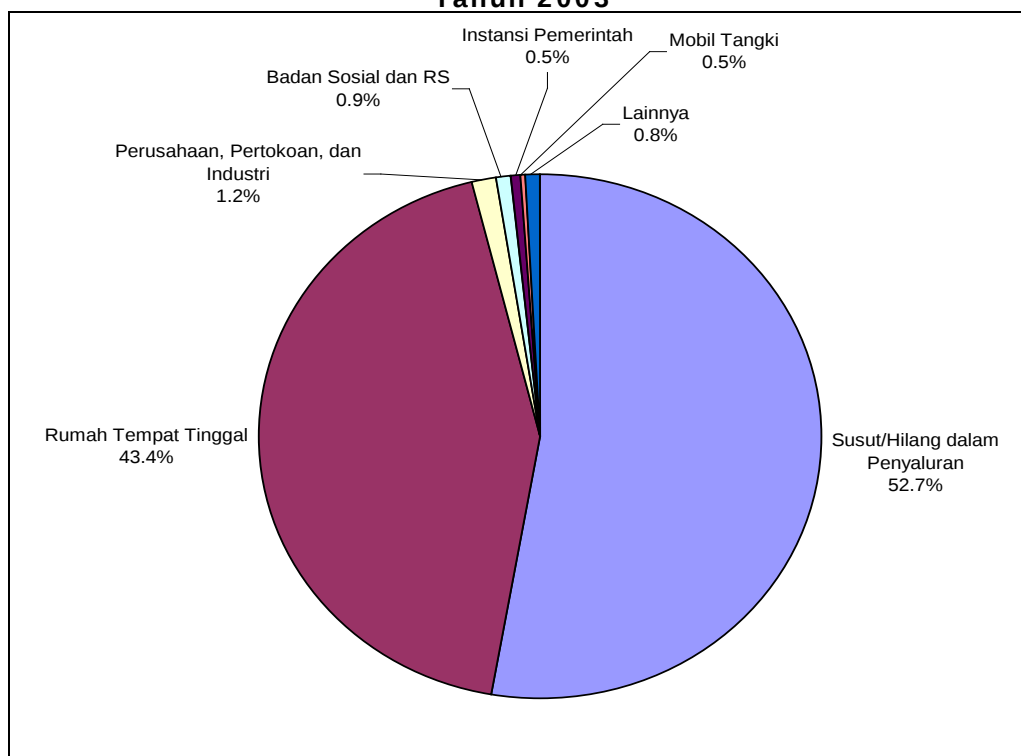
Terdapat sejumlah sumber permasalahan yang menjadi sebab terjadinya penurunan kinerja PDAM ini. Permasalahan tersebut antara lain adanya gangguan dalam sistem distribusi air serta masalah penentuan tarif air minum yang menurut pihak PDAM perlu ditinjau kembali.

Hal ini dapat terlihat pada distribusi volume air yang disalurkan oleh PDAM menunjukkan bahwa 52,7% dari total volume air adalah susut atau hilang dalam penyaluran. Besarnya volume air yang hilang ini tentunya menunjukkan inefisiensi yang sangat besar dalam proses penyaluran atau permasalahan pemeliharaan peralatan distribusi air yang dimiliki oleh PDAM. Porsi volume air yang disalurkan terbesar kedua

disalurkan kepada rumah tempat tinggal yaitu sekitar 43,4%. Meskipun demikian dari sisi jumlah pelanggan, sekitar 94% pelanggan PDAM adalah rumah tangga. Secara lengkap, distribusi volume air yang disalurkan berdasarkan komponennya dapat ditunjukkan pada **Gambar 2.15** berikut ini:

Terdapat persoalan yang serius dalam sistem distribusi air oleh PDAM

Gambar 2.15
Distribusi Volume Air yang Disalurkan berdasarkan Komponennya Tahun 2003



Sumber: Hasil pengolahan tim LPEM FEUI, 2006

Infrastruktur lain yang sangat penting dalam mendukung aktivitas kegiatan perekonomian daerah adalah infrastruktur yang berkaitan dengan sarana transportasi, baik darat, laut dan udara. Salah satu infrastruktur transportasi darat yang signifikan adalah jalan raya. Seiring dengan perkembangan Kota Pangkalpinang, panjang jalan di Kota Pangkalpinang juga memperlihatkan perkembangan positif. Pada tahun 2004, panjang jalan tersebut tumbuh sebesar 9% dibandingkan dengan satu tahun sebelumnya atau sepanjang lebih dari 273 km.

Infrastruktur transportasi darat adalah salah satu hal yang sangat penting

Secara umum, kondisi jalan di Kota Pangkalpinang sudah relatif baik dimana lebih dari 92% kondisi jalan di Kota Pangkalpinang merupakan jalan hotmix dan lapen. Meskipun demikian proporsi jalan batu pecah dan tanah puru masih memiliki porsi yang signifikan. Pada masa depan, tantangan perbaikan kondisi jalan dari kedua jenis jalan ini perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang lebih prima kepada masyarakat. Secara detail, kondisi panjang jalan di Kota Pangkalpinang menurut jenisnya dapat ditunjukkan pada **Tabel 2.9** berikut ini:

Tantangan ke depan, perbaikan serta peningkatan kualitas jalan di Kota Pangkalpinang

Tabel 2.9
Panjang Jalan di Kota Pangkalpinang menurut Jenisnya, 2003 – 2004

No	Jenis Jalan	2003		2004		Pertumbuhan (%)
		Panjang (m)	Proporsi	Panjang (m)	Proporsi	
1	Jalan Hotmix	103,821	41.43%	119,870	43.90%	15.5%
2	Jalan Lapen	136,965	54.66%	131,432	48.13%	-4.0%
3	Jalan Tapyt	6,016	2.40%	2,140	0.78%	-64.4%
4	Jalan Batu Pecah	1,147	0.46%	2,132	0.78%	85.9%
5	Jalan Tanah Puru	2,647	1.06%	17,502	6.41%	561.2%
	TOTAL	250,596	100.00%	273,076	100.00%	9.0%

Sumber: Hasil pengolahan tim LPEM FEUI, 2006

Selain transportasi darat yang didukung dengan infrastruktur jalan raya, sarana dan prasarana transportasi laut melalui Pelabuhan Pangkalbalam merupakan salah satu gerbang utama Kota Pangkalpinang yang akan memberikan daya dukung bagi perkembangan perekonomian dan pembangunan kota.

Data terakhir memperlihatkan bahwa tantangan untuk merevitalisasi peran Pelabuhan Pangkalbalam menjadi penting untuk segera dilakukan. Data memperlihatkan terdapatnya kecenderungan terjadinya penurunan arus kapal, arus barang dan arus penumpang di Pelabuhan Pangkalbalam dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan data aktivitas di Pelabuhan Pangkalbalam dapat ditunjukkan pada **Tabel 2.10** berikut ini:

Pelabuhan Pangkalbalam merupakan salah satu gerbang utama Pangkalpinang yang mendukung perekonomian Kota

Tabel 2.10
Arus Kapal, Barang, dan Penumpang di Pelabuhan Pangkalbalam,
Tahun 2000 – 2003

URAIAN	SATUAN	2000	2001	2002	2003
I. Arus Kapal	Unit	1,810	2,022	1,968	1,600
	Grt	804,722	861,424	1,024,878	966,233
1. Pelayaran Luar Negeri	Unit	158	245	240	174
	Grt	121,541	159,106	172,456	137,528
2. Pelayaran Dalam Negeri	Unit	1,652	1,777	1,728	1,426
	Grt	683,181	702,318	852,422	828,705
II. Arus Barang	Ton	800,628	650,836	627,958	614,231
1. Luar Negeri	Ton	182,996	129,334	153,666	115,040
- Impor	Ton	52,197	65,507	84,331	64,485
- Ekspor	Ton	130,799	63,827	69,335	50,555
2. Dalam Negeri	Ton	617,632	521,502	474,292	499,191
- Bongkar	Ton	134,598	304,220	284,495	351,257
- Muat	Ton	483,034	217,282	189,797	147,934
III. Arus Penumpang	Orang	213,838	202,848	131,004	118,068
1. Naik	Orang	69,760	101,951	64,483	59,722
2. Turun	Orang	144,078	100,897	66,521	58,346

Sumber: Diolah dari Pangkalpinang dalam Angka, BPS

Pada masa depan, kemajuan perekonomian Kota Pangkalpinang tentunya juga sangat ditentukan pada aktivitas kegiatan di Pelabuhan Pangkalbalam. Aktivitas perdagangan, kegiatan industri serta keterkaitan kegiatan perekonomian Kota Pangkalpinang dengan kabupaten-kabupaten lain di Provinsi Bangka Belitung tentunya membutuhkan dukungan sarana dan prasarana vital ini.

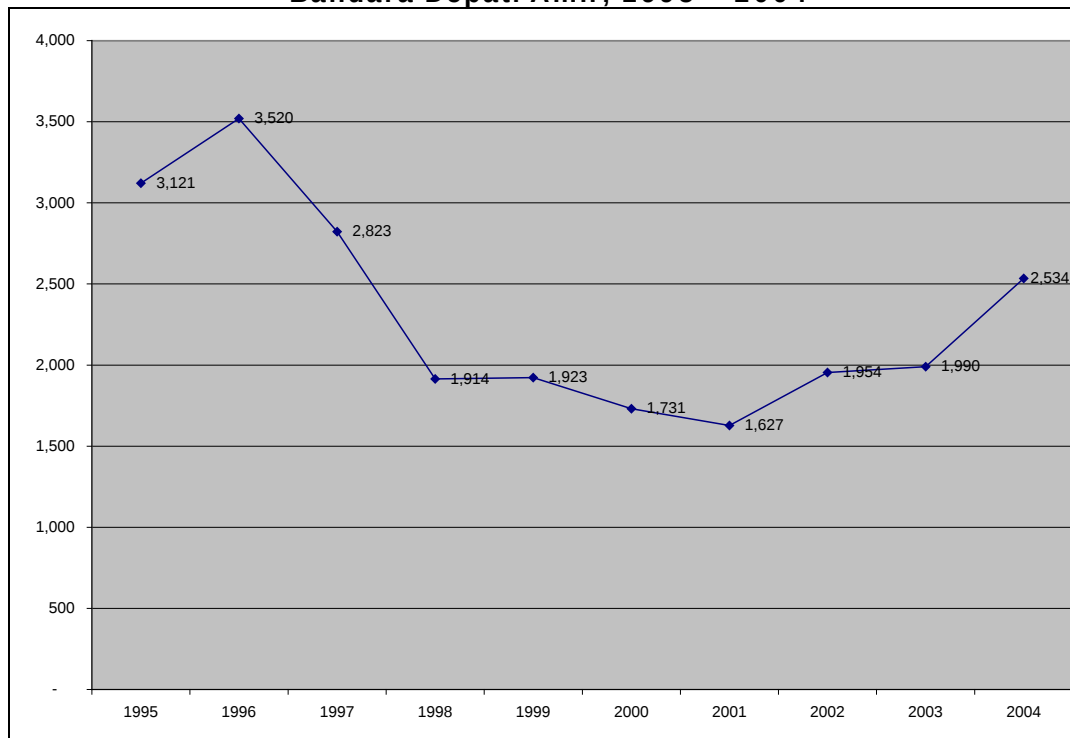
Moda transportasi lain yang juga mendukung perekonomian Kota Pangkalpinang adalah sarana transportasi udara. Meskipun Bandara Depati Amir berada di wilayah administrasi Kabupaten Bangka Tengah, namun gerbang utama yang ditemui oleh para penumpang yang datang adalah Kota Pangkalpinang. Implikasinya, perkembangan aktivitas kegiatan di bandara ini juga akan mempengaruhi perkembangan aktivitas perekonomian di Kota Pangkalpinang.

Data telah menunjukkan bahwa sejak tahun 1996, telah terjadi kecenderungan penurunan jumlah pesawat yang datang dan berangkat dari Bandara Depati Amir serta mencapai kondisi terburuk saat terjadinya krisis ekonomi nasional yang dipicu oleh krisis mata uang. Jumlah pesawat yang tiba di Bandara Depati Amir mencapai angka terendah pada tahun 2001. Adanya era otonomi daerah serta pemekaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentunya memberikan andil geliat aktivitas perekonomian khususnya aktivitas di Bandara Depati Amir. Sejak tahun 2002 – 2004, jumlah pesawat termasuk barang dan penumpang di Bandara Depati Amir mengalami trend peningkatan yang signifikan. Secara lengkap, perkembangan jumlah pesawat yang datang dan berangkat dari Bandara Depati Amir dapat ditunjukkan pada **Gambar 2.16** berikut ini:

Kemajuan
Pangkalpinang pada
masa depan juga
sangat ditentukan
oleh aktivitas
kegiatan di
Pelabuhan
Pangkalbalam

Terjadinya
kecenderungan
peningkatan arus
barang, jumlah
pesawat dan
penumpang di
Bandara Depati Amir

Gambar 2.16
Perkembangan Jumlah Pesawat yang Datang dan Berangkat dari
Bandara Depati Amir, 1995 – 2004



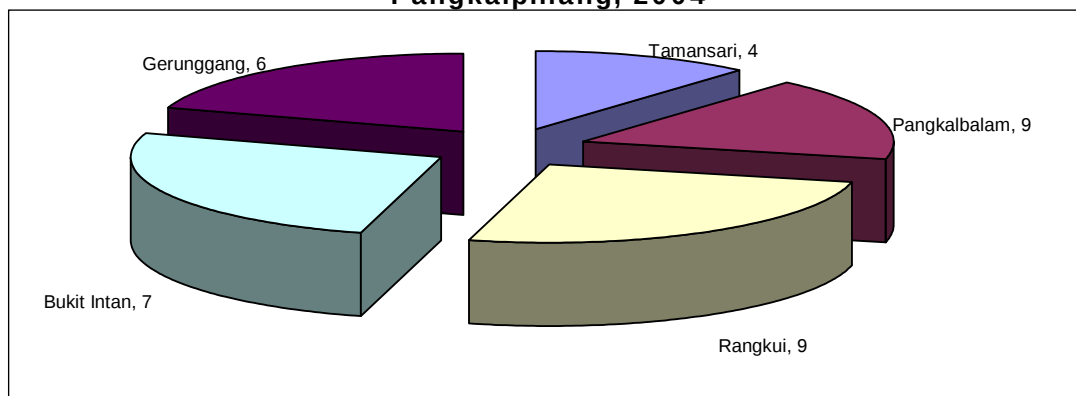
Tantangan perbaikan kualitas sarana dan prasarana bandara tentunya tuntutan masa depan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian Kota Pangkalpinang khususnya, serta Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada umumnya. Karena wilayah bandara bukan merupakan tanggung jawab administrasi pemerintahan kota, maka penting bagi Pemerintah Kota Pangkalpinang bekerja sama dengan pemerintahan daerah yang lain khususnya Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Perbaikan kualitas bandara salah satu tantangan masa depan

2.1.6 Pemerintahan

Kota Pangkalpinang merupakan pemerintah kota otonom dalam tata pemerintahan di Indonesia yang dipimpin oleh seorang Walikota dan dibantu satu orang Wakil Walikota serta Sekretaris Daerah yang dibantu oleh dua orang Asisten. Dengan luas wilayah terkecil di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu sekitar 89,4 km², Kota Pangkalpinang secara administratif wilayahnya terbagi menjadi lima kecamatan dan 35 kelurahan. Detail nama kecamatan dan jumlah kelurahan di setiap kecamatan dapat ditunjukkan pada **Gambar 2.17** berikut ini:

Gambar 2.17
Nama Kecamatan dan Jumlah Kelurahan per Kecamatan di Kota Pangkalpinang, 2004



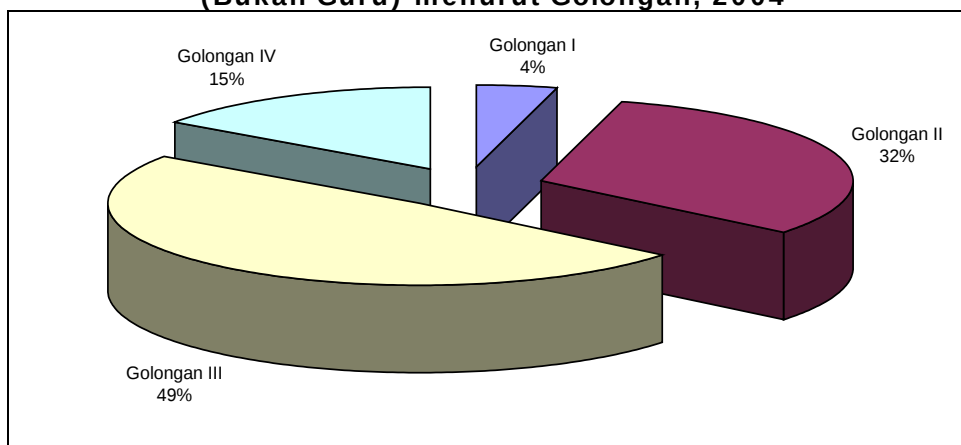
Setiap kecamatan di Kota Pangkalpinang memiliki kepadatan penduduk yang berbeda-beda sehingga kompleksitas permasalahan antar kecamatan pun relatif berbeda. Meskipun demikian, pembangunan kelurahan di Kota Pangkalpinang relatif menunjukkan kinerja pembangunan yang baik, dimana seluruh kelurahan di Kota Pangkalpinang dikategorikan sebagai Kelurahan Swasembada.

Setiap kecamatan memiliki kompleksitas persoalan yang berbeda-beda

Dalam menjalankan fungsi pemerintahannya, Pemerintah Kota Pangkalpinang memiliki 1.380 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah pada tahun 2004 yang tersebar pada unit kerja, dinas-dinas, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT). Selain itu, terdapat 1.298 Pegawai Negeri Sipil yang berstatus guru dibawah naungan Dinas Pendidikan dan Departemen Agama. Dilihat dari distribusi golongan PNS, PNS Golongan III merupakan jumlah PNS terbesar di Pemerintah Kota Pangkalpinang yaitu sekitar 49% dari total PNS Kota Pangkalpinang. Distribusi jumlah PNS Pemerintah Kota Pangkalpinang dapat ditunjukkan pada **Gambar 2.18** berikut ini:

Seluruh kelurahan di Kota Pangkalpinang dikategorisasikan sebagai Kelurahan Swasembada

Gambar 2.18
Distribusi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Pangkalpinang (Bukan Guru) menurut Golongan, 2004



Sumber: Hasil Pengolahan Tim LPEM FEUI

Dengan jumlah PNS tersebut di atas, maka secara rata-rata satu orang PNS Pemerintah Kota Pangkalpinang melayani 103 penduduk. Seiring dengan pertumbuhan penduduk, maka pada masa yang akan

datang, tuntutan pelayanan publik akan menjadi lebih besar pula. Tantangan ini membutuhkan respons dari PNS yang lebih berkualitas lagi. Karenanya, pembinaan dan pendidikan bagi pegawai negeri di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang akan menjadi suatu keharusan.

Selain PNS di lingkungan Kota Pangkalpinang, terdapat juga pegawai pemerintah yang berasal dari BUMD/BUMN. Satu hal yang pasti sejak adanya Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, jumlah PNS Daerah meningkat secara signifikan. Hal ini tentunya meningkatkan lapangan pekerjaan serta akan memberikan efek pengganda (*multiplier effect*) bagi perkembangan Kota Pangkalpinang. Pada bagian berikut ini, tim akan melakukan perhitungan terhadap keunggulan komparatif daerah sebagai salah satu pertimbangan dalam penentuan Visi dan Misi serta Arah Kebijakan Pembangunan Kota Pangkalpinang.

Tuntutan pelayanan publik semakin besar sehingga membutuhkan kualitas PNS yang lebih baik lagi.

2.1.7 Keunggulan Komparatif Daerah

Dalam teori ekonomi regional, terdapat sejumlah metodologi yang digunakan dalam menghitung keunggulan komparatif suatu daerah. Salah satu indikator yang sering digunakan adalah *Location Quotient* (LQ). Indeks LQ secara sederhana merupakan rasio porsi kegiatan suatu sektor di suatu daerah terhadap porsi kegiatan sektor yang sama di daerah yang lebih besar, misalnya Provinsi dan Nasional. Kita dapat merumuskan indeks LQ tersebut dalam bentuk formula sebagai berikut:

$$LQ_i = \frac{\left(\frac{NTB_i^r}{PDRB^r} \right)}{\left(\frac{NTB_i^N}{PDRB^N} \right)}$$

Dimana LQ_i adalah nilai Location Quotient untuk sektor i , NTB_i^r adalah nilai tambah bruto sektor i di daerah r (Kota Pangkalpinang), $PDRB^r$ adalah nilai Produk Domestik Regional Bruto daerah r , dan *superscript N* merujuk pada nasional atau Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Suatu sektor dikatakan sektor basis (sektor unggulan) jika nilai indeks LQ sektor tersebut lebih besar daripada satu, dan disebut sektor non basis jika lebih kecil daripada satu. Hasil perhitungan indeks LQ Kota Pangkalpinang dengan perbandingan nasional, dapat ditunjukkan pada **Tabel 2.11**.

Dari tabel tersebut terlihat bahwa perekonomian Kota Pangkalpinang jika dilihat dalam kategori sektor produksi yang terlalu agregat memperlihatkan keunggulan meskipun hanya terdapat sedikit sub sektor saja yang memperlihatkan keunggulannya. Sebagai ilustrasi, jika dilihat dari sektor pertanian dalam kategori agregat merupakan sektor basis di Kota Pangkalpinang. Padahal, hanya sub sektor perikanan saja yang merupakan sektor basis di Kota Pangkalpinang relatif dibandingkan dengan perekonomian nasional. Berdasarkan temuan di atas, maka yang menjadi analisis sektor unggulan di Kota Pangkalpinang dilakukan pada level sub sektor produksi untuk menghindari kesalahan kategorisasi yang terlalu agregat.

Berdasarkan temuan di atas, seperti halnya ciri perekonomian Kota lainnya di Indonesia, sektor jasa-jasa dan sub sektor perdagangan merupakan sektor unggulan di Kota Pangkalpinang. Sebagai tambahan lagi, sektor bangunan dan sewa bangunan di Kota Pangkalpinang merupakan sektor unggulan seiring

Indeks LQ merupakan indikator untuk mengukur sektor unggulan di suatu daerah

dengan meningkatnya pertumbuhan pembangunan fisik Kota Pangkalpinang.

Tabel 2.11
Perhitungan Indeks LQ Kota Pangkalpinang dengan Perbandingan Nasional, Tahun 2000 – 2004

LAPANGAN USAHA	2002	2003	2004	KETERANGAN
1. PERTANIAN	1.34	1.27	1.25	Basis
a. Tanaman Bahan Makanan	0.12	0.10	0.10	Non Basis
b. Tanaman Perkebunan	0.03	0.03	0.03	Non Basis
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	0.51	0.49	0.49	Non Basis
d. Kehutanan	-	-	-	Non Basis
e. Perikanan	8.53	7.82	7.56	Basis
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	-	-	-	Non Basis
a. Minyak dan Gas Bumi	-	-	-	Non Basis
b. Pertambangan tanpa Migas	-	-	-	Non Basis
c. Penggalian	-	-	-	Non Basis
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	0.37	0.44	0.45	Non Basis
a. Industri Migas	-	-	-	Non Basis
b. Industri tanpa Migas	0.42	0.50	0.51	Non Basis
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	2.00	1.94	1.97	Basis
5. BANGUNAN	1.41	1.38	1.38	Basis
6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN	1.29	1.22	1.20	Basis
a. Perdagangan Besar & Eceran	1.37	1.30	1.28	Basis
b. Hotel	0.56	0.54	0.52	Non Basis
c. Restoran	1.05	0.99	0.95	Non Basis
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	2.32	2.07	1.91	Basis
a. Pengangkutan	2.95	2.68	2.54	Basis
b. Komunikasi	0.92	0.83	0.75	Non Basis
8. KEU. PERSEWAAN, & JASA PERUSAHAAN	1.22	1.16	1.14	Basis
a. Bank	0.31	0.29	0.29	Non Basis
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	0.85	0.77	0.71	Non Basis
c. Jasa Penunjang Keuangan	-	-	-	Non Basis
d. Sewa Bangunan	3.40	3.20	3.14	Basis
e. Jasa Perusahaan	0.27	0.26	0.25	Non Basis
9. JASA-JASA	1.80	1.93	1.95	Basis
a. Pemerintahan Umum	1.81	2.19	2.30	Basis
b. Swasta	1.78	1.67	1.63	Basis

Sumber: Hasil Perhitungan Tim LPEM FEUI, 2006

Temuan lainnya, sektor industri tidak merupakan sektor unggulan relatif dibandingkan dengan perekonomian nasional. Implikasinya, arah kebijakan jangka panjang Kota Pangkalpinang akan diarahkan pada pembangunan sektor jasa-jasa termasuk perdagangan.

Sektor perdagangan merupakan sektor unggulan di Kota Pangkalpinang termasuk sektor bangunan dan sewa bangunan

Selain memperbandingkan perekonomian Kota Pangkalpinang dengan perekonomian nasional, perhitungan indeks LQ Kota Pangkalpinang ini juga dilakukan dengan memperbandingkannya dengan perekonomian kabupaten-kabupaten lain dalam satu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Temuan nilai Indeks LQ Kota Pangkalpinang yang dibandingkan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat ditunjukkan pada **Tabel 2.12** berikut ini:

Tabel 2.12
Perhitungan Indeks LQ Kota Pangkalpinang dengan Perbandingan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2000 – 2004

LAPANGAN USAHA	2002	2003	2004	KETERANGAN
1. PERTANIAN	0,78	0,74	0,72	Non Basis
a. Tanaman Bahan Makanan	0,38	0,34	0,30	Non Basis
b. Tanaman Perkebunan	0,01	0,01	0,01	Non Basis
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	1,10	1,05	1,02	Basis
d. Kehutanan	-	-	-	Non Basis
e. Perikanan	2,20	2,09	2,01	Basis
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	-	-	-	Non Basis
a. Pertambangan tanpa Migas	-	-	-	Non Basis
b. Penggalian	-	-	-	Non Basis
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	0,38	0,46	0,48	Non Basis
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	2,04	1,98	1,99	Basis
5. BANGUNAN	1,32	1,28	1,28	Basis
6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN	1,85	1,80	1,79	Basis
a. Perdagangan Besar & Eceran	1,86	1,80	1,80	Basis
b. Hotel	3,51	3,54	3,64	Basis
c. Restoran	1,66	1,61	1,61	Basis
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	3,28	3,07	2,98	Basis
a. Pengangkutan	3,26	3,05	2,94	Basis
b. Komunikasi	3,38	3,27	3,28	Basis
8. KEU. PERSEWAAN, & JASA PERUSAHAAN	2,51	2,48	2,53	Basis
a. Bank	3,13	3,03	3,02	Basis
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	3,13	3,03	3,01	Basis
c. Sewa Bangunan	2,47	2,45	2,51	Basis
d. Jasa Perusahaan	1,63	1,61	1,63	Basis
9. JASA-JASA	2,84	2,73	2,77	Basis
a. Pemerintahan Umum	2,57	2,49	2,53	Basis
b. Swasta	3,19	3,10	3,16	Basis

Sumber: Hasil Perhitungan Tim LPEM FEUI, 2006

Temuan di atas memperlihatkan bahwa hampir semua sektor sekunder dan tersier di Kota Pangkalpinang memiliki keunggulan komparatif jika dibandingkan dengan perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kecuali sektor industri. Temuan ini

tentunya sejalan dengan ciri perekonomian Kota Pangkalpinang yang semakin mengarah kepada sektor tersier. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan perekonomian nasional, tidak semua sektor tersier tersebut merupakan sektor unggulan. Informasi ini juga merupakan informasi yang sangat berharga bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menentukan pengembangan perekonomian provinsi yang berlokasi di Kota Pangkalpinang.

Analisis sektor unggulan dengan menggunakan metode *Location Quotient* di atas memiliki potensi sejumlah kelemahan antara lain tidak dimasukkannya keterkaitan antar sektor dalam perekonomian. Padahal, tidak dapat dipungkiri, bahwa setiap sektor dalam perekonomian memiliki keterkaitan dengan sektor lainnya. Sehingga, ketika terjadi perbaikan kinerja pada satu sektor akan mempengaruhi kinerja sektor lainnya pula. Untuk menganalisis sektor unggulan Kota Pangkalpinang dengan mengadopsi keterkaitan pembangunan antar sektor, tim LPEM FEUI akan mengaplikasikan teknik analisis Tabel Input Output. Detail metodologi Tabel Input Output ini dapat ditunjukkan pada **Lampiran 1** laporan ini.

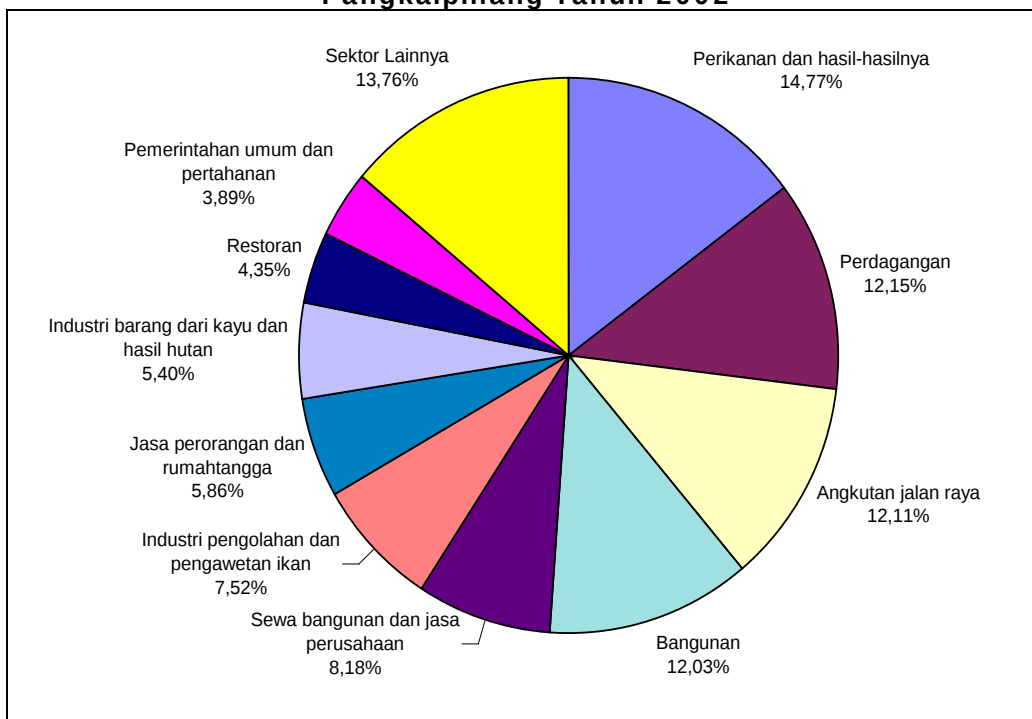
Penting pula diperhatikan keterkaitan antar sektor dalam penentuan sektor unggulan

Kota Pangkalpinang sendiri memiliki Tabel Input Output terakhir pada tahun 2002, dan selanjutnya menjadi basis dari analisis sektor unggulan di Kota Pangkalpinang. Analisis pertama yang dilakukan berdasarkan informasi dalam Tabel Input Output Kota Pangkalpinang adalah proporsi output sektoral. Dari Rp 1,49 trilyun output Kota Pangkalpinang pada tahun 2002, proporsi output terbesar adalah sektor perikanan dan hasil-hasilnya yang mencapai 14,77% dari total output Kota Pangkalpinang diikuti oleh sektor

perdagangan, angkutan jalan raya dan bangunan yang memiliki proporsi output di atas 12%. Secara detail, distribusi output perekonomian Kota Pangkalpinang pada tahun 2002 dapat ditunjukkan pada **Gambar 2.19** berikut ini:

Proporsi output terbesar perekonomian Kota Pangkalpinang terdapat pada sektor perikanan dan perdagangan

Gambar 2.19
Distribusi Output Perekonomian berdasarkan Sektor Produksi Kota Pangkalpinang Tahun 2002



Sumber: Hasil Pengolahan Tim LPEM FEUI, 2006

Hasil perhitungan nilai output untuk seluruh sektor perekonomian di Kota Pangkalpinang, selanjutnya dapat ditunjukkan pada **Lampiran 2** laporan ini. Temuan tentang output ini tentunya merupakan gambaran kasar saja dari kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator kesejahteraan yang lebih baik adalah tingkat pendapatan yang diterima masyarakat berupa upah dan

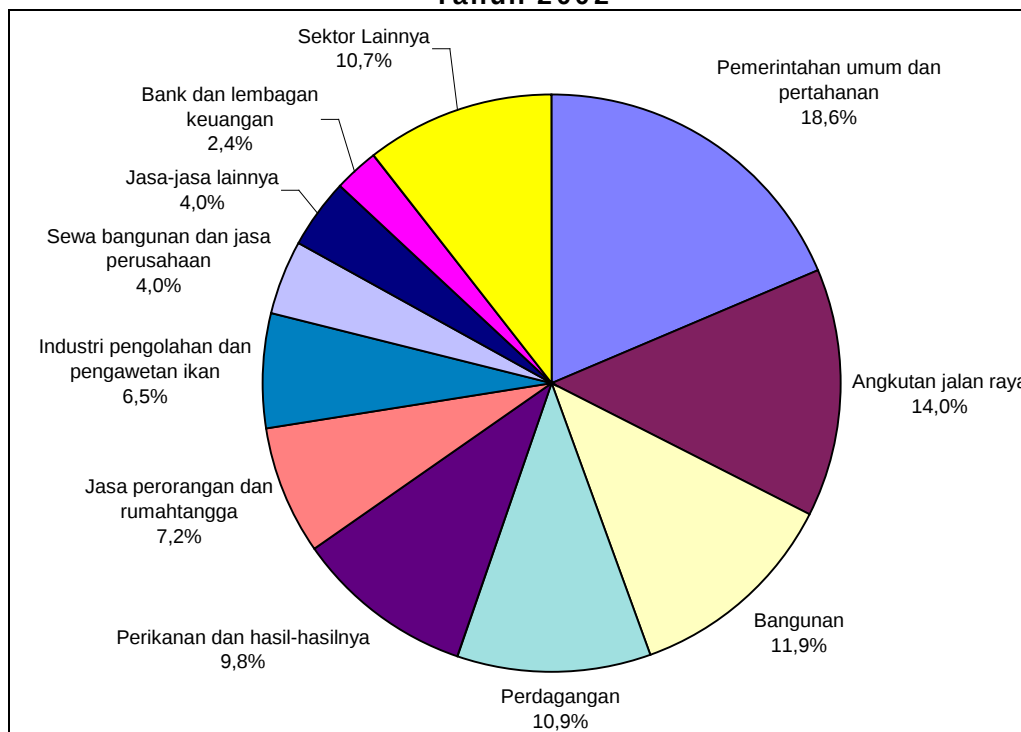
Ukuran kesejahteraan masyarakat yang lain adalah pendapatan yang diterima masyarakat dalam bentuk upah/gaji

gaji. Hasil pengolahan data upah dan gaji yang diterima pekerja di seluruh sektor perekonomian di Kota Pangkalpinang menunjukkan temuan yang berbeda.

Gambar 2.20 berikut ini menunjukkan bahwa sektor pemerintahan umum dan pertahanan merupakan sektor yang memiliki porsi pendapatan terbesar yaitu sekitar 18,6% dari total pendapatan Kota Pangkalpinang diikuti oleh sektor angkutan jalan raya yang memiliki porsi sekitar 14%. Tingginya porsi pendapatan sektor pemerintahan umum dan pertahanan ini tentunya dipacu oleh faktor strategis Kota Pangkalpinang yang menjadi ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Seperti diketahui bahwa porsi biaya terbesar dalam penyelenggaraan pemerintahan tentunya adalah gaji pegawai, TNI dan Polri itu sendiri. Implikasinya, banyaknya PNS dan aparat pertahanan dan perlindungan masyarakat di Kota Pangkalpinang memberikan kondisi bahwa pendapatan sektor ini pun menjadi relatif lebih besar. Secara lengkap, detail mengenai pendapatan sektoral perekonomian Kota Pangkalpinang dapat ditunjukkan pada **Lampiran 3** laporan ini.

Pangkalpinang
menjadi ibukota
pemerintahan
Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung
menyumbang
pendapatan
masyarakat yang
berada pada sektor
pemerintahan umum

Gambar 2.20
Distribusi Pendapatan Sektoral Perekonomian Kota Pangkalpinang Tahun 2002



Sumber: Hasil Pengolahan Tim LPEM FEUI, 2006

Selain memperlihatkan nilai proporsi output dan pendapatan setiap sektor terhadap total output dan pendapatan Kota Pangkalpinang, penting pula ditunjukkan dampak efek pengganda (*multiplier effect*) dari kegiatan suatu sektor perekonomian terhadap sektor itu sendiri, sektor lainnya dan perekonomian secara keseluruhan.

Analisis angka pengganda ini dapat dilakukan dengan menggunakan kerangka analisis tabel Input Output. Metodologi perhitungan angka pengganda ini dapat dilihat kembali dalam **Lampiran 1** laporan ini. Hasil perhitungan *output multiplier* Kota Pangkalpinang dapat ditunjukkan pada **Tabel 2.13** berikut ini:

Dampak aktivitas kegiatan sektoral terhadap perekonomian secara keseluruhan dapat ditunjukkan pada angka *multiplier*

Tabel 2.13
Output Multiplier Kota Pangkalpinang

No	Sektor Produksi	Output Multiplier
1	Industri pengolahan dan pengawetan ikan	1,690
2	Restoran	1,454
3	Industri kertas dan barang cetakan	1,437
4	Listrik, gas dan air bersih	1,397
5	Industri kerupuk dan sejenisnya	1,382
6	Industri semen dan barang dari semen	1,366
7	Industri barang dari kayu dan hasil hutan	1,321
8	Industri barang lainnya	1,310
9	Hotel	1,300
10	Komunikasi	1,300
11	Industri penggilingan dan pembersihan kopi dan lada	1,281
12	Jasa hiburan dan rekreasi	1,273
13	Sewa bangunan dan jasa perusahaan	1,263
14	Jasa perorangan dan rumahtangga	1,255
15	Bangunan	1,226
16	Jasa penunjang angkutan	1,215
17	Bank dan lembaga keuangan	1,213
18	Angkutan jalan raya	1,195
19	Peternakan dan hasil-hasilnya	1,194
20	Industri alat angkutan, mesin dan peralatannya	1,191
21	Jasa-jasa lainnya	1,184
22	Perikanan dan hasil-hasilnya	1,181
23	Industri makanan lainnya	1,162
24	Industri batubata dan genteng dari tanah liat	1,087
25	Perdagangan	1,069
26	Industri kimia dan barang dari bahan kimia	1,064
27	Angkutan air	1,058
28	Tanaman perkebunan	1,056
29	Tanaman bahan makanan	1,036
30	Pemerintahan umum dan pertahanan	1,000

Sumber: Hasil Perhitungan LPEM FEUI, 2006

Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa industri pengolahan dan pengawetan ikan merupakan industri dengan nilai output multiplier tertinggi yaitu sebesar 1,69. Angka ini mengandung arti bahwa setiap peningkatan 1 satuan permintaan akhir akan meningkatkan output perekonomian Kota Pangkalpinang secara keseluruhan sebesar 1,69 satuan. Angka yang tinggi ini tentunya tidak terlepas dari sifat kegiatan industri yang membutuhkan input yang sangat besar dari sektor hulu nya dan digunakan secara intensif pada

sektor hilirnya. Dalam kasus industri ini, ia membutuhkan output dari sektor perikanan dan kelautan yang notabene memiliki porsi output terbesar di Kota Pangkalpinang.

Meskipun demikian, proporsi kegiatan sektor ini relatif kecil di Kota Pangkalpinang serta relatif bukan merupakan sektor unggulan di Kota Pangkalpinang jika menggunakan kriteria indeks *Location Quotient* sebelumnya. Selain efek pengganda output dari peningkatan aktivitas ekonomi suatu sektor, perbaikan kinerja sektoral juga akan membutuhkan input tenaga kerja sehingga meningkatkan balas jasa atas faktor produksi tenaga kerja berupa upah dan gaji. Efek pengganda pendapatan ini dalam analisis input output diukur dalam bentuk nilai *income multiplier*.

Sekali lagi, Lampiran 1 laporan ini menjelaskan tentang teknik perhitungan nilai *income multiplier* ini. Hasil perhitungan *income multiplier* Kota Pangkalpinang dapat ditunjukkan pada **Tabel 2.14**.

Hasil perhitungannya menunjukkan bahwa industri barang dari kayu dan hasil hutan merupakan sektor dengan nilai angka pengganda pendapatan (*income multiplier*) tertinggi di Kota Pangkalpinang yaitu sebesar 2,01. Angka ini mengandung arti bahwa setiap peningkatan pendapatan sektor ini sebanyak 1 satuan akan meningkatkan pendapatan perekonomian secara keseluruhan sebesar 2,01 satuan. Temuan ini sekali lagi sejalan dengan temuan perhitungan *output multiplier* yang lebih disebabkan oleh keterkaitan antar sektor. Dalam kasus perekonomian Kota Pangkalpinang yang lebih terciiran pada bentuk perekonomian tersier, keterkaitan ke belakang bukan menjadi sesuatu pertimbangan penting mengingat bahan baku proses

produksi sektoral sebagian besar berasal dari daerah lain di luar Kota Pangkalpinang.

Tabel 2.14
***Income Multiplier* Kota Pangkalpinang**

No	Sektor Produksi	<i>Income Multiplier</i>
1	Industri barang dari kayu dan hasil hutan	2,011
2	Restoran	1,807
3	Industri pengolahan dan pengawetan ikan	1,610
4	Listrik, gas dan air bersih	1,607
5	Industri alat angkutan, mesin dan peralatannya	1,571
6	Industri kertas dan barang cetakan	1,511
7	Sewa bangunan dan jasa perusahaan	1,493
8	Industri penggilingan dan pembersihan kopi dan lada	1,451
9	Komunikasi	1,279
10	Industri barang lainnya	1,279
11	Industri semen dan barang dari semen	1,269
12	Jasa hiburan dan rekreasi	1,259
13	Perikanan dan hasil-hasilnya	1,214
14	Jasa penunjang angkutan	1,196
15	Jasa perorangan dan rumahtangga	1,183
16	Peternakan dan hasil-hasilnya	1,177
17	Hotel	1,176
18	Angkutan jalan raya	1,173
19	Bangunan	1,162
20	Industri kerupuk dan sejenisnya	1,159
21	Bank dan lembaga keuangan	1,144
22	Industri makanan lainnya	1,098
23	Angkutan air	1,095
24	Industri batubata dan genteng dari tanah liat	1,093
25	Jasa-jasa lainnya	1,075
26	Industri kimia dan barang dari bahan kimia	1,072
27	Perdagangan	1,065
28	Tanaman perkebunan	1,062
29	Tanaman bahan makanan	1,055
30	Pemerintahan umum dan pertahanan	1,000

Sumber: Hasil Perhitungan LPEM FEUI, 2006

Keterkaitan ke depan yang seharusnya lebih menjadi pertimbangan dalam menentukan sektor unggulan di Kota Pangkalpinang. Meskipun demikian hasil perhitungan keterkaitan ke belakang juga akan ditampilkan dalam **Tabel 2.15** berikut ini:

Tabel 2.15
Keterkaitan Ke Belakang dan Ke Depan antar Sektor Perekonomian
Kota Pangkalpinang

No	Sektor Produksi	Keterkaitan ke Belakang		Keterkaitan ke Depan	
		Indeks	Keterangan	Indeks	Keterangan
1	Tanaman bahan makanan	0,836	Rendah	0,894	Rendah
2	Tanaman perkebunan	0,852	Rendah	0,811	Rendah
3	Peternakan dan hasil-hasilnya	0,964	Rendah	0,956	Rendah
4	Perikanan dan hasil-hasilnya	0,954	Rendah	1,581	Tinggi
5	Industri pengolahan dan pengawetan ikan	1,365	Tinggi	0,832	Rendah
6	Industri kerupuk dan sejenisnya	1,115	Tinggi	0,821	Rendah
7	Industri penggilingan & pembersihan kopi & lada	1,034	Tinggi	0,810	Rendah
8	Industri makanan lainnya	0,938	Rendah	0,849	Rendah
9	Industri batu bata dan genteng dari tanah liat	0,877	Rendah	0,825	Rendah
10	Industri barang dari kayu dan hasil hutan	1,067	Tinggi	0,948	Rendah
11	Industri alat angkutan, mesin dan peralatannya	0,961	Rendah	0,915	Rendah
12	Industri semen dan barang dari semen	1,103	Tinggi	0,862	Rendah
13	Industri kimia dan barang dari bahan kimia	0,859	Rendah	0,819	Rendah
14	Industri kertas dan barang cetakan	1,160	Tinggi	0,847	Rendah
15	Industri barang lainnya	1,058	Tinggi	0,812	Rendah
16	Listrik, gas dan air bersih	1,128	Tinggi	1,603	Tinggi
17	Bangunan	0,990	Rendah	1,056	Tinggi
18	Perdagangan	0,863	Rendah	2,296	Tinggi
19	Hotel	1,049	Tinggi	0,826	Rendah
20	Restoran	1,174	Tinggi	0,915	Rendah
21	Angkutan jalan raya	0,965	Rendah	1,406	Tinggi
22	Angkutan air	0,854	Rendah	0,818	Rendah
23	Jasa penunjang angkutan	0,981	Rendah	0,849	Rendah
24	Komunikasi	1,049	Tinggi	1,048	Tinggi
25	Bank dan lembaga keuangan	0,979	Rendah	1,104	Tinggi
26	Sewa bangunan dan jasa perusahaan	1,019	Tinggi	1,051	Tinggi
27	Pemerintahan umum dan pertahanan	0,807	Rendah	0,807	Rendah
28	Jasa hiburan dan rekreasi	1,028	Tinggi	0,809	Rendah
29	Jasa perorangan dan rumah tangga	1,013	Tinggi	0,973	Rendah
30	Jasa-jasa lainnya	0,956	Rendah	0,856	Rendah

Sumber: Hasil Perhitungan LPEM FEUI, 2006

Secara teoritis, angka indeks keterkaitan baik ke depan maupun ke belakang yang lebih besar dari satu menunjukkan bahwa sektor tersebut memiliki keterkaitan yang tinggi. Sebagai ilustrasi misalnya, industri pengolahan dan pengawetan ikan memiliki indeks ke belakang lebih besar dari satu menunjukkan bahwa sektor ini memiliki keterkaitan ke belakang yang tinggi, yaitu sektor ini relatif secara intensif menggunakan input dari sektor lain dalam proses produksinya.

Satu hal yang menarik adalah sektor perdagangan yang memiliki keterkaitan ke depan yang sangat tinggi yang mengandung arti bahwa output dari sektor ini digunakan secara intensif sebagai input pada kegiatan sektor lainnya. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka pada bagian berikut ini tim akan menentukan sektor unggulan di Kota Pangkalpinang berdasarkan hasil pengolahan analisis Tabel Input Output. Sebelumnya, tim juga mempertimbangkan kondisi perekonomian Kota Pangkalpinang yang relatif didominasi oleh kegiatan sektor tersier. Implikasinya, kebutuhan input dari sektor hulu relatif tidak menjadi penting karena dapat diperoleh dari daerah di luar Pangkalpinang.

Pertimbangan tim dalam menentukan sektor unggulan Kota Pangkalpinang terdiri dari 3 indikator yaitu **proporsi output dan pendapatan sektoral serta nilai indeks keterkaitan ke depan sektoral**. Penggunaan proporsi output dan pendapatan ini tidak terlepas dari usaha menangkap kondisi terkini dari perekonomian Kota Pangkalpinang. Penggunaan indeks keterkaitan ke depan berusaha menangkap dampak dari satu kegiatan sektor produksi terhadap aktivitas produksi sektor lainnya sehingga akan memberikan dampak terhadap aktivitas perekonomian Kota Pangkalpinang secara keseluruhan.

Setiap indikator sektoral tersebut kemudian ditentukan nilai peringkatnya, kemudian dijumlahkan nilai peringkatnya. Hasil penjumlahan peringkat proporsi output, proporsi pendapatan, dan indeks keterkaitan ke depan terkecil merupakan sektor unggulan dengan prioritas utama disusul oleh sektor perekonomian lainnya. Proses perhitungan tersebut dapat ditunjukkan

Terdapat tiga indikator yang digunakan untuk menentukan sektor unggulan di Kota Pangkalpinang yaitu proporsi output, proporsi pendapatan dan indeks keterkaitan ke depan

Sektor perdagangan dengan pertimbangan analisis input output adalah sektor prioritas

pada **Lampiran 4** laporan ini. Hasil perhitungan prioritas sektor unggulan Kota Pangkalpinang dapat ditunjukkan pada **Tabel 2.16** berikut ini:

Tabel 2.16
Urutan Prioritas Sektor Unggulan Kota Pangkalpinang berdasarkan
Pengolahan Tabel Input Output Kota Pangkalpinang

Prioritas	Sektor Produksi	Prioritas	Sektor Produksi
1	Perdagangan	16	Industri alat angkutan, mesin dan peralatannya
2	Perikanan dan hasil-hasilnya	17	Tanaman bahan makanan
3	Angkutan jalan raya	18	Industri makanan lainnya
4	Bangunan	19	Hotel
5	Sewa bangunan dan jasa perusahaan	20	Industri kerupuk dan sejenisnya
6	Jasa perorangan dan rumah tangga	21	Jasa penunjang angkutan
7	Listrik, gas dan air bersih	22	Angkutan air
8	Bank dan lembaga keuangan	23	Industri semen dan barang dari semen
9	Restoran	24	Industri batubata dan genteng dari tanah liat
10	Industri pengolahan dan pengawetan ikan	25	Industri kertas dan barang cetakan
11	Industri barang dari kayu dan hasil hutan	26	Industri penggilingan dan pembersihan kopi dan lada
12	Komunikasi	27	Industri kimia dan barang dari bahan kimia
13	Jasa-jasa lainnya	28	Jasa hiburan dan rekreasi
14	Peternakan dan hasil-hasilnya	29	Tanaman perkebunan
15	Pemerintahan umum dan pertahanan	30	Industri barang lainnya

Sumber: Hasil Perhitungan Tim LPEM FEUI, 2006

Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa sektor perdagangan merupakan sektor prioritas utama di Kota Pangkalpinang. Perhitungan ini sejalan dengan hasil perhitungan Indeks *Location Quotient* (LQ) dimana sektor perdagangan merupakan sektor basis di Kota Pangkalpinang. Meskipun demikian, sektor perdagangan tentunya tidak berdiri sendiri sehingga memerlukan dukungan sektor perekonomian lainnya. Pengembangan sektor perdagangan juga membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas prima. Pada bagian berikut ini, tim akan melakukan proyeksi perekonomian dan kondisi umum Kota Pangkalpinang dalam periode 20 tahun ke depan.

2.2. PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH

Proyeksi pertama kondisi umum Kota Pangkalpinang dalam periode 20 tahun ke depan menyangkut tentang jumlah penduduk dan pertumbuhan penduduk di Kota Pangkalpinang. Secara teknis, proyeksi ini dilakukan dalam kerangka **permodelan ekonometrika**. Proyeksi jumlah penduduk tentunya akan memberikan sejumlah tantangan pada masa depan dalam pembangunan Kota Pangkalpinang. Secara teoritis, penduduk dapat dipandang sebagai potensi pembangunan sekaligus beban jika tidak dapat tertampung dalam pasar tenaga kerja. Selain itu, tuntutan pelayanan serta pemecahan permasalahan manajemen publik akan semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk.

Sebelum memperlihatkan hasil proyeksi penduduk Kota Pangkalpinang, temuan hasil proyeksi ini akan terbagi menjadi 4 periode 5 tahunan sesuai dengan target dari pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pangkalpinang. Tahapan periode lima tahunan tersebut terdiri dari:

- Lima Tahun Pertama : Tahun 2007 – 2011
- Lima Tahun Kedua : Tahun 2012 – 2016
- Lima Tahun Ketiga : Tahun 2017 – 2021
- Lima Tahun Keempat : Tahun 2022 – 2026

Hasil proyeksi tim LPEM FEUI memperlihatkan bahwa dalam periode lima tahun terakhir dari dokumen perencanaan jangka panjang ini, secara rata-rata jumlah penduduk Kota Pangkalpinang mencapai lebih dari 209 ribu penduduk dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang cenderung turun dan rata-rata mencapai 1,86% dalam 20 tahun ke depan. Secara detail, hasil proyeksi

Prediksi kondisi umum akan memberikan gambaran masa depan dan tantangan

Perkiraan pertumbuhan penduduk Kota Pangkalpinang rata-rata 1,86% pada periode 20 tahun ke depan

jumlah penduduk dan tingkat pertumbuhan penduduk secara rata-rata dalam periode lima tahunan dapat ditunjukkan pada **Tabel 2.17** berikut ini:

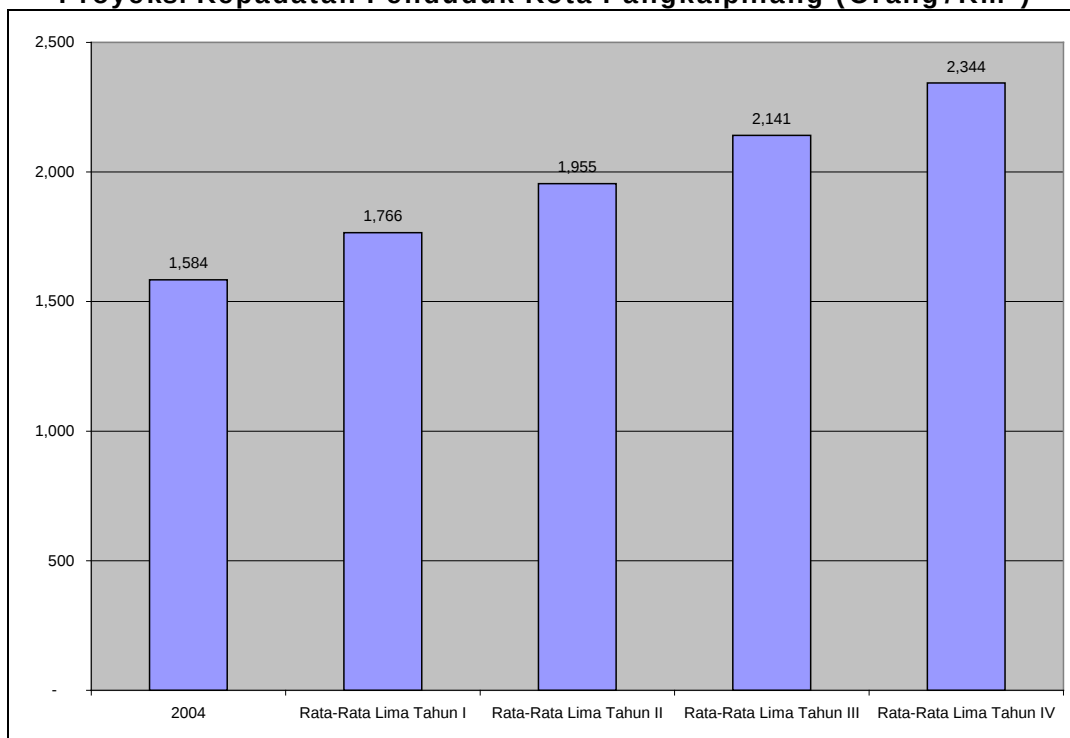
Tabel 2.17
Proyeksi Jumlah Penduduk dan Tingkat Pertumbuhan Penduduk Kota Pangkalpinang, 2007 – 2026

Variabel Penduduk	Rata-Rata Periode Lima Tahunan			
	I	II	III	IV
Jumlah Penduduk (Orang)	157,865	174,791	191,416	209,517
Pertumbuhan Penduduk (%)	1.93%	1.85%	1.83%	1.82%

Sumber: Hasil Perhitungan Tim LPEM FEUI, 2006

Adanya peningkatan jumlah penduduk ini dan luas Wilayah Kota Pangkalpinang yang relatif tetap memberikan implikasi akan adanya peningkatan kepadatan penduduk di Kota Pangkalpinang. Hasil proyeksi perkiraan rata-rata kepadatan penduduk Kota Pangkalpinang dalam periode 20 tahun ke depan dapat ditunjukkan pada **Gambar 2.21** berikut ini:

Gambar 2.21
Proyeksi Kepadatan Penduduk Kota Pangkalpinang (Orang / Km²)



Sumber: Hasil Pengolahan Tim LPEM FEUI, 2006

Gambar di atas memperlihatkan bahwa Kota Pangkalpinang dalam 20 tahun ke depan akan mengalami peningkatan tingkat kepadatan kota seiring dengan perkembangan kota dan pertumbuhan jumlah penduduk. Kepadatan penduduk ini dapat dipandang sebagai keuntungan agglomerasi (keuntungan karena kedekatan lokasi), namun dapat dipandang juga semakin meningkatnya tantangan pembangunan pada masa depan. Ekternalitas negatif dimungkinkan pula timbul akibat adanya permasalahan lingkungan.

Kompleksitas permasalahan pun akan semakin meningkat jika pola dari pertumbuhan penduduk untuk setiap kecamatannya tidak mengalami perubahan dari pola yang ada saat ini. Seiring dengan pertumbuhan penduduk, beberapa kecamatan di Kota Pangkalpinang akan memiliki kepadatan penduduk yang sangat besar sehingga diperlukan usaha perencanaan wilayah yang perlu memikirkan perkembangan kota pada masa depan.

Hasil proyeksi tim LPEM FEUI misalnya mengindikasikan bahwa Kecamatan Tamansari akan memiliki kepadatan yang sangat tinggi hingga mencapai 12,152 orang/km². Tentunya hasil perhitungan ini mengasumsikan bahwa tidak terjadi perubahan pola sebaran penduduk di Kota Pangkalpinang hingga periode 20 tahun ke depan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan wilayah yang lebih baik dengan memperhitungkan arah kemana sebaran penduduk diarahkan misalkan ke Kecamatan Bukit Intan dan Gerunggang yang relatif memiliki kepadatan penduduk yang lebih rendah. Secara lengkap, hasil proyeksi kepadatan penduduk per kecamatan di Kota Pangkalpinang hingga 20 tahun ke depan, dapat ditunjukkan pada **Tabel 2.18** berikut ini:

Seiring dengan pertumbuhan penduduk diperkirakan akan terjadi peningkatan kepadatan penduduk

Diperlukan perencanaan tata kota yang memikirkan perkembangan masa depan khususnya yang berkaitan dengan sebaran penduduk antar kecamatan

Tabel 2.18
Proyeksi Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kota Pangkalpinang
dengan Asumsi Tidak Ada Perubahan Sebaran Penduduk per
Kecamatan, Tahun 2004 - 2026

Kecamatan	2004	Rata-Rata Periode Lima Tahunan			
		I	II	III	IV
Taman Sari		9,156	10,138	11,102	12,152
Pangkalbalam	5,145	5,738	6,353	6,957	7,615
Rangkui	4,877	5,439	6,022	6,595	7,218
Bukit Intan	885	987	1,093	1,197	1,310
Gerunggang	707	788	873	956	1,046
Kota Pangkalpinang	1,584	1,766	1,955	2,141	2,344

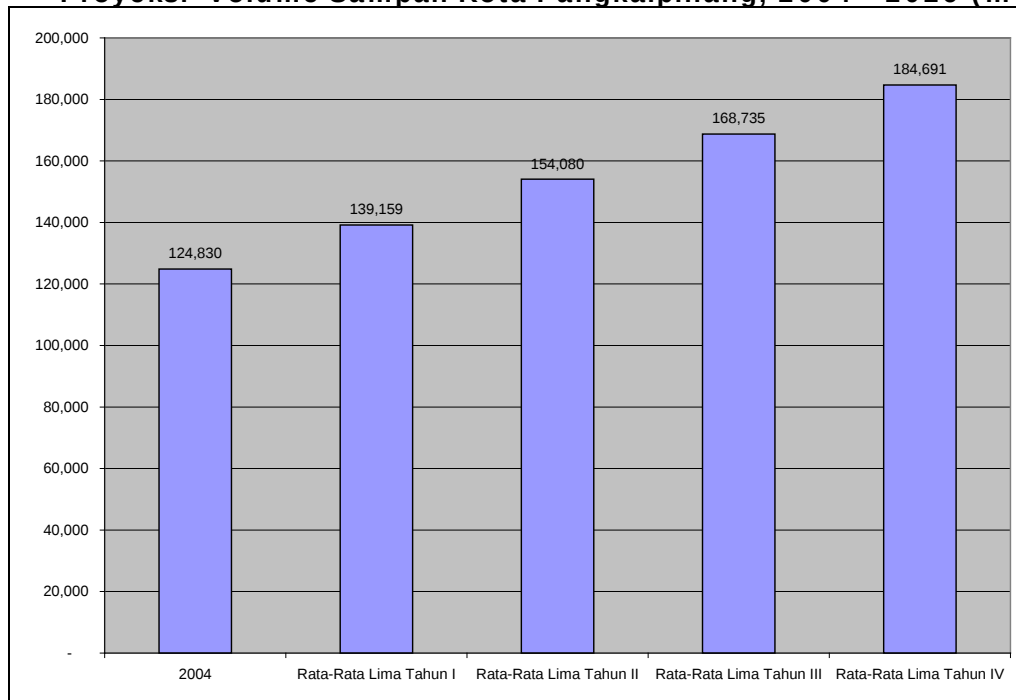
Sumber: Hasil Proyeksi LPEM FEUI, 2006

Pertumbuhan penduduk juga akan memberikan konsekuensi terhadap permasalahan lingkungan yang semakin kompleks. Salah satu indikasi yang ada adalah volume sampah Kota Pangkalpinang yang akan semakin meningkat. Hasil perhitungan memperlihatkan bahwa rata-rata satu penduduk di Kota Pangkalpinang membuang sampah sebanyak 0,88 m³ per tahun. Implikasinya, jika pertumbuhan penduduk semakin meningkat, volume total sampah juga akan semakin meningkat. Hasil proyeksi LPEM menunjukkan bahwa pada periode lima tahunan keempat, angka volume sampah Kota Pangkalpinang hampir mencapai 185.000 m³. Detail proyeksi volume sampah Kota Pangkalpinang tersebut dapat ditunjukkan pada **Gambar 2.22** berikut ini:

Volume sampah diperkirakan meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dimana rata-rata sampah per satu penduduk Kota Pangkalpinang mencapai 0,88 m³

Gambar 2.22

Proyeksi Volume Sampah Kota Pangkalpinang, 2004 - 2026 (m³)



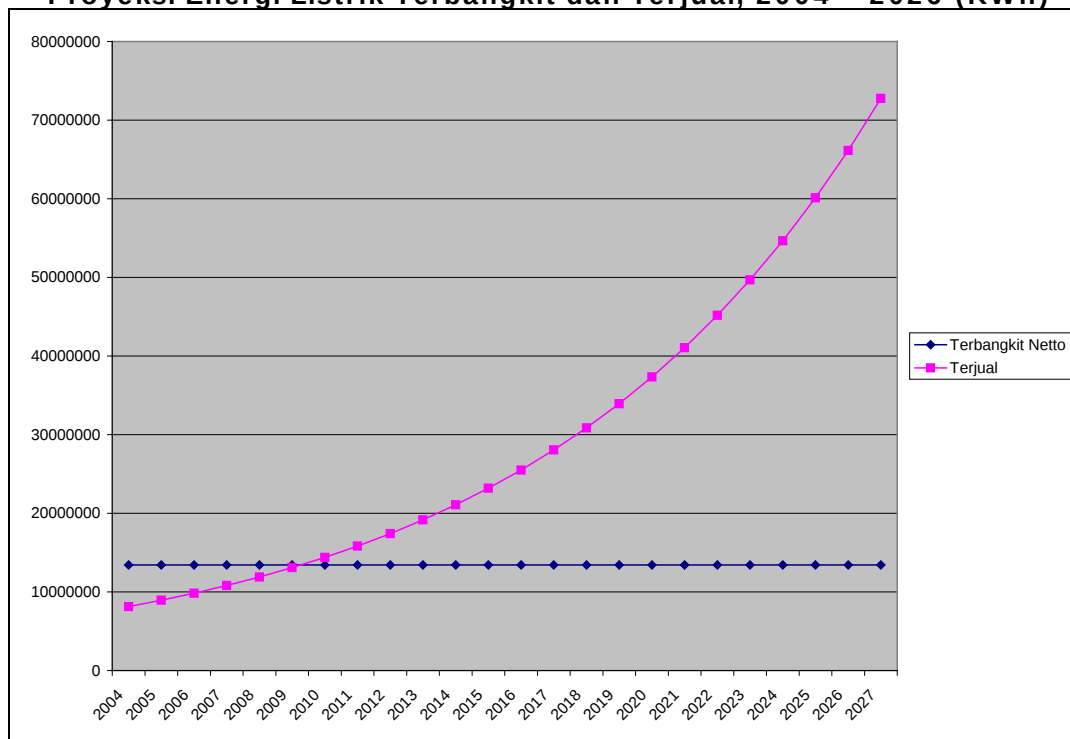
Sumber: Hasil Perhitungan Tim LPEM FEUI.

Perkembangan perekonomian Kota Pangkalpinang pada masa depan juga memerlukan kebutuhan energi yang cukup. Salah satu indikasinya adalah semakin dekatnya kesenjangan antara besarnya energi listrik yang terbangkit dengan listrik yang terjual. Dengan mengasumsikan tingkat pertumbuhan besarnya rata-rata KWh listrik yang terjual sama dengan 10% pada setiap tahunnya serta listrik terbangkit tetap seperti tahun 2004, maka diperkirakan pada tahun 2010 Kota Pangkalpinang akan mengalami krisis energi listrik. Adanya temuan ini tentunya membutuhkan strategi pemerintahan daerah dalam mengatasi potensi krisis energi di Kota Pangkalpinang.

Temuan simulasi kebutuhan energi dan pasokan energi listrik yang ada dapat ditunjukkan pada **Gambar 2.23** berikut ini:

Diperkirakan, pada tahun 2010 Kota Pangkalpinang berpotensi mengalami krisis energi listrik jika tidak terdapat perubahan kapasitas

Gambar 2.23
Proyeksi Energi Listrik Terbangkit dan Terjual, 2004 – 2026 (KWh)



Sumber: Hasil Perhitungan Tim LPEM FEUI, 2006

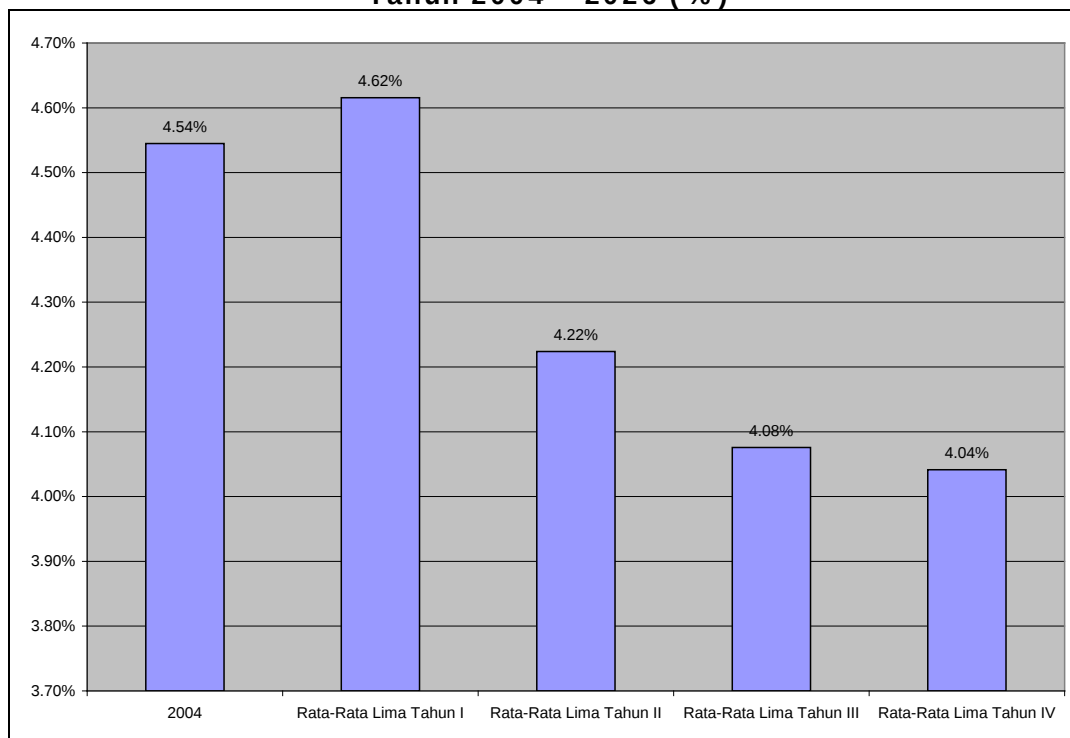
Selain listrik, penyediaan air bersih harus menjadi agenda utama salah satunya adalah dengan mengatasi besarnya porsi susutnya air dalam proses distribusi.

Proyeksi berikutnya menyangkut aspek makroekonomi Kota Pangkalpinang yang ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi Kota Pangkalpinang. Hasil proyeksi dengan menggunakan model ekonometrika menunjukkan perkiraan bahwa dalam periode 20 tahun ke depan, rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Pangkalpinang per tahun sebesar 4,26%. Perkembangan rata-rata pertumbuhan ekonomi tahunan Kota Pangkalpinang untuk setiap tahap dari periode lima tahunan dapat ditunjukkan pada **Gambar 2.24** berikut ini:

Mengatasi permasalahan susut air dalam proses distribusi menjadi prioritas

Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Pangkalpinang dalam periode 20 tahun ke depan sebesar 4,26%

Gambar 2.24
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Tahunan Kota Pangkalpinang,
Tahun 2004 – 2026 (%)



Sumber: Hasil Perhitungan LPEM FEUI, 2006

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada periode lima tahunan pertama dari implementasi RPJP-D Kota Pangkalpinang ini diperkirakan akan mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi serta mengalami penurunan dalam kisaran yang sangat kecil. Tentunya, angka pertumbuhan ekonomi ini dihitung dengan perkiraan yang moderat dimana akan dimungkinkan dapat mengalami peningkatan dengan melakukan sejumlah perbaikan dari sisi penyediaan infrastruktur dan penyediaan energi yang memadai. Lebih jauh lagi, pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat jika terjadi peningkatan investasi yang dipacu oleh iklim investasi yang mendukung.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Kota Pangkalpinang ini diperoleh dengan menggunakan

proyeksi sektor produksi Kota Pangkalpinang. Setiap sektor diperkirakan akan mengalami perbedaan tingkat pertumbuhan yang berbeda-beda dalam periode 20 tahunan ke depan. Hasil proyeksi yang dilakukan oleh tim LPEM FEUI memperlihatkan angka pertumbuhan sektoral perekonomian Kota Pangkalpinang dapat ditunjukkan pada **Tabel 2.19** berikut ini:

Perkiraan pertumbuhan ekonomi ini ditentukan pada level moderat

Tabel 2.19
Proyeksi Pertumbuhan Sektoral Tahunan Kota Pangkalpinang,
Tahun 2004 – 2026 (%)

LAPANGAN USAHA	2004	Rata-Rata Lima Tahun I	Rata-Rata Lima Tahun II	Rata-Rata Lima Tahun III	Rata-Rata Lima Tahun IV
Pertanian	1.37%	3.27%	2.77%	2.43%	2.16%
- Non Perikanan	1.17%	1.52%	1.23%	1.00%	0.81%
- Perikanan	1.39%	3.43%	2.90%	2.54%	2.25%
Industri	8.84%	5.37%	4.19%	3.49%	2.99%
Listrik, Gas dan Air Bersih	6.59%	7.19%	7.51%	7.67%	7.76%
- Listrik	7.04%	7.61%	7.83%	7.91%	7.94%
- Air Bersih	2.02%	1.64%	1.48%	1.41%	1.38%
Bangunan	7.71%	6.47%	6.10%	6.01%	5.98%
Perdagangan, Hotel dan Restoran	3.42%	3.87%	3.31%	2.95%	2.66%
- Perdagangan	3.55%	3.81%	3.29%	2.95%	2.68%
- Hotel dan Restoran	2.51%	4.25%	3.44%	2.94%	2.56%
Pengangkutan dan Komunikasi	3.24%	4.13%	3.81%	3.69%	3.71%
- Pengangkutan	2.40%	3.46%	2.90%	2.53%	2.25%
- Angkutan Darat	2.73%	3.78%	3.13%	2.71%	2.38%
- Angkutan Laut	-0.28%	0.03%	0.00%	0.00%	0.00%
- Jasa Penunjang Pengangkutan	1.90%	3.35%	2.82%	2.47%	2.20%
- Komunikasi	8.80%	7.71%	7.61%	7.55%	7.51%
Kuangan, Persewaan & Jasa Pers.	5.20%	5.48%	5.81%	6.07%	6.30%
- Bank	3.87%	3.97%	3.98%	3.98%	3.98%
- Lembaga Keuangan Bukan Bank	0.09%	2.94%	2.52%	2.23%	2.01%
- Sewa Bangunan	5.73%	5.86%	6.25%	6.52%	6.73%
- Jasa Perusahaan	5.13%	4.64%	4.28%	4.03%	3.82%
Jasa-Jasa	5.24%	4.85%	4.44%	4.34%	4.30%
- Pemerintahan Umum	5.74%	5.40%	4.86%	4.80%	4.79%
- Jasa Lainnya	4.61%	4.07%	3.80%	3.63%	3.48%
PDRB	4.54%	4.62%	4.22%	4.08%	4.04%

Sumber: Hasil Proyeksi Tim LPEM FEUI, 2006

Dari tabel di atas terlihat bahwa sektor yang berbasis sektor jasa (tersier) akan memiliki tingkat pertumbuhan yang cukup signifikan di Kota Pangkalpinang. Sektor-sektor yang akan diperkirakan tumbuh di atas pertumbuhan rata-rata sektoral yang tercermin dalam pertumbuhan ekonomi Kota Pangkalpinang adalah sektor keuangan dan sektor jasa-jasa. Tingkat pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan meningkat pada paruh pertama implementasi lima tahun dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pangkalpinang serta cenderung menurun pada sisa paruh implementasi 20 tahun ke depan. Meskipun demikian, tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Pangkalpinang tersebut secara riil masih tetap positif.

Sektor tersier
diperkirakan akan
tumbuh secara
signifikan di Kota
Pangkalpinang

Perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi setiap sektor ini jelas akan mempengaruhi komposisi aktivitas kegiatan perekonomian di Kota Pangkalpinang. Jika pada tahun 2004, sub sektor perikanan merupakan sektor yang memiliki porsi terbesar dalam aktivitas kegiatan perekonomian Kota Pangkalpinang, maka akhir periode lima tahunan dari implementasi RPJP-D Kota Pangkalpinang, sub sektor perdagangan akan memiliki porsi terbesar dalam aktivitas kegiatan perekonomian di Kota Pangkalpinang. Meskipun demikian, proporsi sub sektor ini relatif mengalami penurunan seiring dengan perkembangan waktu. Detail proyeksi distribusi kegiatan perekonomian di Kota Pangkalpinang dapat ditunjukkan pada **Tabel 2.20** berikut ini:

Diproyeksikan,
sektor perdagangan
tetap memiliki porsi
terbesar dalam
aktivitas kegiatan
perekonomian Kota
Pangkalpinang dalam
20 tahun ke depan

Tabel 2.20
Proyeksi Distribusi Kegiatan Sektorial Tahunan Kota Pangkalpinang,
Tahun 2004 – 2026 (%)

LAPANGAN USAHA	2004	Rata-Rata Lima Tahun I	Rata-Rata Lima Tahun II	Rata-Rata Lima Tahun III	Rata-Rata Lima Tahun IV
Pertanian	19.01%	17.64%	16.39%	15.19%	13.93%
- Non Perikanan	1.77%	1.48%	1.26%	1.09%	0.93%
- Perikanan	17.25%	16.15%	15.13%	14.11%	13.00%
Industri	12.76%	13.52%	13.71%	13.46%	12.90%
Listrik, Gas dan Air Bersih	1.31%	1.47%	1.72%	2.03%	2.42%
- Listrik	1.20%	1.38%	1.64%	1.96%	2.35%
- Air Bersih	0.11%	0.10%	0.08%	0.07%	0.06%
Bangunan	8.09%	8.97%	9.87%	10.82%	11.86%
Perdagangan, Hotel dan Restoran	19.65%	18.88%	18.08%	17.19%	16.16%
- Perdagangan	17.14%	16.40%	15.67%	14.90%	14.01%
- Hotel dan Restoran	2.51%	2.48%	2.40%	2.29%	2.15%
Pengangkutan dan Komunikasi	11.02%	10.68%	10.44%	10.25%	10.07%
- Pengangkutan	9.51%	8.92%	8.36%	7.79%	7.18%
- Angkutan Darat	8.29%	7.94%	7.54%	7.10%	6.59%
- Angkutan Laut	0.94%	0.72%	0.57%	0.46%	0.38%
- Jasa Penunjang Pengangkutan	0.28%	0.26%	0.24%	0.22%	0.21%
- Komunikasi	1.51%	1.76%	2.09%	2.46%	2.90%
Kuangan, Persewaan & Jasa Pers.	10.39%	10.66%	11.42%	12.48%	13.83%
- Bank	1.19%	1.13%	1.11%	1.10%	1.10%
- Lembaga Keuangan Bukan Bank	0.51%	0.46%	0.42%	0.39%	0.35%
- Sewa Bangunan	8.31%	8.69%	9.51%	10.61%	12.00%
- Jasa Perusahaan	0.38%	0.38%	0.38%	0.38%	0.38%
Jasa-Jasa	17.77%	18.17%	18.36%	18.58%	18.82%
- Pemerintahan Umum	10.00%	10.67%	11.04%	11.41%	11.82%
- Jasa Lainnya	7.77%	7.50%	7.32%	7.17%	7.00%
TOTAL	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Sumber: Hasil Proyeksi Tim LPEM FEUI, 2006

Setelah memperlihatkan kondisi umum dan proyeksi beberapa variabel penting pembangunan Kota Pangkalpinang, pada bagian berikut ini akan diperlihatkan hasil perhitungan survey data primer dalam proses menggali aspirasi *stakeholders* untuk menentukan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan Kota Pangkalpinang.

Selain pengolahan data sekunder, juga digunakan data primer dalam perumusan Visi, Misi dan Arah Kebijakan

BAB III

VISI, MISI, ARAH PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENJELASAN DASAR AKADEMIK PENYUSUNANNYA

Seperti yang dijelaskan di dalam Bab 1. Pendahuluan bahwa Dokumen RPJP disusun berdasarkan amanat UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah. Selanjutnya pada tingkat pelaksanaan dokumen perencanaan daerah baik untuk jangka menengah (RPJM) maupun jangka panjang (RPJP) mengikuti kaidah penyusunan yang diatur di dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) No. 050/2020/SJ tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan RPJP dan RPJM Daerah.

Amanat UU No. 25 tahun 2005 adalah Dokumen RPJP Daerah harus menjelaskan visi, misi dan arah pembangunan daerah serta proyeksi daerah untuk 20 tahun ke depan. Berbeda dengan Dokumen RPJM yang memuat visi dan misi pemerintah daerah yang berjangka menengah yaitu 5 tahun maka Dokumen RPJP memuat visi dan misi milik daerah yang berjangka waktu panjang yaitu 20 tahun.

Visi dan misi jangka panjang adalah milik **daerah** sementara visi dan misi jangka menengah adalah milik **kepala daerah** yang dapat berubah apabila kepala daerah berganti. Visi dan misi daerah yang bersifat jangka panjang dapat tercapai jika visi dan misi kepala daerah dapat bersinergi dan mendukung visi dan misi daerah. Oleh karena itu visi dan misi kepala daerah yang tertuang di dalam RPJM harus mengacu pada visi dan misi daerah yang terdapat di dalam RPJP.

SE Mendagri No.
050/2020/SJ tahun
2005 merupakan dasar
sistematika
penyusunan RPJPD
dan RPJMD

Acuan yang dapat menghubungkan visi dan misi jangka panjang dan jangka menengah itu adalah arah dan kebijakan pembangunan. Visi dan misi daerah harus dituangkan ke dalam arah dan kebijakan pembangunan periode lima tahunan. Arah dan kebijakan pembangunan menjadi patokan umum penyusunan visi, misi dan target pembangunan setiap kepala daerah. Sifat dari arah dan kebijakan pembangunan adalah komprehensif sehingga berisi kalimat-kalimat yang umum.

Visi dan Misi Daerah harus dirancang melalui proses yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Salah satu alat analisis adalah SWOT

Berdasarkan hasil olahan kuesioner SWOT dapat disusun visi dan misi pembangunan jangka panjang untuk Kota Pangkalpinang pada halaman berikutnya.

3.1. VISI:

“Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan yang berbasis perdagangan dan jasa dengan dukungan industri unggulan”

Indikator visi pembangunan Kota Pangkalpinang adalah meningkatnya kesejahteraan rakyat. Indikator yang paling tepat adalah meningkatnya pendapatan per kapita yang saat ini masih di bawah US\$ 1,000 (daerah *low income*) menjadi lebih dari US\$ 4,000 (daerah *upper middle income*). Target ini bisa tercapai apabila proyeksi pertumbuhan ekonomi dan pergeseran struktur dari pertanian dan pertambangan menuju sektor industri pengolahan pada 10 tahun pertama dan sektor sektor jasa (komunikasi dan keuangan) pada 10 tahun kedua tercapai dengan baik.

- Aktivitas ekonomi yang mendukung peningkatan kesejahteraan rakyat melalui penciptaan lapangan kerja menjadi target utama dalam 10 tahun pertama dengan memperbesar peranan sektor industri pengolahan. Agar penyerapan angkatan kerja dapat dioptimalkan sesuai kondisi pertumbuhan ekonominya maka pertumbuhan jumlah penduduk juga harus diperhatikan. Sektor industri unggulan akan terwujud di Kota Pangkalpinang apabila permasalahan infrastruktur seperti ketersediaan listrik dapat dipenuhi sesuai dengan proyeksi yang terus meningkat di masa-masa mendatang.

Hal yang sama juga dibutuhkan dari sektor utilitas lain yaitu ketersediaan air bersih. Sesuai dengan karakter daerah kepulauan yang dikelilingi oleh lautan maka persoalan suplai air bersih harus menjadi perhatian utama guna mendukung pertumbuhan sektor industri dan jasa. Model pengembangan air bersih yang saat ini dilakukan oleh Singapura yaitu pembersihan air laut menjadi air yang layak minum atau seperti Batam dengan reservoir air bersih dapat menjadi contoh usaha menjamin ketersediaan air bersih di Kota Pangkalpinang.

- Sektor ekonomi yang menjadi andalan jangka panjang ekonomi Kota Pangkalpinang dalam 10 tahun kedua adalah sektor jasa. Sektor ini dapat berkembang apabila sektor industri berkembang terlebih dahulu dengan menghasilkan nilai tambah yang memadai bagi peningkatan kesejahteraan dan penyerapan angkatan kerja.
- Apabila perekonomian Kota Pangkalpinang berkembang dengan baik sehingga mampu menyerap pertambahan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan maka pelayanan publik lainnya pun akan meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas. Pelayanan kesehatan dan kualitas pendidikan akan meningkat seiring dengan semakin sejahtera perekonomian Kota Pangkalpinang.
- Visi pembangunan Kota Pangkalpinang dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat akan membuat kota ini pantas menjadi Ibu Kota Provinsi yang dihuni oleh masyarakat yang sejahtera secara ekonomi, terdidik dan sehat. Dampak langsung dari meningkatnya ketiga indikator: ekonomi, pendidikan dan kesehatan adalah menurunannya tingkat kemiskinan. Hal ini tentu saja akan terwujud apabila pembangunan ekonomi Kota Pangkalpinang dijalankan dengan prinsip keadilan dan pemerataan.
- Terwujudnya masyarakat yang sejahtera, terdidik dan sehat di dalam masa 20 tahun ke depan akan menekan eksternalitas negatif dari pembangunan seperti kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan Daerah Kota Pangkalpinang. Dalam jangka panjang Kota Pangkalpinang diharapkan menjadi kota percontohan keberhasilan pembangunan ekonomi di Provinsi Bangka Belitung pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.

3.2. MISI:

1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pendapatan perkapita
2. Mewujudkan kesejahteraan yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar sektor publik dari pendidikan dan kesehatan
3. Mengurangi dampak negatif pembangunan ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan antargolongan dan antardaerah serta masalah pencemaran lingkungan
4. Menciptakan aparatur pemerintah jujur, bersih, berwibawa dan berkualitas melalui dukungan fasilitas yang memadai dan penegakkan supremasi hukum
5. Menegakkan hukum yang tidak diskriminatif dan tanpa membedakan kedudukan pelaku guna menekan tindakan kejahatan dan aksi ilegal
6. Menjalin kerjasama yang baik antardinas, antar pemerintah daerah dan antara pemerintah, dewan dan masyarakat guna mencapai masyarakat yang adil, makmur, aman dan damai
7. Memiliki modal utama pengembangan sektor perdagangan dan jasa melalui pembangunan sistem informasi dan ketersediaan data yang berkualitas terutama di dalam menghadapi era globalisasi
8. Meningkatkan peran para pengusaha melalui peningkatan jiwa kewirausahaan, wanita melalui kesetaraan gender dan wanita pengusaha di dalam meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan ekonomi
9. Menciptakan masyarakat dengan gaya hidup yang religius dan memiliki jiwa serta tubuh yang sehat
10. Menciptakan keharmonisan hidup melalui masyarakat taat hukum yang memiliki komitmen dan integritas tinggi terhadap pembangunan

3.3. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 20 TAHUN

3.3.1. Arah Kebijakan Pembangunan 5 Tahun Pertama

Tabel 3.1
Arah Kebijakan 5 tahun Pertama
Berdasarkan Olahan Kuesioner SWOT
Kota Pangkalpinang

No.	FAKTOR INTERNAL	Hasil Kali Rata-Rata Preferensi & Urgensi
1	Penetapan Kota Pangkalpinang sebagai ibu kota Provinsi Bangka Belitung	17.39
2	Potensi pengembangan Kota Pangkalpinang sebagai Kota Perdagangan	15.32
3	Potensi pengembangan Kota Pangkalpinang sebagai Kota Jasa	15.10
4	Pengaruh kondisi geografis Kota Pangkalpinang yang berada di wilayah Provinsi Bangka Belitung	14.00
5	Potensi Pengembangan Pusat Kota	13.89
6	Jumlah dan distribusi fasilitas infrastruktur dan suprastruktur yang mendukung kegiatan keagamaan di Kota Pangkalpinang	13.33
7	Dampak penerapan otonomi daerah terhadap pembangunan di Kota Pangkalpinang secara keseluruhan	13.33
8	Koordinasi antar dinas, badan dan unit lain di dalam tubuh organisasi pemerintah untuk proses pembangunan mulai dari perencanaan hingga evaluasi	12.85
9	Kerja sama dengan Pemda sekitar Bangka Belitung	12.06
10	Jumlah dan distribusi fasilitas kesehatan Kota Pangkalpinang	12.02
11	Daya dukung fasilitas kantor, yang tidak bergerak, seperti ruang kantor, komputer, printer	12.01
12	Rata-rata kualitas kerja aparatur Pemerintah Kota Pangkalpinang	11.93
13	Jumlah dan distribusi tenaga pendidik di Kota Pangkalpinang	11.66
14	Jumlah dan distribusi fasilitas pendidikan di Kota Pangkalpinang	11.66
15	Kualitas latar belakang pendidikan dan keterampilan calon pegawai di Kota Pangkalpinang	11.65
16	Pelayanan sistem administrasi kependudukan	11.59
17	Kemampuan aparatur pemerintah Kota Pangkalpinang dalam melaksanakan TUPOKSI Dinas/Unit Kerja/Badan	11.50

Sumber : Diolah Tim LPEM FEUI untuk RPJP-D Kota Pangkalpinang, 2006

Apabila kita menggunakan tabel di atas sebagai dasar kebijakan dan melakukan pengelompokkan maka kita akan memperoleh 6 bidang utama yang harus menjadi prioritas dalam 5 tahun pertama yaitu:

1. *Mengembangkan potensi Kota*. Pangkalpinang sebagai ibu kota Provinsi Bangka Belitung. Pengembangan ini dilakukan agar Kota Pangkalpinang dapat menjadi kota yang makmur. Penggerak perekonomian adalah **Sektor Perdagangan** dan **Sektor Jasa**. Perdagangan harus

dikembangkan terlebih dahulu hingga kemudian jasa menjadi sumber utama pembentukan nilai tambah Kota Pangkalpinang. Pengembangan potensi ini juga harus dilakukan dengan **mengoptimalkan** dampak **kondisi geografisnya** yang strategis.

2. *Fasilitas penunjang.* Dukungan fasilitas baik dari sisi kualitas maupun kuantitas adalah prioritas pertama. Fasilitas tersebut harus mendukung kegiatan pemerintah di dalam menjalankan tugasnya. Penyediaan dan usaha menjaga fasilitas yang sudah berkualitas untuk mendukung usaha pemerintah dalam pelayanan publik meliputi: fasilitas pendukung kegiatan **keagamaan, kesehatan**, fasilitas tidak bergerak untuk seluruh unit/dinas/badan/bagian/kantor DPRD seperti **alat komputer, printer, ruang dan kelengkapan kantor**.
3. *Pendidikan.* Bidang ini menjadi prioritas utama pada lima tahun pertama. Usaha untuk fokus pada pembangunan bidang pendidikan tidak hanya dilihat dari sisi jumlah dan sebaran **tenaga pendidik** namun juga **fasilitas pendidikan**.
4. *Kerjasama antar institusi pemerintah.* Kerjasama juga harus menjadi prioritas pertama di mana kerja sama ini dibagi menjadi dua yaitu **kerja sama internal antar dinas** di dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi. Kerja sama kedua adalah **kerja sama antar pemerintah daerah** dalam satu provinsi. Hal ini penting sehingga koordinasi pembangunan dapat tercapai dan mendukung pembangunan Provinsi Bangka Belitung.
5. *Kualitas Kerja Aparatur Pemerintah.* **Kualitas kerja** SDM pada **aparatur pemerintahan** juga menjadi fokus utama pada lima tahun pertama. Kinerja aparatur pemerintah juga dilihat dari kemampuan mereka **melaksanakan TUPOKSI** tempat ia bekerja dan *job desc* nya dengan baik. Hal yang perlu diperhatikan di dalam poin ini adalah menjaga agar input atau sumber daya manusia yang bekerja dijamin secara baik. Oleh karena itu pada proses seleksi **calon pegawai negeri** maka **latar belakang pendidikan dan keterampilan** harus dipertimbangkan dengan matang sebelum menerima mereka menjadi pegawai pemda.

6. *Pelayanan Sistem Administrasi Kependudukan.* Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah **sistem administrasi penduduk** baik dari sensus, pelayanan akta kelahiran dan kematian hingga pembuatan KTP harus dilakukan dengan profesional, cepat dan mudah.

3.3.2. Arah Kebijakan Pembangunan 5 Tahun Kedua

Tabel 3.2
Arah Kebijakan 5 tahun Kedua
Berdasarkan Olahan Kuesioner SWOT
Kota Pangkalpinang

No.	FAKTOR INTERNAL	Hasil Kali Rata-Rata Preferensi & Urgensi
1	Rata-rata kualitas kesehatan masyarakat Kota Pangkalpinang (umur harapan hidup, kualitas gizi, kematian bayi dll)	12.44
2	Peran media massa di Kota Pangkalpinang sebagai elemen demokrasi dan transparansi	12.37
3	Potensi pengembangan Kota Pangkalpinang sebagai Kota Industri	12.10
4	Dampak globalisasi dan peningkatan kualitas teknologi informasi terhadap usaha mengoptimalkan potensi pembangunan Kota Pangkalpinang	11.98
5	Pemerataan pertumbuhan ekonomi antarkecamatan di Kota Pangkalpinang	11.40
6	Sarana dan prasarana infrastruktur pembangunan di Kota Pangkalpinang	11.34
7	Tingkat kedisiplinan aparatur pemerintah Kota Pangkalpinang secara umum	11.16
8	Jumlah dan distribusi tenaga medis di Kota Pangkalpinang	11.06
9	Pelaksanaan sistem pengawasan melekat di Kota Pangkalpinang	10.85
10	Peranan Peraturan Daerah pada penciptaan iklim bisnis dan kaitannya dengan pemahaman pengusaha terhadap Perda tersebut	10.72
11	Penegakan supremasi hukum terhadap tertib administratif PNS	10.66
12	Ketersediaan Program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat Teknis) untuk mendukung kinerja pegawai pemerintah Kota Pangkalpinang	10.64
13	Sebaran jumlah penduduk antar kecamatan	10.52
14	Ketersediaan data base, jaringan informasi data dan akurasi	10.37
15	Jumlah dan distribusi fasilitas infrastruktur dan suprastruktur yang mendukung kegiatan olah raga di Kota Pangkalpinang	10.34
16	Ketersediaan Standar Pelayanan Masyarakat dan Implementasinya	10.22
17	Pembinaan sentra perdagangan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang	10.17
18	Fasilitas & sistem pengelolaan limbah domestik seperti sampah	10.02

Sumber : Diolah Tim LPEM FEUI untuk RPJP-D Kota Pangkalpinang, 2006

Bila kita melihat pada tabel di atas terdapat 18 faktor yang menjadi prioritas pembangunan tahap 5 tahun kedua. Secara garis besar kita dapat membagi ke dalam 6 Bidang yaitu:

1. *Kesehatan.* Jika pada lima tahun pertama pemerintah harus memperhatikan masalah jumlah dan distribusi **fasilitas kesehatan** maka apabila sudah memadai pada 5 tahun kedua pemerintah harus bergerak ke arah peningkatan jumlah dan distribusi **tenaga medis**. Harapannya adalah **kualitas kesehatan masyarakat** (umur harapan hidup, kualitas gizi dll) dapat menjadi semakin baik.

2. *Fasilitas.* Pembangunan fasilitas masih harus terus menjadi prioritas dan untuk tahap kedua **sarana dan prasarana infrastruktur pembangunan** seperti jalan raya, perumahan serta pengelolaan limbah domestik seperti sampah menjadi prioritas utama.
3. *Bidang Pemerintahan.* Bidang ini sudah menjadi prioritas pada 5 tahun pertama yaitu pada peningkatan kualitas kerja aparatur pemerintah. Pada tahap 5 tahun kedua prioritas bidang pemerintah adalah menjaga **tingkat kedisiplinan pegawai pemerintah** dengan **dukungan sistem pengawasan melekat** dan **penegakan supremasi hukum & tatib** bagi aparatur pemerintah. Harapannya adalah semakin baiknya **standar pelayanan publik**. Hal ini harus didukung dengan program **pendidikan dan pelatihan** yang memadai bagi **pegawai pemerintah daerah**.
4. *Ekonomi.* pada tahap 5 tahun pertama ekonomi fokus pada pembangunan Sektor Perdagangan dan Jasa maka pada tahap lima tahun kedua, Kota Pangkalpinang mulai berproduksi dan tidak hanya berdagang yaitu dengan menentukan sektor pengolahan melalui proses identifikasi dan **pengembangan industri unggulan**. Pembangunan Sektor Industri Unggulan tidak serta merta menghilangkan potensi Kota Pangkalpinang sebagai Kota Perdagangan karena pada tahap kedua ini pengembangan **Sentra Perdagangan** tetap menjadi prioritas. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa Kota Pangkalpinang pada dasarnya tetap sebagai kota perdagangan namun mulai didukung dengan **sektor industri unggul**. Guna mendukung cita-cita tersebut maka pemerintah harus menciptakan **iklim investasi yang kondusif** bagi pembangunan industri. Pemerintah harus merancang peraturan daerah yang mendukung pasar. Namun demikian pemerintah akan tetap fokus pada usaha mendorong pertumbuhan ekonomi semata dan **pemerataan pertumbuhan ekonomi tersebut antar kecamatan** di Kota Pangkalpinang. Bila pertumbuhan ekonomi dapat merata antar kecamatan maka **sebaran penduduk pun akan ikut merata** karena mobilisasi penduduk merupakan fungsi dari pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

5. *Teknologi Informasi*. Pembangunan sebuah kota perdagangan dan jasa di dalam era globalisasi harus didukung dengan pengembangan **teknologi informasi yang memadai**. Hal ini juga mendukung penyajian **data base yang valid dan akurat**.
6. *Peningkatan peran media masa*. Transparansi dan akuntabilitas pemerintah tidak terlepas dari besarnya peran media masa. Oleh karena itu kebebasan untuk menyampaikan opini secara benar dan bertanggung jawab dari media masa sebagai *watch dog* adalah penting. **Kebebasan pers** merupakan salah satu pilar utama demokrasi (*freedom of expression*, Robert Dahl).

3.3.3. Arah Kebijakan Pembangunan 5 Tahun Ketiga

Tabel 3.3
Arah Kebijakan 5 tahun Ketiga
Berdasarkan Olahan Kuesioner SWOT
Kota Pangkalpinang

No.	FAKTOR INTERNAL	Hasil Kali Rata-Rata Preferensi & Urgensi
1	Hubungan profesionalisme kerja antara DPRD dan Pemerintah Kota Pangkalpinang	11.47
2	Daya dukung utilitas dasar seperti jaringan listrik dan air bersih	11.42
3	Kegiatan yang bertentangan dengan ketertiban dan keamanan seperti narkoba, tingkat kejahatan	11.36
4	Kejelasan dan Ketersediaan TUPOKSI di setiap dinas Pemda Kota Pangkalpinang	11.35
5	Peran pengusaha di dalam pembangunan Kota Pangkalpinang	11.29
6	Ketersediaan jaringan teknologi Informasi seperti internet dan telp	11.26
7	Alokasi anggaran untuk program yang dijalankan oleh dinas	11.02
8	Kesesuaian jabatan struktural dengan ketersediaan SDM	10.95
9	Tingkat kepastian hukum bagi para investor	10.91
10	Partisipasi masyarakat di dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di Kota Pangkalpinang	10.86
11	Pembinaan sentra pelayanan jasa oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang	10.67
12	Penanganan kasus-kasus sengketa lahan seperti penyelesaian lahan sengketa dan ganti rugi oleh Pemda Kota	10.41
13	Jumlah PNS dan alokasi dana yang mendukung aktivitas PNS di Kota Pangkalpinang	10.38
14	Eksternalitas pembangunan di Kota Pangkalpinang (Kemiskinan, Pedagang Kaki Lima, rumah liar & Ketimpangan Distribusi Pendapatan)	10.08
15	Ketersediaan dana operasional untuk mendukung aktivitas DPRD Kota Pangkalpinang (Proposal dari LSM, Penyambutan tamu, Pansus,dll)	9.94
16	Emansipasi perempuan di dalam pembangunan Kota Pangkalpinang	9.83
17	Dampak permasalahan sampah di Kota Pangkalpinang	9.57

Sumber : Diolah Tim LPEM FEUI untuk RPJP-D Kota Pangkalpinang, 2006

Pada tahap 5 tahun ketiga pembangunan Kota Pangkalpinang, pemerintah memiliki prioritas pada 6 bidang yaitu :

1. *Kerja sama.* Bidang ini menjadi prioritas pada 5 tahun pertama pembangunan dan mencakup kerja sama antar dinas dan kerja sama antar pemerintah daerah. Saat ini yang perlu diperhatikan yaitu hubungan antara pemerintah dan DPRD yang harus tetap terjaga secara profesional.
2. *Ekonomi.* Bidang ekonomi merupakan bidang yang mendominasi perencanaan pembangunan jangka panjang. Tidak hanya di Kota Pangkalpinang namun terjadi di hampir seluruh negara/daerah. Tujuan utamanya adalah kesejahteraan karena semakin sejahtera secara ekonomi sebuah Bangsa maka semakin tenteram hidup di negara tersebut. Hal yang perlu diperhatikan di dalam 5 tahun ketiga ini adalah: **daya dukung utilitas** seperti listrik, gas dan air. Selain itu pemerintah harus memperhatikan kelayakan dan kesinambungan program dan **alokasi anggarannya**. Kota Pangkalpinang pada 5 tahun ketiga harus semakin memantapkan diri sebagai kota yang makmur secara ekonomi. Mengapa? Karena **sentra perdagangan** sudah diperkuat sejak 5 tahun pertama dan pengembangan **industri unggulan** pun sudah dikembangkan sejak 5 tahun kedua. Kemakmuran Kota Pangkalpinang diharapkan mampu menekan angka kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan antargolongan dan bentuk eksternalitas negatif pembangunan lainnya. Pada tahap ketiga ini Kota Pangkalpinang telah menjadi **daerah yang makmur**. Semakin makmurnya sebuah daerah diharapkan mampu **mengurangi dampak eksternalitas pembangunan** seperti kemiskinan, rumah liar, ketimpangan distribusi pendapatan dll. Termasuk masalah penanganan soal lingkungan hidup seperti **pengelolaan sampah**.
3. *Peran dan kontribusi.* Pada tahap 5 tahun ketiga pembangunan Kota Pangkalpinang memasuki tahap *empowerment*. Peranan pelaku pembangunan selain pemerintah yaitu: **pengusaha, wanita dan partisipasi masyarakat** secara umum di dalam proses pembangunan. Hal ini penting agar manfaat dan keuntungan dari keberhasilan pembangunan dapat terus terjaga dan tetap berkesinambungan.

4. *Pemerintah.* Bidang pemerintahan masih menjadi prioritas pada periode 5 tahun ketiga. Bila pada tahap 5 tahun pertama pemerintah memiliki prioritas pada peningkatan kualitas kerja aparat dan pada tahap 5 tahun kedua pada tingkat kedisiplinan aparat maka pada tahap 5 tahun ketiga ini pemerintah lebih fokus pada: peningkatan **sistem penjenjangan karir** yang baik untuk aparat dengan **Tupoksi yang jelas**. **Jumlah pegawai pemda** harus betul-betul memperhatikan kebutuhan pelayanan publik sehingga tidak terjadi 'kekurangan' atau 'kelebihan' dalam jumlah tersebut. **Alokasi anggaran untuk pemerintah dan dewan** harus tetap terjaga dengan baik dan memadai sehingga pemerintah dan dewan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.
5. *Permasalahan.* Ada dua permasalahan pokok yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam 5 tahun ketiga pembangunan yaitu keamanan dan eksternalitas negatif. Masalah keamanan meliputi **penggunaan narkoba dan tindak kejahatan**. Diperlukan sebuah supremasi hukum yang tegas untuk menindak pelaku kejahatan tersebut.
6. *Sistem Informasi.* Sama seperti tahun sebelumnya, maka sistem informasi masih menjadi prioritas. **Jaringan informasi** yang berkualitas dan baik akan mendukung kegiatan perekonomian Kota Pangkalpinang yang sebagian besar digerakkan oleh sektor jasa dan perdagangan yang sangat membutuhkan mobilitas informasi yang tinggi.

3.3.4. Arah Kebijakan Pembangunan 5 Tahun Keempat

Tabel 3.4
Arah Kebijakan 5 tahun Keempat
Berdasarkan Olahan Kuesioner SWOT
Kota Pangkalpinang

No.	FAKTOR INTERNAL	Hasil Kali Rata-Rata Preferensi & Urgensi
1	Kesesuaian jabatan fungsi ional dengan ketersediaan SDM	9.89
2	Ketersediaan hasil-hasil dan kualitas penelitian untuk mendukung pembangunan Kota Pangkalpinang	9.72
3	Kesesuaian penempatan personil antara latar belakang pendidikan dengan jenis pekerjaannya	9.67
4	Penanganan kasus-kasus yang menyangkut perburuhan di Kota Pangkalpinang oleh pemerintah kota	9.60
5	Program dan kegiatan pemberdayaan pemuda di Kota Pangkalpinang	9.59
6	Jumlah Pegawai Negeri Sipil dibandingkan tingkat kebutuhannya	9.47
7	Daya dukung fasilitas kantor, yang bergerak, seperti kendaraan dinas	9.39
8	Program dan kegiatan pemberdayaan perempuan di Kota Pangkalpinang	9.24
9	Penanganan masalah <u>genangan</u> air di Kota Pangkalpinang	8.94
10	Pembinaan sentra industri oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang	8.92
11	Dampak <u>genangan</u> air di Kota Pangkalpinang	8.88
12	Kesesuaian permintaan lapangan kerja dan jumlah pencari kerja di Kota Pangkalpinang	8.53
13	Kebijakan Ketenagakerjaan (transportasi murah untuk buruh, tingkat upah, peran serikat pekerja dll)	8.49
14	Kesadaran pengusaha akan kelestarian alam dan lingkungan	8.42
15	Penanganan terhadap kasus-kasus ilegal dalam pemanfaatan sumber daya alam Kota Pangkalpinang	8.25
16	Dampak lingkungan akibat pertambangan dari wilayah administratif di luar Kota Pangkalpinang	7.43
17	Masalah lingkungan dari kegiatan pertambangan terhadap pembangunan Kota Pangkalpinang	7.23

Sumber : Diolah Tim LPEM FEUI untuk RPJP-D Kota Pangkalpinang, 2006

Setelah mencapai kemakmuran secara ekonomi pada tahap 5 tahun ketiga atau 15 tahun setelah proses pembangunan jangka panjang tercapai, Kota Pangkalpinang-seperti umumnya-kota yang baru sejahtera adalah masalah dampak eksternalitas pembangunan yang semakin besar. Secara umum terdapat empat bidang yang menjadi prioritas yaitu :

1. *Pemerintahan*. Bidang ini selalu menjadi prioritas sepanjang proses pembangunan. Permasalahan yang harus diperhatikan adalah kesesuaian antara **kebutuhan tenaga fungsi**ional dan jumlah tenaga yang ada. Penempatan pegawai pun harus memperhatikan **kesesuaian latar belakang pendidikan** dan jabatannya. Pada tahap keempat pembangunan jangka panjang, pemerintah perlu melakukan **evaluasi**

dan mengukur apakah **jumlah pegawai pemda** saat ini sudah sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik. Terdapat dua hal utama yang juga penting untuk diperhatikan yaitu pertama: dukungan **fasilitas kantor** terutama yang bergerak seperti **mobil** dan kedua: **ketersediaan hasil-hasil kajian** dan penelitian juga akan menjadi prioritas terutama di dalam usaha merancang pembangunan jangka panjang tahap kedua.

2. *Ekonomi*. Pembangunan sektor perekonomian tetap menjadi prioritas kendati diramalkan pada tahun ke 15 Kota Pangkalpinang akan menjadi kota yang makmur. Namun permasalahan pembangunan ekonomi tidak serta merta menjadi hilang. Permasalahan diduga timbul dari Sektor Industri Pengolahan yaitu meliputi: **masalah dari kasus-kasus perburuhan, laju pengangguran**, dan tuntutan tersedianya **fasilitas kerja memadai bagi kaum buruh**.
3. *Lingkungan Hidup*. Masalah lingkungan hidup akan semakin besar pada tahap 5 tahun keempat atau pada tahun terakhir pembangunan jangka panjang pertama. Masalah lingkungan hidup yang kemungkinan terjadi adalah: **terganggunya ekosistem akibat eksploitasi sumber daya alam** & lingkungan terutama dari **kegiatan ilegal** yang hanya mengejar keuntungan saat ini tanpa memperhatikan dampak jangka panjang bagi lingkungan. Salah satu sebabnya adalah **rendahnya kesadaran pengusaha** dalam masalah lingkungan dan pencemarannya. Pemerintah juga dapat lalai dalam mengatasi manajemen lingkungan. Salah satunya adalah masalah penanganan genangan air sebagai sumber pencemaran lingkungan.

Bagaimana Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah ini disusun?.

3.4. PENJELASAN DASAR AKADEMIK PENYUSUNAN VISI, MISI DAN ARAH PEMBANGUNAN

3.4.1. Konsistensi Visi, Misi Jangka Panjang dan Menengah

Bagaimana merancang sebuah konsep visi dan misi jangka panjang dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah sehingga perencanaan jangka panjang yang komprehensif mampu konsisten dan berkesinambungan

dengan perencanaan jangka menengah?

Jawabannya secara eksplisit dijelaskan di dalam SE Mendagri tentang perencanaan dimana visi dan misi serta arah kebijakan RPJP Daerah disusun dengan **prinsip-prinsip** berikut:

- a. Didahului dengan sosialisasi, konsultasi publik dan penjangkaran aspirasi pemangku kepentingan atas rancangan RPJP Daerah
- b. Disusun berdasarkan data (Kondisi dan Proyeksi Daerah) dan dokumen hasil sosialisasi, konsultasi publik dan penjangkaran aspirasi
- c. Dibuat berdasarkan kondisi umum daerah yang memuat **fungsi** daerah (kehidupan internal) dan **peran** daerah (pengaruh eksternal)

Penjelasan *poin pertama* di atas menunjukkan bahwa sebelum disusun sebuah metodologi atau pendekatan untuk merancang visi, misi dan arah kebijakan pembangunan, pemerintah dan perencana harus menjalani proses sosialisasi, konsultasi publik dan penjangkaran aspirasi pemangku kepentingan atas rancangan RPJP Daerah. Proses ini dilakukan secara terbuka dan melibatkan para *stakeholders* yaitu publik atau masyarakat. Kata 'pemangku kepentingan' memiliki arti bahwa publik di dalam hal ini harus terwakili. Oleh karena itu penjangkaran aspirasi dapat dilakukan dengan mengajak representasi dari publik seperti aparat pemerintah, pejabat publik, anggota dewan, kalangan akademisi, LSM dan tokoh masyarakat.

Poin kedua menjelaskan bahwa Dokumen RPJP disusun berdasarkan data sekunder baik kondisi saat ini (*existing condition*) maupun kondisi masa mendatang (*forecasting*). Hasil analisis data sekunder harus mempertimbangkan hasil dari sosialisasi, konsultasi publik dan penjangkaran aspirasi yang merupakan data primer. Dokumen RPJP-D menggunakan dua pendekatan olahan data primer dan sekunder.

Poin ketiga menjelaskan bahwa daerah harus dilihat dari dua kondisi yaitu internal dan eksternal. Berdasarkan pemahaman strategis maka internal diartikan sebagai sesuatu yang bisa dikendalikan sementara eksternal adalah sesuatu di luar kendali atau faktor yang *given*. Pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang memegang kendali?

Bila kita lihat pada aktor pembangunan (pemerintah, masyarakat dan pengusaha) serta mempertimbangkan siapa pemberi pelayanan publik maka pemegang kendali di dalam pembangunan adalah pemerintah. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat atau perusahaan. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan menerapkan *fair play* di dalam proses pembangunan. Oleh karena itu maka pemerintah memiliki kemampuan memaksa (*coercive power*) melalui peraturan hukum sementara pengusaha dan masyarakat memiliki fungsi kerja sama (*cooperative*). Analisis internal dan eksternal di dalam dokumen RPJP-D menggunakan pemerintah sebagai pemegang kendali sehingga faktor internal dan eksternal dilihat dari sisi pemerintah.

3.4.2. Prinsip Penyusunan Visi, Misi & Arah Pembangunan

Di dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri di atas dijelaskan bahwa ketiga prinsip disusun melalui 3 langkah strategis yaitu:

- a. Mengumpulkan informasi yang diperlukan baik **informasi normatif** (rumusan visi daerah **yang pernah disusun**, nilai-nilai lokal daerah, dan informasi lokal lainnya); **informasi teknis** (kondisi daerah saat ini dan proyeksi ke depan); **informasi visioner** (masukan tokoh masyarakat, pakar, akademisi)
- b. Merumuskan pilihan visi dengan pendekatan: **singkat, padat, jelas** dan **mudah dimengerti**, sesuai dengan **potensi** dan **kecenderungan proyeksi pertumbuhan daerah, realistis, terukur** dan memperhatikan **fungsi** dan **peran** daerah
- c. Membuat **scoring/bobot** dari informasi di atas dengan **metode suara terbanyak**

Pada *langkah pertama* diketahui bahwa sumber informasi untuk menyusun visi, misi dan arah kebijakan pembangunan terdiri dari 3 bentuk yaitu: informasi normatif dari kajian terdahulu dan nilai-nilai lokal atau tempatan. Informasi ini penting karena setiap daerah memiliki karakter tersendiri baik dari sisi cara pandang terhadap hidup, nilai-nilai leluhur, religiusitas, adat istiadat yang pada intinya adalah berbeda secara budaya.

Misalnya visi, misi dan arah pembangunan di Provinsi Papua harus diolah berbeda dengan Provinsi Bangka Belitung karena budaya luhur masyarakatnya berbeda. Perbedaan ini merupakan kekayaan Bangsa Indonesia karena justru karena perbedaan tercipta sebuah sinergi yang saling mengisi.

Informasi normatif dapat diperoleh dengan metode pendekatan partisipatif pembangunan masyarakat melalui pengamatan langsung terhadap pola hidup mereka. Informasi ini juga bisa diperoleh dengan mewawancarai sampel masyarakat seperti para sesepuh dan tokoh masyarakat, akademisi dan individu yang dianggap pakar. Metode ini sekaligus digunakan untuk mendapatkan informasi visioner.

Informasi visioner yang diperoleh dari tokoh masyarakat tidak terlepas dari karakter Bangsa Indonesia yang memiliki budaya musyawarah (*consultation*) dan mufakat (*consensus*). Budaya ini lahir dengan adanya tokoh di tengah masyarakat. Banyak konflik antar kelompok masyarakat yang dapat diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat yang dipimpin antar tokoh masyarakat. Kekuatan paksaan dari penegakan hukum terkadang tidak efektif meredam konflik tanpa melibatkan kesepakatan para tokoh masyarakat. Terutama untuk menghindari dendam. Tokoh masyarakat adalah seseorang yang dihormati karena dianggap sebagai sesepuh oleh masyarakat tempatan. Mereka adalah salah satu sumber informasi normatif.

Metode yang paling baik untuk memperoleh informasi normatif yang optimal adalah kombinasi antara informasi normatif melalui pengamatan langsung dengan informasi visioner melalui wawancara dengan para tokoh masyarakat.

Sementara itu informasi teknis diperoleh melalui pengolahan data sekunder baik untuk ilustrasi kondisi saat ini maupun proyeksi masa depan.

Langkah kedua memberikan filosofi dasar bahwa visi, misi dan arah pembangunan harus singkat, padat, jelas dan mudah dimengerti. Kalimat yang tersusun bukan simbol yang utopia atau hanya pada dunia khayalan namun sesuatu yang terukur dan realistis. Contoh visi yang memiliki ciri tersebut banyak kita lihat pada perusahaan besar dunia seperti maskapai *Air Asia*: *Everybody can fly* (sehingga kebijakannya adalah harga tiket murah), Majalah

Tempo: Enak dibaca dan perlu (sehingga informasi disampaikan dengan bahasa yang ringan namun sangat berbobot bahkan cenderung berbahaya), Acara *Liputan 6 SCTV* :Liputan Tajam, Terpercaya (sehingga membuat masyarakat mendapatkan informasi yang detil dan terbuka dari sumber yang valid), maskapai *Thai Airways: smooth as silk* (sehingga di dalam penerbangannya semaksimal mungkin menghindari *turbulence*). Contoh-contoh visi di atas dapat diukur dalam arti dapat dibuktikan secara empiris. Langkah kedua juga mempertimbangkan fungsi atau faktor internal dan peran atau faktor eksternal dari daerah. Dalam hal ini adalah faktor yang dapat dikendalikan pemerintah (internal) dan tidak dapat dikendalikan (eksternal).

Langkah ketiga yaitu pemberian scoring/bobot. Langkah ini memberikan acuan bahwa semua sumber informasi terutama informasi normatif dan visioner harus terukur. Hal ini untuk menghindari saran pada prinsip kedua bahwa visi, misi dan arah kebijakan pembangunan bukan sesuatu yang utopia namun terukur dan realistis atau dapat dicapai. Hasil dari pembobotan dapat disatukan dengan hasil pengolahan informasi teknis dan proyeksi sehingga diperoleh sinergi analisis yang dapat memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi sebuah daerah. Sesuai dengan prinsip demokrasi maka pembobotan harus diuji melalui suara terbanyak. Artinya setiap masukan yang diperoleh ditanyakan kembali kepada *stakeholders* atau masyarakat.

Agar diperoleh gambaran yang tidak bias maka *stakeholders* sebaiknya dipilih mereka yang benar-benar memahami persoalan pembangunan di daerahnya. Di sini kita menggunakan metode demokrasi perwakilan (*representative democracy*) di mana uji suara terbanyak atas setiap masukan dilakukan oleh pihak yang kompeten (*expert choice*) seperti tokoh masyarakat, pejabat publik seperti camat, kalangan akademisi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, asosiasi pengusaha, aparatur pemerintah dan kalangan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Metode pengumpulan responden adalah menggunakan sampel. Jumlah sampel yang diambil untuk mewakili populasi responden diukur berdasarkan tingkat kepercayaan 95% berdasarkan hasil studi Krejcie dan Morgan pada tahun 1970.

Pertanyaan selanjutnya, metode apakah yang paling mendekati ciri-ciri:

1. Menggunakan scoring/bobot
2. Menggunakan sampel responden representatif
3. Menggunakan pakar sebagai responden (*expert choice*)
4. Mempertimbangkan faktor internal dan eksternal
5. Menampung aspirasi sebanyak mungkin dari sampel *shareholders*
6. Mampu menjadi dasar penentuan visi, misi dan arah pembangunan
7. Menggunakan informasi normatif dan visioner
8. Memanfaatkan metode suara terbanyak

Jawabannya ada pada metode strategi yang terdapat pada disiplin ilmu manajemen. Metode ini dinamakan metode SWOT (Strenght, Weakness, Opportunity dan Threat). Metode ini mampu menampung kedelapan unsur yang diamanatkan oleh SE Mendagri 050/2020/SJ tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan RPJP dan RPJM Daerah.

3.4.3. Analisis SWOT

Visi daerah disusun dengan merangkai faktor internal (fungsi daerah) dan eksternal (peran daerah) ke dalam kalimat visioner. Misi disusun sebagai penjabaran dari visi. Visi dan misi daerah disusun berdasarkan aspirasi dari para pelaku pembangunan.

Di dalam dokumen RPJP Daerah ini kita menggunakan analisis SWOT karena sesuai dengan 3 prinsip dan 3 langkah strategis yang dijelaskan di atas. Analisis SWOT disusun dengan sebelumnya menyebarkan kuesioner. Penggunaan kuesioner inilah jawaban atas bobot/scoring dan suara terbanyak. Mengapa? Karena kuesioner SWOT yang disusun oleh Tim LPEM FEUI menggunakan scoring skala untuk setiap masukan (faktor) yang ditanyakan kepada responden. Kuesioner SWOT juga menjawab faktor internal (fungsi) dan eksternal (peran) yang diamanatkan di dalam surat edaran Mendagri di atas. Analisis SWOT pada harfiahnya merupakan analisis internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan tantangan) atas pelaksana, dalam hal ini adalah pemerintah sebagai pelayan publik. Kuesioner dibuat berdasarkan masukan faktor internal (disebut fungsi) dan faktor eksternal (disebut peran). Kuesioner disebarkan kepada seluruh dinas/badan/kantor dan tokoh masyarakat, para pakar dan kaum akademisi.

Metode SWOT adalah salah satu alat analisis disiplin ilmu manajemen strategi yang bermanfaat bagi setiap institusi untuk membuat strategi. Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, and Threat) merupakan analisis terhadap faktor internal dan eksternal yang melekat pada satu objek atau organisasi. Sampai saat ini, paling tidak dikenal 5 (lima) teknik analisa yang dikembangkan untuk membantu perencana dalam proses pembuatan strategi. Teknik-teknik tersebut adalah : Analisa Kesenjangan, Matriks Strategi Umum, *Boston Consulting Group*, Daur Kehidupan Produk dan Matriks SWOT. Faktor internal adalah faktor yang dapat dikendalikan oleh organisasi tersebut sementara faktor eksternal adalah faktor yang bersifat *given* dan tidak dapat dikendalikan oleh organisasi tersebut. Namun demikian faktor internal dapat merupakan faktor yang berada di dalam suatu daerah atau negara sementara faktor eksternal adalah faktor yang dipengaruhi oleh unsur-unsur di luar daerah atau negara yang bersangkutan.

Analisis SWOT ini berguna untuk melihat kekuatan dan kelemahan dari sisi internal serta melihat ancaman dan peluang dari sisi eksternal. Dari kombinasi faktor internal dan eksternal ini diharapkan kita dapat mengetahui poin-poin penting yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan prioritas.

Pada awalnya metode ini digunakan oleh pihak swasta untuk merancang strategi agar usahanya dapat menghasilkan profit yang besar. Namun kemudian analisis ini juga digunakan oleh pemerintah kendati tujuan utamanya bukan untuk menghasilkan profit. Pemerintah menggunakan metode ini untuk mengenal lebih dekat kekuatan dan kelemahan serta memperhatikan peluang dan ancaman yang mungkin timbul di dalam usahanya untuk memberikan pelayanan publik yang optimal.

Sasaran profit yang optimal jika dilihat dari sisi pemerintah adalah bagaimana menghasilkan sebuah kebijakan baik dari program maupun proyek publik yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dengan biaya yang harus ditanggung masyarakat serendah-rendahnya. Konsep biaya di sini tidak hanya biaya eksplisit namun juga biaya peluang (*opportunity cost*). Konsep biaya peluang inilah yang memberikan kesempatan pada pemerintah untuk merancang kebijakan terutama visi, misi dan arah berdasarkan prioritas.

Tidak ada satu pemerintah pun yang mampu memenuhi semua keinginannya dengan anggaran yang ada. Sebesar apa pun anggaran yang dimiliki, ia selalu berhadapan dengan keinginan yang tidak terbatas. Konsep ini merupakan konsep dasar yang melahirkan prioritas. Prioritas disusun berdasarkan tingkat preferensi kepentingan dan waktu. Artinya sebuah kebijakan akan dianggap penting dan didahulukan apabila mayoritas *stakeholders* membutuhkannya. Pilihan atas kebijakan tersebut dilakukan setelah membandingkan dengan bentuk kebijakan lainnya. Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah dimensi waktu. Artinya sebuah kebijakan akan didahulukan apabila *stakeholders* menganggap bahwa kebijakan tersebut penting untuk dilaksanakan. Semakin penting sebuah kebijakan dari sisi waktu maka semakin *urgent* kebijakan tersebut sehingga artinya semakin prioritas.

Kebijakan yang akan dihasilkan dari penerapan metode SWOT ini adalah kebijakan umum yang lahir dari faktor-faktor yang dipilih. Faktor ini memiliki dua dimensi preferensi dan waktu. Preferensi dilihat dari dua sisi internal (dapat dikendalikan pemerintah tempatan) dan eksternal (tidak dapat dikendalikan pemerintah tempatan). Sementara dimensi waktu menggunakan tingkat urgensi sebagai patokan. Semakin urgen maka semakin penting kebijakan itu untuk didahulukan. Faktor merupakan dasar dari kebijakan. Dengan menimbang bahwa tujuan pembuatan, penyebaran dan pengolahan kuesioner ini adalah untuk menggali visi, misi dan arah kebijakan pembangunan untuk periode jangka panjang 20 tahunan maka faktor yang digunakan adalah faktor yang bersifat umum dan berlaku setidaknya dalam 20 tahun ke depan.

Hal lain yang patut dipertimbangkan adalah faktor tersebut harus bersifat netral. Artinya ketika ditanyakan di dalam kuesioner maka faktor tersebut harus berada dalam bentuk kalimat netral dan bukan mengarahkan. Misalnya ketika kita mengidentifikasi bahwa sebuah jumlah kendaraan dinas di daerah X kurang maka pertanyaan pada kuesioner SWOT tidak boleh "Kurangya jumlah kendaraan dinas". Pertanyaan sebaiknya netral seperti "Jumlah kendaraan pendukung kegiatan di instansi saudara". Pertanyaan ini kemudian dilengkapi dengan skala misalnya 1-5 di mana 1 adalah sangat buruk hingga 5 adalah sangat baik. Preferensi sangat buruk sebetulnya bisa mengandung dua dugaan

yaitu kekurangan dan berlebihan. Agar dugaan menjadi tepat maka setiap pertanyaan berskala ini akan dilengkapi dengan kolom komentar. Bentuk kuesioner dapat dilihat pada **Lampiran Kuesioner SWOT**.

Metode yang digunakan untuk mengolah kuesioner SWOT adalah metode rata-rata. Hal ini dilakukan agar kita mendapatkan preferensi dalam bentuk skala. Metode ini serupa dengan amanat Surat Edaran Mendagri tersebut dalam hal metode dengan suara terbanyak. Semakin banyak suara responden yang memberikan nilai tinggi atas sebuah faktor maka semakin besar kemungkinan faktor tersebut menjadi prioritas. Metode ini dipilih karena analisis SWOT bergantung pada preferensi dan preferensi bersifat relatif. Relatifitas ini baru dapat kita dekati dengan baik setelah kita mengukur rata-rata pendapat responden bukan mayoritas pendapat. Jika kita hanya mengukur mayoritas pendapat maka preferensi yang menang adalah preferensi mayoritas dan hal ini akan menghilangkan unsur subyektifitas yang relatif tersebut.

Dengan mempertimbangkan penjelasan di atas maka pilihan menggunakan SWOT merupakan sebuah pilihan tepat untuk memetakan preferensi para pelaku pembangunan terhadap apa yang mereka harapkan di masa 20 tahun mendatang.

3.4.4. Pengolahan Kuesioner SWOT

Langkah Pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi faktor internal dan eksternal pembangunan di Kota Pangkalpinang. Masukan ini diperoleh dari aparatur pemerintah, tokoh masyarakat dan kalangan akademisi melalui hasil kajian tentang analisis pembangunan dari dokumen yang sudah ada sebelumnya. Masukan ini kemudian diperluas berdasarkan hasil diskusi Tim LPEM FEUI bersama tim fasilitator dari pihak pemerintah.

Masukan internal dan eksternal tersebut dibagi ke dalam 7 bidang sesuai dengan SE Mendagri sebagai berikut:

1. Bidang Lingkungan Hidup
2. Bidang Demografi/Kependudukan
3. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA)
4. Bidang Sosial Budaya dan Politik

5. Bidang Sarana dan Prasarana
6. Bidang Pemerintahan
7. Bidang Data dan Informasi

Rincian selengkapnya dari faktor internal dan eksternal dapat dilihat pada lampiran 1 kuesioner SWOT. Setelah kuesioner tersusun maka langkah kedua yang dilakukan adalah menyebarkan kuesioner SWOT pada *stakeholders* Kota Pangkalpinang dengan menggunakan prinsip *representative democracy* dan *expert choice*. Artinya responden yang dipilih adalah responden yang mewakili populasi dengan tingkat pemahaman yang baik dan komprehensif atas pembangunan Kota Pangkalpinang.

Seperti diketahui ada banyak sekali faktor yang dianggap sebagai faktor kekuatan di sisi internal dan peluang di sisi eksternal demikian juga faktor kelemahan dan ancaman namun pada umumnya kita sering sekali merasa bingung mana yang harus kita prioritaskan. Bahkan sebelum kita menentukan prioritas, kita juga sering ragu untuk menentukan apakah sebuah faktor yang kita miliki itu adalah kategori kekuatan atau justru kelemahan atau apakah itu merupakan peluang atau ancaman. Oleh karena itu analisis SWOT dapat kita gunakan untuk memecahkan persoalan tersebut. Hal ini disebabkan karena SWOT dapat mengidentifikasi apakah sebuah faktor internal masuk kategori kekuatan atau masuk kategori kelemahan. Di samping itu analisis SWOT bermanfaat untuk menentukan apakah faktor tersebut merupakan ancaman atau peluang.

Perbedaan mendasar SWOT dengan analisis kualitatif serupa seperti AHP (*Analytical Hierarchy Process*) adalah pada proses penentuan prioritas. Bila AHP sebelumnya sudah memiliki prioritas berdasarkan pilihan pembuat kuesioner maka SWOT memberikan kebebasan kepada responden untuk merumuskan faktor-faktor sekaligus mencari prioritas pilihan berdasarkan preferensi responden.

Setelah mengetahui peta kategori atas faktor-faktor yang ada ke dalam susunan SWOT maka fungsi selanjutnya adalah mencari posisi di mana strategi dari kombinasi keempat faktor-faktor tersebut berada. Kombinasi antara faktor S-W dari sisi internal akan beririsan dengan faktor O-T dari sisi eksternal.

Hasilnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.5
Kombinasi SWOT dan Strategi yang Disesuaikan

	Strength	Weakness
Opportunity	SO : Menggunakan kekuatan untuk menangkap kesempatan	WO : Mengatasi kelemahan dengan mengambil kesempatan
Threat	ST : Menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman	WT : Meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Dari irisan faktor-faktor ini kita dapat menentukan di mana letak strategi organisasi/daerah kita apakah S-O, S-T, W-O atau W-T. Dari irisan ini kita dapat mengurai kembali faktor-faktor apa yang masuk di dalam area strategi tersebut. Berdasarkan uraian faktor-faktor terpilih inilah kita dapat membuat prioritas berdasarkan tingkat kepentingan (urgensi). Selanjutnya kita dapat membuat analisis yang sistematis berdasarkan derajat kepentingan masing-masing faktor yang telah dipilih.

Secara rinci proses rancangan kuesioner SWOT dan pemilihan responden di Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut :

1. Analisis SWOT yang digunakan di dalam studi ini adalah merupakan pengembangan dari analisis SWOT di dalam manajemen strategi. Analisis ini telah dilakukan LPEM setidaknya dalam 4 tahun terakhir di dalam membuat prioritas pembangunan daerah ketika menyusun Propeda (Program Pembangunan Daerah)¹.
2. Analisis SWOT mempergunakan kuesioner sebagai alat analisis. Kuesioner tersebut disusun berdasarkan faktor-faktor yang sebelumnya telah diperoleh pembuat kuesioner. Ada dua cara yang dapat dilakukan yaitu :
1) Mempelajari bahan-bahan atau dokumen studi yang pernah dilakukan sebelumnya terhadap objek studi dan atau 2) Melakukan proses

¹

Setidaknya dalam 4 tahun terakhir, LPEM telah menggunakan analisis SWOT untuk menyusun strategi pembangunan pada 5 daerah yaitu: Propeda Kabupaten Karawang (2000-2005) yang dibuat tahun 2000, Propeda Provinsi Bangka Belitung (2002-2006) yang dibuat tahun 2001, Propeda Kabupaten Indragiri Hilir (2002-2005) yang dibuat tahun 2002, Propeda Kabupaten Pandeglang (2002-2005) yang dibuat tahun 2002 dan Propeda Provinsi DKI Jakarta (2003-2007) yang dibuat tahun 2003. Kini analisis SWOT berskala digunakan oleh LPEM FEUI untuk pembuatan dokumen RPJP. Seperti RPJP Provinsi Kepulauan Riau (2005-2025) dan RPJP Kota Batam (2005-2025).

wawancara dengan kuesioner terbuka kepada calon responden untuk mengetahui faktor-faktor internal dan eksternal apa yang mereka hadapi.

3. Setelah mendapatkan faktor internal dan eksternal, kita perlu membuat 'generalisasi' atas faktor-faktor tersebut dengan membuat kalimat netral pada saat penyusunan kuesioner. Misalnya faktor internal : '*Kurangnya fasilitas kendaraan di kantor*'. Untuk menghindari kuesioner mengarahkan pilihan responden maka faktor tersebut diganti dengan : '*Fasilitas kendaraan di kantor anda*'. Dengan pertanyaan ini responden tidak akan merasa diarahkan sehingga dia dapat memilih jawaban sesuai dengan skala (misalnya dari 1 s.d 5) dimana semakin besar angka pilihan berarti semakin baik penilaian responden terhadap faktor tersebut.
4. Kuesioner disebarakan kepada penentu kebijakan yang dinilai mengetahui secara internal kondisi objek dan memahami peluang dan ancaman eksternal yang berpotensi mengganggu. Oleh karena itu responden yang dinilai layak mengisi kuesioner adalah pihak pelaksana dari strategi itu sendiri. Latar belakang pemilihan responden berdasarkan kapasitasnya terhadap penguasaan permasalahan menjadi penting karena hampir tidak mungkin kita mencari prioritas pembangunan pada individu yang tidak memahami institusi atau daerah tersebut secara komprehensif.
5. Kuesioner SWOT ini terdiri dari 45 faktor internal dan 24 faktor eksternal. Total keseluruhan faktor yang akan diuji dan ditanyakan adalah 69 faktor.

Kuesioner ini kemudian disebarakan kepada responden yang berjumlah 51 dan mewakili populasi ahli (tokoh masyarakat, camat, pemerintah, dewan, LSM, akademisi) di Kota Pangkalpinang. Secara rinci responden tersebut adalah :

Tabel 3.6
Proporsi Responden Kuesioner SWOT Kota Pangkalpinang

Responden	Jumlah	%
Dinas	12	24%
Tokoh Masyarakat	10	20%
Akademik	6	12%
Institusi Bagian Pemerintah	6	12%
LSM	4	8%
Camat	4	8%
Badan	3	6%
Kantor Pemerintah	3	6%
DPRD	3	6%
Jumlah	51	100 %

Sumber : Diolah Tim LPEM FEUI untuk RPJP-D Kota Pangkalpinang, 2006

Responden terbesar adalah dari kalangan pemerintah (Dinas, Institusi Bagian, Badan dan Kantor) sebesar total 47%. Hal ini karena pemerintah merupakan pelaku utama pembangunan yang memiliki tugas pokok sebagai pemberi layanan publik, penegak hukum, penjaga persaingan yang sehat dalam dunia usaha, pelindung dan pengayom masyarakat.

Responden kedua terbesar yaitu sebanyak 20% dari total responden adalah tokoh masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip sumber informasi visioner yang harus digali dari tokoh masyarakat dan prinsip dasar keunikan tempatan yang sangat tepat bila digali dari para tokoh masyarakat.

Responden ketiga terbesar yaitu kalangan akademik sebesar 12%. Hal ini pun sejalan dengan prinsip informasi normatif di mana salah satu sumber informasi utama adalah kalangan akademisi.

Responden lain yang proporsinya sama besar berasal dari kalangan LSM dan camat. LSM mewakili kelompok yang menyuarakan suara masyarakat secara independen dari pemerintah, sementara camat mewakili pejabat publik yang mewakili masyarakat secara dependen dari pemerintah. Kedua kelompok responden ini memegang peranan penting dalam proses pembangunan. Responden yang juga penting adalah dewan sebagai perwakilan politik masyarakat. Jumlah responden dewan adalah 6% dari total responden.

Setelah memperoleh kuesioner dari para responden di atas maka tahap selanjutnya adalah menilai kelayakan kuesioner. Uji kelayakan terhadap kuesioner yang kembali menunjukkan bahwa 97% kuesioner telah terisi dengan baik. Apakah responden telah mengisi sesuai dengan aturan yang dijelaskan di dalam kuesioner? Jawabannya akan terlihat dari indikator tingkat konsistensi.

Pengolahan kuesioner SWOT melalui beberapa tahapan yaitu:

1. Menghitung rata-rata preferensi dari setiap faktor. Interval skala adalah 1 s.d 6 mulai dari yang terburuk hingga terbaik.

*** untuk Penilaian Responden:**

Angka 1 = Sangat Buruk
Angka 2 = Buruk
Angka 3 = Cukup
Angka 4 = Agak Baik
Angka 5 = Baik
Angka 6 = Sangat Baik

*** untuk Urgensi Penanganan:**

Angka 1 = Tidak Urgen
2 = Agak Urgen
3 = Urgen
4 = Sangat Urgen

2. Membuat kategori (S/W/O/T) berdasarkan rata-rata preferensi. Apabila rata-rata preferensi suatu faktor internal lebih tinggi dari pada rata-rata keseluruhan faktor internal maka faktor tersebut masuk kategori S dan W. Hal yang sama juga diterapkan pada faktor-faktor eksternal pada saat menentukan faktor O atau T.
3. Menghitung urgensi (derajat kepentingan) penanganan terhadap faktor. Skala faktor adalah 1 s.d 4 mulai dari yang tidak penting hingga sangat penting
4. Mengalikan rata-rata preferensi dengan urgensi di setiap faktor. Hasil perkalian ini merupakan nilai dasar yang dimasukkan ke dalam kuadran strategi
5. Menghitung indeks konsistensi pengisian kuesioner dengan membandingkan hasil kali rata-rata preferensi faktor (S atau O) dengan rata-rata urgensi faktor tersebut dengan hasil kali rata-rata preferensi (W atau T) dengan rata-rata urgensinya dengan tingkat toleransi 10%
6. Memasukkan masing-masing hasil kali pada poin ke 4 ke dalam kuadran strategi berdasarkan identitas preferensinya (S/W/O/T)

3.4.5. Hasil Olahan Kuesioner SWOT Kota Pangkalpinang

Hasil olahan kuesioner SWOT Kota Pangkalpinang dimulai dari membagi kategori faktor internal berdasarkan kekuatan/S dan kelemahan/W dan faktor eksternal berdasarkan peluang/O dan ancaman/T. Pembagian faktor internal dan eksternal sendiri sudah dilakukan pada desain kuesioner di mana kendali organisasi adalah pemerintah sehingga faktor internal dan eksternal dilihat dari sisi pemerintah. Faktor internal mengacu pada fungsi pemerintah dan faktor eksternal mengacu pada peran pemerintah. Kedua faktor baik fungsi dan peran mengacu pada kepentingan daerah.

Berdasarkan preferensi kita dapat membagi dua faktor internal yaitu kekuatan dan kelemahan. Sebuah faktor dikatakan kekuatan/S apabila rata-rata preferensi faktor tersebut lebih besar dari rata-rata preferensi umum. Sebaliknya jika faktor tersebut adalah kelemahan/W. Rata-rata preferensi umum sendiri diambil dari rata-rata preferensi seluruh faktor internal.

Tabel 3.7
Faktor Kekuatan
Kota Pangkalpinang

No.	FAKTOR INTERNAL	Rata-Rata Preferensi	Kategori	Rata-Rata Urgensi	Hasil Kali Rata-Rata Preferensi & Urgensi
1	Jumlah dan distribusi fasilitas infrastruktur dan suprastruktur yang mendukung kegiatan keagamaan di Kota Pangkalpinang	4.27	S	3.12	13.33
2	Koordinasi antar dinas, badan dan unit lain di dalam tubuh organisasi pemerintah untuk proses pembangunan mulai dari perencanaan hingga evaluasi	3.90	S	3.29	12.85
3	Kerja sama dengan Pemda sekitar Bangka Belitung	3.94	S	3.06	12.06
4	Jumlah dan distribusi fasilitas kesehatan Kota Pangkalpinang	3.78	S	3.18	12.02
5	Daya dukung fasilitas kantor, yang tidak bergerak, seperti ruang kantor, komputer, printer	3.90	S	3.08	12.01
6	Rata-rata kualitas kerja aparatur Pemerintah Kota Pangkalpinang	3.80	S	3.14	11.93
7	Jumlah dan distribusi tenaga pendidik di Kota Pangkalpinang	3.86	S	3.02	11.66
8	Jumlah dan distribusi fasilitas pendidikan di Kota Pangkalpinang	3.86	S	3.02	11.66
9	Kualitas latar belakang pendidikan dan keterampilan calon pegawai di Kota Pangkalpinang	3.88	S	3.00	11.65
10	Pelayanan sistem administrasi kependudukan	3.94	S	2.94	11.59
11	Kemampuan aparatur pemerintah Kota Pangkalpinang dalam melaksanakan TUPOKSI Dinas/Unit Kerja/Badan	3.78	S	3.04	11.50
12	Hubungan profesionalisme kerja antara DPRD dan Pemerintah Kota Pangkalpinang	3.98	S	2.88	11.47
13	Daya dukung utilitas dasar seperti jaringan listrik dan air bersih	3.69	S	3.10	11.42
14	Kejelasan dan Ketersediaan TUPOKSI di setiap dinas Pemda Kota Pangkalpinang	4.02	S	2.82	11.35
15	Ketersediaan jaringan teknologi Informasi seperti internet dan telp	3.80	S	2.96	11.26
16	Alokasi anggaran untuk program yang dijalankan oleh dinas	3.82	S	2.88	11.02
17	Kesesuaian jabatan struktural dengan ketersediaan SDM	3.63	S	3.02	10.95
18	Pembinaan sentra pelayanan jasa oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang	3.63	S	2.94	10.67
19	Penanganan kasus-kasus sengketa lahan seperti penyelesaian lahan sengketa dan ganti rugi oleh Pemda Kota	3.69	S	2.82	10.41
20	Jumlah PNS dan alokasi dana yang mendukung aktivitas PNS di Kota Pangkalpinang	3.63	S	2.86	10.38
21	Ketersediaan dana operasional untuk mendukung aktivitas DPRD Kota Pangkalpinang (Proposal dari LSM, Penyambutan tamu, Pansus,dll)	3.65	S	2.73	9.94

Sumber : Diolah Tim LPEM FEUI untuk RPJP-D Kota Pangkalpinang, 2006

Faktor kekuatan ini kemudian dibagi dua dengan membuat potongan atau *threshol* dari **rata-rata umum hasil kali preferensi dan urgensi** setiap faktor. Apabila sebuah faktor S memiliki hasil kali rata-rata preferensi dengan urgensi lebih tinggi dari rata-rata *threshol* secara umum maka ia masuk kategori faktor kekuatan kategori pertama (warna kuning). Jika berlaku sebaliknya maka ia masuk kategori faktor kekuatan kategori kedua (warna biru).

Hasil perhitungan rata-rata preferensi setiap faktor dikalikan dengan rata-rata urgensinya. Hasil kali ini juga dijadikan nilai dasar untuk dimasukkan ke dalam kuadran empat SWOT. Perhitungan yang sama dilakukan untuk faktor internal kelemahan sebagai berikut:

Tabel 3.8
Faktor Kelemahan Kota Pangkalpinang

No.	FAKTOR INTERNAL	Rata-Rata Preferensi	Kategori	Rata-Rata Urgensi	Hasil Kali Rata-Rata Preferensi & Urgensi
22	Sarana dan prasarana infrastruktur pembangunan di Kota Pangkalpinang	3.57	W	3.18	11.34
23	Tingkat kedisiplinan aparatur pemerintah Kota Pangkalpinang secara umum	3.47	W	3.22	11.16
24	Jumlah dan distribusi tenaga medis di Kota Pangkalpinang	3.55	W	3.12	11.06
25	Pelaksanaan sistem pengawasan melekat di Kota Pangkalpinang	3.57	W	3.04	10.85
26	Peranan Peraturan Daerah pada penciptaan iklim bisnis dan kaitannya dengan pemahaman pengusaha terhadap Perda tersebut	3.55	W	3.02	10.72
27	Penegakkan supremasi hukum terhadap tertib administratif PNS	3.53	W	3.02	10.66
28	Ketersediaan Program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat Teknis) untuk mendukung kinerja pegawai pemerintah Kota Pangkalpinang	3.57	W	2.98	10.64
29	Ketersediaan data base, jaringan informasi data dan akurasi	3.41	W	3.04	10.37
30	Jumlah dan distribusi fasilitas infrastruktur dan superstruktur yang mendukung kegiatan olah raga di Kota Pangkalpinang	3.59	W	2.88	10.34
31	Ketersediaan Standar Pelayanan Masyarakat dan Implementasinya	3.45	W	2.96	10.22
32	Pembinaan sentra perdagangan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang	3.53	W	2.88	10.17
33	Fasilitas & sistem pengelolaan limbah domestik seperti sampah	3.25	W	3.08	10.02
34	Kesesuaian jabatan fungsional dengan ketersediaan SDM	3.43	W	2.88	9.89
35	Ketersediaan hasil-hasil dan kualitas penelitian untuk mendukung pembangunan Kota Pangkalpinang	3.10	W	3.14	9.72
36	Kesesuaian penempatan personil antara latar belakang pendidikan dengan jenis pekerjaannya	3.55	W	2.73	9.67
37	Penanganan kasus-kasus yang menyangkut perburuan di Kota Pangkalpinang oleh pemerintah kota	3.47	W	2.76	9.60
38	Program dan kegiatan pemberdayaan pemuda di Kota Pangkalpinang	3.37	W	2.84	9.59
39	Jumlah Pegawai Negeri Sipil dibandingkan tingkat kebutuhannya	3.45	W	2.75	9.47
40	Daya dukung fasilitas kantor, yang bergerak, seperti kendaraan dinas	3.55	W	2.65	9.39
41	Program dan kegiatan pemberdayaan perempuan di Kota Pangkalpinang	3.29	W	2.80	9.24
42	Penanganan masalah genangan air di Kota Pangkalpinang	2.94	W	3.04	8.94
43	Pembinaan sentra industri oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang	3.14	W	2.84	8.92
44	Kebijakan Ketenagakerjaan (transportasi murah untuk buruh, tingkat upah, peran serikat pekerja dll)	3.14	W	2.71	8.49
45	Penanganan terhadap kasus-kasus ilegal dalam pemanfaatan sumber daya alam Kota Pangkalpinang	2.86	W	2.88	8.25

Sumber : Diolah Tim LPEM FEUI untuk RPJP-D Kota Pangkalpinang, 2006

Faktor kelemahan juga dibagi dua dengan membuat potongan atau *threshold* dari rata-rata umum hasil kali preferensi dan urgensi faktor kelemahan itu sendiri. Apabila sebuah faktor W memiliki rata-rata hasil kali preferensi dan urgensi lebih tinggi dari rata-rata *threshold* maka ia masuk kategori faktor kelemahan kategori pertama (warna kuning). Jika berlaku sebaliknya maka ia masuk kategori faktor kelemahan kategori kedua (warna biru).

Hasil kali rata-rata preferensi dan urgensi ini kemudian dijadikan nilai dasar untuk dimasukkan ke dalam kuadran empat SWOT.

Secara keseluruhan kita memperoleh 21 faktor kekuatan (S) dan 24 faktor kelemahan (W) dari total 45 faktor internal Kota Pangkalpinang.

Dengan cara yang sama seperti pengolahan kekuatan dan kelemahan dan membagi keduanya menjadi masing-masing kekuatan/kelemahan pertama dan kedua, kita kemudian menghitung faktor peluang (O) dan ancaman (T). Sama seperti pengolahan faktor internal, faktor eksternal pun memiliki rata-rata urgensi dan hasil kali rata-rata preferensi dan urgensi. Hasil kali rata-rata preferensi dan urgensi inilah yang kemudian menjadi patokan untuk mengisi empat kuadran SWOT.

Hasil olahan kuesioner untuk faktor eksternal adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9.
Faktor Kesempatan Kota Pangkalpinang

No.	FAKTOR EKSTERNAL	Rata-Rata Preferensi	Kategori	Rata-Rata Urgensi	Hasil Kali Rata-Rata Preferensi & Urgensi
1	Penetapan Kota Pangkalpinang sebagai ibu kota Provinsi Bangka Belitung	5.22	O	3.33	17.39
2	Potensi pengembangan Kota Pangkalpinang sebagai Kota Perdagangan	4.57	O	3.35	15.32
3	Potensi pengembangan Kota Pangkalpinang sebagai Kota Jasa	4.53	O	3.33	15.10
4	Pengaruh kondisi geografis Kota Pangkalpinang yang berada di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	4.55	O	3.08	14.00
5	Potensi Pengembangan Pusat Kota	4.22	O	3.29	13.89
6	Dampak penerapan otonomi daerah terhadap pembangunan di Kota Pangkalpinang secara keseluruhan	4.27	O	3.12	13.33
7	Rata-rata kualitas kesehatan masyarakat Kota Pangkalpinang (umur harapan hidup, kualitas gizi, kematian bayi dll)	3.94	O	3.16	12.44
8	Peran media massa di Kota Pangkalpinang sebagai elemen demokrasi dan transparansi	4.24	O	2.92	12.37
9	Potensi pengembangan Kota Pangkalpinang sebagai Kota Industri	4.06	O	2.98	12.10
10	Dampak globalisasi dan peningkatan kualitas teknologi informasi terhadap usaha mengoptimalkan potensi pembangunan Kota Pangkalpinang	3.94	O	3.04	11.98
11	Pemerataan pertumbuhan ekonomi antarkecamatan di Kota Pangkalpinang	3.73	O	3.06	11.40
12	Sebaran jumlah penduduk antar kecamatan	3.73	O	2.82	10.52

Sumber : Diolah Tim LPEM FEUI untuk RPJP-D Kota Pangkalpinang, 2006

Faktor eksternal (peluang) yang berwarna kuning adalah faktor peluang kategori pertama (rata-rata hasil kali preferensi dan urgensi lebih tinggi dari rata-rata yang sama dari *threshold*) sementara yang berwarna biru adalah faktor kategori peluang kedua.

Tabel 3.10
Faktor Ancaman Kota Pangkalpinang

No.	FAKTOR EKSTERNAL	Rata-Rata Preferensi	Kategori	Rata-Rata Urgensi	Hasil Kali Rata-Rata Preferensi & Urgensi
13	Kegiatan yang bertentangan dengan ketertiban dan keamanan seperti narkoba, tingkat kejahatan	3.47	T	3.27	11.36
14	Peran pengusaha di dalam pembangunan Kota Pangkalpinang	3.67	T	3.08	11.29
15	Tingkat kepastian hukum bagi para investor	3.59	T	3.04	10.91
16	Partisipasi masyarakat di dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di Kota Pangkalpinang	3.55	T	3.06	10.86
17	Eksternalitas pembangunan di Kota Pangkalpinang (Kemiskinan, Pedagang Kaki Lima, rumah liar & Ketimpangan Distribusi Pendapatan)	3.25	T	3.10	10.08
18	Emansipasi perempuan di dalam pembangunan Kota Pangkalpinang	3.53	T	2.78	9.83
19	Dampak permasalahan sampah di Kota Pangkalpinang	3.27	T	2.92	9.57
20	Dampak genangan air di Kota Pangkalpinang	2.90	T	3.06	8.88
21	Kesesuaian permintaan lapangan kerja dan jumlah pencari kerja di Kota Pangkalpinang	2.84	T	3.00	8.53
22	Kesadaran pengusaha akan kelestarian alam dan lingkungan	2.67	T	3.16	8.42
23	Dampak lingkungan akibat pertambangan dari wilayah administratif di luar Kota Pangkalpinang	2.51	T	2.96	7.43
24	Masalah lingkungan dari kegiatan pertambangan terhadap pembangunan Kota Pangkalpinang	2.49	T	2.90	7.23

Sumber : Diolah Tim LPEM FEUI untuk RPJP-D Kota Pangkalpinang, 2006

Faktor eksternal (ancaman) yang berwarna kuning adalah faktor ancaman kategori pertama sementara yang berwarna biru adalah faktor ancaman kategori kedua.

Kita harus hati-hati di dalam menilai faktor ancaman. Jika tidak hati-hati maka kita akan terjebak ke dalam justifikasi faktor netral menjadi sesuatu yang buruk. Misalnya pada faktor ancaman pertama (warna kuning) ditemukan bahwa faktor “peran pengusaha di dalam pembangunan Kota Pangkalpinang” dan faktor “emansipasi perempuan di dalam pembangunan Kota Pangkalpinang” adalah ancaman. Itu bukan berarti peran pengusaha dan perempuan adalah ancaman namun peran pengusaha dan perempuan masih belum optimal di dalam proses pembangunan Kota Pangkalpinang. Oleh karena itu dibutuhkan usaha lebih optimal lagi di dalam membangun, misalnya jiwa

kewirausahaan dan khususnya peran kewirausahaan kaum perempuan. Stimulasi kebijakan untuk meningkatkan peran pengusaha dan wanita dan wanita pengusaha akan semakin mempercepat tumbuhnya perekonomian Kota Pangkalpinang.

Sebelum melakukan analisis lebih lanjut yaitu memasukkan setiap faktor kedalam kuadran SWOT maka perlu dilakukan pengujian apakah hasil pengisian kuesioner ini layak secara akademik (uji konsistensi) dan apakah ada perbedaan signifikan antar faktor internal (S dan W) dan antar faktor eksternal (O dan T). Beberapa tes uji yang dapat dilakukan adalah:

3.4.6. Uji Konsistensi Faktor Unggulan dan Non Unggulan

Kuesioner SWOT akan menghasilkan rata-rata preferensi faktor unggulan (S atau O) lebih tinggi dari pada rata-rata preferensi faktor non unggulan (W atau T). Kuesioner ini bisa disebut konsisten apabila rata-rata urgensi faktor unggulan (S atau O) lebih rendah dari pada rata-rata urgensi faktor non unggulan (W atau T). Hal ini dimungkinkan karena secara psikologis ketika kita mengatakan bahwa sebuah faktor baik dengan skala tinggi (skala 5-6) maka kita akan memilih urgensi untuk memperbaikinya menjadi rendah (skala 1-2). Sebaliknya ketika kita mengatakan bahwa sebuah faktor itu buruk (skala 1-2) maka kita mengkompensasinya dengan memilih urgensi untuk memperbaikinya tinggi (skala 3-4). Toleransi untuk konsistensi kuesioner SWOT maksimal 5%. Artinya rata-rata urgensi faktor unggulan harus lebih besar dari rata-rata urgensi faktor non unggulan atau minimal proporsi 95%.

Salah satu kelemahan yang mungkin terjadi di dalam pemilihan ini adalah kecenderungan responden yang tidak bisa memilih dengan tegas dan tidak bisa memilih prioritas sehingga secara dominan preferensi yang dipilih adalah sama (1/2/3/4/5/6) untuk hampir semua preferensi dan skala yang sama (1/2/3/4) untuk semua urgensi. Kelemahan yang lain adalah responden tidak berani mengambil resiko sehingga cenderung memilih skala netral. Namun kelemahan ini bisa diantisipasi dengan menerapkan skala genap sehingga menghindari skala netral (skala angka di tengah).

Hasil pengolahan kuesioner SWOT Kota Pangkalpinang menunjukkan bahwa kuesioner ini konsisten.

Tabel 3.11
Uji Konsistensi Kuesioner SWOT
Kota Pangkalpinang

Kategori	Rata-Rata Preferensi	Rata-Rata Urgensi	Konsistensi
S	3.83	3.00	
W	3.38	2.92	0.98
O	4.25	3.12	
T	3.12	3.01	0.96
Acceptable ($\alpha > 95\%$)			

Sumber : Diolah Tim LPEM FEUI untuk RPJP-D Kota Pangkalpinang, 2006

Derajat konsistensi sebesar 0,98 pada faktor non unggulan internal dan 0,96 pada faktor unggulan eksternal masih bisa diterima karena lebih besar dari 0,95. Artinya hasil pengolahan kuesioner SWOT Kota Pangkalpinang masih dapat dikategorikan konsisten.

3.4.7. Uji Kapabiliti Faktor Unggulan dan Non Unggulan

Uji berikut adalah uji distribusi. Uji ini bertujuan untuk menjawab apakah antara faktor unggulan dan non unggulan di internal (S dan W) dan di eksternal (O dan T) memiliki perbedaan secara signifikan. Jika jawabannya iya maka perlu dibedakan dimulai dari mana kebijakan yang harus diambil ketika kita telah memperoleh kuadran hasil SWOT. Umumnya kebijakan tersebut dimulai dari yang terlemah hingga terkuat. Namun jika tidak terdapat perbedaan secara signifikan antara faktor unggulan dan non unggulan maka kebijakan yang akan diambil dapat dimulai dari kombinasi terlemah hingga terkuat atau sebaliknya.

Tabel 3.12
Uji Kapabilitas Faktor S dan W Kuesioner SWOT
Kota Pangkalpinang

Chi Square	fo	fh	fo-fh	(fo-fh) ²	(fo-fh) ² /fh
S	21	22.5	-1.5	2.25	0.1
W	24	22.5	1.5	2.25	0.1
Jumlah					0.2
Chi Square					3.481 (5%)
Ho					diterima
Kesimpulan					kapabilitas sama

Sumber : Diolah Tim LPEM FEUI untuk RPJP-D Kota Pangkalpinang, 2006

Hipotesis yang digunakan adalah:

H0: Kapabilitas Faktor S dan faktor W adalah sama

H1: Kapabilitas Faktor S dan faktor W berbeda

Distribusi yang digunakan adalah Chi Square karena jumlah n pada faktor lebih besar dari 24. Tingkat kepercayaan adalah 95% dan tabel menunjukkan chi square sebesar 3,481.

Apabila hasil perhitungan $\Sigma(\mathbf{fo-fh})^2 / \mathbf{fh} > 3,481$ maka hipotesis awal (H_0) akan ditolak pada tingkat kepercayaan 95% sebaliknya H_0 akan diterima jika nilai $\Sigma(\mathbf{fo-fh})^2 / \mathbf{fh} < 3,481$.

Hasil perhitungan untuk faktor internal menunjukkan bahwa nilai $\Sigma(\mathbf{fo-fh})^2 / \mathbf{fh} = 0,2$ yang artinya lebih kecil dari 3,481. Dalam hal ini hipotesis awal diterima yang artinya kapabilitas kedua faktor S dan W adalah sama. Artinya tidak ada bedanya jika kita memulai kebijakan dari faktor unggulan dahulu atau non unggulan dahulu.

Uji serupa kita lakukan untuk faktor eksternal. Mengingat jumlah faktornya hanya 24 maka kita dapat menggunakan distribusi binomial. Hipotesis yang kita gunakan sama ketika menguji distribusi faktor internal yaitu:

H_0 : Kapabilitas Faktor O dan faktor T adalah sama

H_1 : Kapabilitas Faktor O dan faktor T berbeda

Tabel 3.13
Uji Kapabilitas Faktor O dan T Kuesioner SWOT
Kota Pangkalpinang

Binomial	fo	fh
O	12	12
T	12	12
	Binomial	0.581
	Ho	diterima
	Kesimpulan	kapabilitas sama

Sumber : Diolah Tim LPEM FEUI untuk RPJP-D Kota Pangkalpinang, 2006

Hasil perhitungan distribusi binomial menunjukkan bahwa nilai distribusi adalah 0,581. Nilai ini lebih besar dari pada probabilitas 0,05 (tingkat keyakinan 95%). Hipotesis awal akan ditolak jika nilai distribusi binomial lebih kecil dari probabilitas (misalnya 5% atau 0,05) sebaliknya hipotesis akan diterima.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa distribusi binomial sebesar 0,581 lebih besar dari pada probabilitas 0,05 sehingga H_0 diterima. Artinya tidak terdapat perbedaan kapabilitas antara faktor unggulan dan non unggulan pada

faktor eksternal kuesioner SWOT Kota Pangkalpinang. Indikator ini membuat kita semakin leluasa untuk memilih apakah memulai dari kombinasi faktor lemah atau kuat ketika akan merancang kebijakan dari kombinasi 4 kuadran faktor SWOT.

3.4.8. Diagram Kombinasi : SWOT

Kita sudah menguji baik dari sisi jumlah sampel responden maupun dari derajat konsistensi dan kapabiliti. Hasilnya bahwa kuesioner ini dapat digunakan sebagai dasar penyusunan visi, misi dan arah pembangunan. Kombinasi ini diperoleh dari hasil penjumlahan dari total hasil kali rata-rata preferensi dan rata-rata urgensi. Dengan menggunakan *threshold* kita dapat membagi setiap faktor menjadi dua kategori yaitu kategori pertama dan kedua. Sebelumnya kita perlu mengetahui jumlah masing-masing hasil kali setiap faktor sebagai berikut:

Tabel 3.14
Jumlah Hasil Kali Rata-Rata Preferensi dan Urgensi Kuesioner SWOT Kota Pangkalpinang

S/Kekuatan	241
W/Kelemahan	227
O/Kesempatan	160
T/Ancaman	103

Sumber : Diolah Tim LPEM FEUI untuk RPJP-D Kota Pangkalpinang, 2006

Faktor S adalah faktor kekuatan dari sisi internal, faktor W adalah faktor kelemahan dari sisi internal. Faktor O adalah faktor kesempatan dari sisi eksternal dan faktor T adalah faktor ancaman dari sisi eksternal. Jika kita merujuk pada pembagian kategori bahwa S dan O adalah faktor unggulan dan W dan T adalah faktor non unggulan maka kita dapat melihat dari tabel di atas bahwa rata-rata hasil kali preferensi dan urgensi pada faktor unggulan lebih baik dari pada faktor non unggulan. Namun karena kapabilitas faktor unggulan dan non unggulan tidak berbeda baik dari sisi internal maupun eksternal maka kita dapat memulai kebijakan dari sisi mana pun.

Marilah kita kemudian melihat hasil konfigurasi keempat faktor yang ada sebagai berikut:

Tabel 3.15
Diagram Kombinasi Kuesioner SWOT
Kota Pangkalpinang

	S/Kekuatan	W/Kelemahan
O/Kesempatan	401 (S1 & O1)	387 (W1 & O2)
T/Ancaman	344 (S2 & T1)	330 (W2 & T2)

Sumber : Diolah Tim LPEM FEUI untuk RPJP-D Kota Pangkalpinang, 2006

Dengan menggunakan *treshold* kita dapat membagi faktor unggulan menjadi dua (S1,S2 dan O1,O2).Demikian pula dengan faktor non unggulan yaitu (W1, W2 dan T1,T2).

Mengingat kita sudah memiliki rata-rata yang masuk kategori pertama (berwarna kuning) dan kategori kedua (berwarna biru) dan kita juga sudah menguji konsistensi dan kapabilitas maka kita sudah bisa membuat dasar kebijakan.

Studi ini menggunakan asumsi:

- Kuadran Pertama adalah kuadran kebijakan untuk 5 tahun pertama
- Kuadran Kedua adalah kuadran kebijakan untuk 5 tahun kedua
- Kuadran Ketiga adalah kuadran kebijakan untuk 5 tahun ketiga
- Kuadran Keempat adalah kuadran kebijakan untuk 5 tahun keempat

Penentuan kuadran awal adalah bersifat bebas karena uji kapabilitas tidak melihat adanya perbedaan antara faktor unggulan dan non unggulan. Kita akan memulai dari kombinasi terbesar hingga terkecil sehingga:

- Kuadran Pertama untuk lima tahun pertama: S1O1
- Kuadran Kedua untuk lima tahun kedua: W1O2
- Kuadran Ketiga untuk lima tahun ketiga :S2T1
- Kuadran Keempat untuk lima tahun keempat: W2T2

Keempat kuadran tersebut menjadi dasar penyusunan Arah Pembangunan untuk setiap tahap yaitu 5 tahunan. Dari hasil penyusunan tahapan pembangunan tersebut diambil inti dan garis besarnya sehingga diperoleh visi dan misi pembangunan daerah Kota Pangkalpinang.

Bab IV

PENUTUP

RPJP Daerah menjadi pedoman bagi seluruh pemangku-kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai koridor dalam penyusunan visi, misi dan, program calon Kepala Daerah, dan pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah untuk selanjutnya menjadi pedoman penyusunan program dan proyek pemerintah agar tercipta sebuah kesinambungan di dalam pembangunan.

Dokumen RPJP berisi Visi, Misi Daerah berjangka waktu 20 tahun. Visi dan Misi diikuti dengan Arah Pembangunan setiap 5 tahun yang menjadi fokus utama namun tidak berarti ketika bidang tertentu menjadi fokus bidang yang lain dikesampingkan. Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah disusun dengan pendekatan ilmiah sesuai dengan arahan Surat Edaran Mendagri (SE Mendagri) No 050/2020/SJ tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan RPJP dan RPJM Daerah.

Visi dan Misi Kepala Daerah yang dicantumkan di dalam dokumen RPJM dan kemungkinan berganti setiap 5 tahun sekali sesuai dengan pergantian kepala daerah seyogyanya mengikuti visi dan misi daerah sehingga pembangunan 20 tahun dapat berjalan berkesinambungan.